

**SEJARAH SOSIAL DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1993

Milik Depdikbud  
Tidak diperdagangkan

**SEJARAH SOSIAL DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:  
Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan**

Oleh :  
**Ryadi Goenawan  
Darto Harnoko**

Penyunting :  
**Sutopo Sutanto  
AB. Lopian**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROTEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
JAKARTA  
1993**



**SEJARAH SOSIAL DAERAH DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA : Mobilitas Sosial DI. Yogyakarta Periode  
Awal Abad Duapuluhan**

Oleh : Ryadi Goenawan  
Darto Harnoko  
Penyunting : Sutopo Sutanto  
AB. Lopian  
Koreksi Naskah : Sri Sutjiatiningsih  
Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang  
Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi  
Sejarah Nasional  
Jakarta 1993  
Cetakan Pertama 1984  
Cetakan Kedua 1993  
Dicetak oleh: CV. MANGGALA BHAKTI, Jakarta - Indonesia



## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan memperoleh serta dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai yang terungkap dari rangkaian peristiwa yang digambarkan dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya-karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan dari karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Sedyawati', written in a cursive style.

---

Prof. Dr. Edi Sedyawati  
NIP. 130 202 962

## PENGANTAR CETAKAN PERTAMA

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan Kesejarahian perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Sejarah Sosial ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal, misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan, karena adanya proses sosialisasi, yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut, seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar masa lampau, yang memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjutnya



pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di provinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri yang diperlukan untuk pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, permulaan hidup, kebahasaan, sistem kekerabatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan sejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Desember 1984  
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi  
Sejarah Nasional

## PENGANTAR CETAKAN KEDUA

Buku ini merupakan hasil cetak ulang dari hasil cetakan pertama yang diterbitkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tahun 1984. Dalam cetakan ini telah diadakan perbaikan sistematika dan redaksional.

Buku Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta banyak diminati oleh masyarakat luas khususnya para peminat kajian sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Atas dasar itu maka Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional menganggap perlu menerbitkan kembali buku ini dalam rangka persebaran informasi kesejarahan pada masyarakat luas dengan tujuan memupuk kebanggaan nasional dan rasa cinta tanah air.

Sekalipun buku ini telah mengalami perbaikan, namun kami tidak menutup kemungkinan saran perbaikan dan penyempurnaan.

Jakarta, Juli 1993

Pemimpin Proyek Inventarisasi dan  
Dokumentasi Sejarah Nasional



Sri Sutjiatiningsih  
NIP. 130 422 397



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan</b> .....	iii
<b>Pengantar Cetakan Pertama</b> .....	v
<b>Pengantar Cetakan Kedua</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Daftar Singkatan</b> .....	xi
<b>Pendahuluan</b> .....	1
<b>Bab I Gambaran Umum Kota Yogyakarta</b> .....	13
1.1 Keadaan Wilayah Geografis .....	15
1.1.1 Mobilitas Geografis .....	16
1.1.2 Pertumbuhan Penduduk .....	22
1.2 Sejarah Pemerintahan Yogyakarta .....	25
1.2.1 Masa Pemerintahan Kesultanan .....	25
1.2.2 Zaman Jepang .....	26
1.2.3 Zaman Republik .....	27
<b>Bab II Proses Mobilitas Sosial Bagi Masyarakat di Kota Yogyakarta</b> .....	33
2.1 Kehidupan Kultural .....	38
2.2 Kehidupan Keagamaan .....	45

2.2.1	Agama Kristen Katolik .....	46
2.2.2	Agama Kristen Protestan .....	54
2.2.3	Agama Islam .....	68
<b>Bab III Mobilitas Sosial di Kota Yogyakarta .....</b>		<b>85</b>
3.1	Modernisasi Masyarakat Jawa : Gagasan Kaum Liberal .....	86
3.2	Pendidikan Moderen di Keluarga Pakualaman ...	93
3.2.1	Ide-ide Radikal dari Trah Pakualaman yang Menunjang Mobilitas Sosial di Kota Yogyakarta ..	98
3.2.1.1	Sekolah Adhi Dharma .....	99
3.2.1.2	Raden Mas Suwardi dan Sekolah Taman Siswa ...	100
3.3	Perkembangan Sekolah di Kota Yogyakarta .....	103
<b>Bab IV Kesimpulan .....</b>		<b>113</b>
<b>Bibliografi .....</b>		<b>115</b>
<b>Lampiran .....</b>		<b>126</b>

## DAFTAR SINGKATAN

- BKI* : *Bijdragen tot de Tall Land en Volkenkunde Koninklijk Instituut voor Tall Land en Volkenkunde, Den Haag*
- hlm* : halaman
- TBB* : *Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur, Batavia*
- TBG* : *Tijdschrift voor Indische Tal Land en Volkenkunde, Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Batavia*
- TNI* : *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Zalt-Bommel, Nijmegen, Bussum, Den Haag, Amsterdam*
- UGM* : Universitas Gadjah Mada



## PENDAHULUAN

Hanya beberapa saat setelah ditandatanganinya Perjanjian Gianti<sup>1</sup> pada 13 Februari 1755 dan berdiri keraton yang baru, Pangeran Mangkubumi yang bergelar "Sampejan Dalem Inkgang Sinuhun Kandjeng Sultan Hamengku Buwono Inkgang Kaping Sapisan Senapati Ingalaga Abdurrachman Sajidin Panatagama Kalifatullah Negara Ngajogjakarta Hadiningrat " memindahkan pusat pemerintahannya dari Ambarketawang ke Yogyakarta, tepatnya pada 7 Oktober 1756<sup>2</sup>. Luas seluruh wilayah benteng dan keraton yang baru ini kurang lebih 4000 meter persegi dengan bentuk menyerupai belah ketupat<sup>3</sup>. Sejak saat itu dimulailah kehidupan yang baru dalam kota itu.

Buku ini merupakan usaha menulis Sejarah Sosial Kota Yogyakarta dengan mobilitas sosialnya sejak awal abad dua-puluhan. Disadari oleh penulis bahwa menggambarkan pengertian mobilitas sosial atas Kota Yogyakarta tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan batasan pengertian kota sendiri masih belum sepenuhnya benar mengingat bahwa sejarah pertumbuhan kota di Asia Tenggara relatif masih muda. Menurut Daldjoeni<sup>4</sup>, hakekat kota adalah adanya mobilitas sosial dengan taraf individualisasi yang tinggi serta sekularisasi. Benarkah definisi ini jika ingin diterapkan dalam tulisan atas Kota Yogyakarta?



Bagaimana melihat pengertian mobilitas sosialnya? Meski gambaran mobilitas sosial adalah turun-naiknya seseorang dalam tangga kemasyarakatan.

Kiranya kita perlu menengok ke belakang karena apakah semenjak berdirinya "Kota" Yogyakarta sampai tahun 1900 tidak pernah mengalami perubahan? Ternyata proses perkembangan luas wilayah memang ada, dari gambaran fakta-fakta yang berkisar antara tahun 1756 hingga tahun 1824. Secara kasar perkembangan luas wilayah ini dapat disebutkan sebagai berikut<sup>5</sup> : (1) pada tahun 1756 luas wilayah 9,7 kilometer persegi, (2) pada tahun 1790 luas wilayah 12,5 kilometer persegi, dan (3) pada tahun 1824 luas wilayah 13,5 kilometer persegi.

Dari hal di atas ternyata untuk menulis dalam periode awal abad ke-20an, tim penulis memang "dipaksa" untuk melihat ke belakang. Memang benar tentang masalah perubahan sosial di Yogyakarta telah ada yang menulisnya<sup>6</sup> tetapi tulisan ini menurut hemat kami berlaku bagi pengertian seluruh wilayah Yogyakarta.

Jika mobilitas sosial Kota Yogyakarta dalam periode awal abad 20an ingin diketemukan, berarti tidak hanya melihat kota inti dari Kesultanan Yogyakarta yang berpagar benteng, maka masalahnya kini bagaimana transportasi dan pasar harus dikisahkan dalam penulisan ini, karena jaringan transportasi terletak di luar lingkungan "kota" inti yang berbenteng. Dari peta kota, Pasar Beringharjo yang terletak di sebelah utara dari pusat kota lama merupakan pasar yang tertua bagi kehidupan ekonomi di daerah Yogyakarta<sup>7</sup>, begitu juga untuk jaringan transportasi khususnya kereta api yang diwakili oleh perusahaan swasta NIS (*Nederlandch Indische Spoorwegmaatschappij*) yang berpusat di Stasiun Lempuyangan<sup>8</sup>, ternyata terletak jauh dari apa yang disebut "kota" pada masa itu.

Berbagai perubahan yang ada baik yang berupa fisik maupun non-fisik sejak awal berdirinya kota hingga tahun 1900 pasti akan berpengaruh atas permasalahan yang dikemu-

kakan. Sebagai contoh, baru mengungkapkan nama Kota Yogyakarta saja tidak diperoleh gambaran yang seragam dan interpretasi yang juga berlainan. Ada pihak yang menyatakan bahwa nama Kota Yogyakarta berasal dari kata *ayodya* yang berarti kemenangan dan *karta* yang berarti kota<sup>9</sup>. Sebuah buku yang dikarang oleh C.F. Winter<sup>10</sup>, menyatakan bahwa Ngayogyakarta itu berasal dari kata *jogja* yang berarti baik, sedangkan *karta* berarti aman dan makmur. Mana yang benar tidak dipersoalkan di sini karena kami tidak bermaksud melihat pengertian mobilitas sosial dari "metafora" kata yang ada dan lebih memperhatikan bentuk-bentuk lingkup ruang tata kota dengan isi yang berada di dalamnya dalam sebuah proses<sup>11</sup>. Kesulitan awal sumber-sumber yang menceritakan bentuk Kota Yogyakarta sebelum tahun 1830 sangat langka jika dibandingkan dengan berbagai sumber setelah tahun tersebut ke atas<sup>12</sup> sehingga deskripsi atas Kota Yogyakarta yang kami kemukakan di sini merupakan gambaran setelah tahun 1830. Hal itu didasarkan atas kondisi yang objektif karena langka dan terbatasnya sumber-sumber itu. Walaupun ada berbagai sumber yang berbahasa Belanda<sup>13</sup>, Inggris<sup>14</sup> ataupun Jawa<sup>15</sup>, ternyata lebih memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana peran Mangkubumi dalam perjuangannya.

Pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan historis<sup>16</sup>, dengan ilmu bantu sosiologi<sup>17</sup> dan antropologi sosial<sup>18</sup> untuk memperoleh gambaran yang diinginkan. Menurut sejarahnya, kemunculan kota-kota di Aia akibat adanya krisis ekonomi di pedesaan dan di dalam kota sendiri terjadi surplus ekonomi dengan sistem transportasi yang semakin berkembang<sup>19</sup>. Akibat yang terjadi atas proses perjalanan dan perkembangan kota sendiri, ialah hubungan antarindividu lebih bersifat impersonal, formal, realis, dan spesialis.

Kemunculan pendidikan pada dasarnya menyangkut prestis sosial dalam keluarga dan akibat pendidikan melahirkan kelompok yang disebut sebagai masyarakat perantara yang pada dasarnya ikut mempercepat proses perubahan sosial atas sebuah

tempat yang pada gilirannya menarik untuk diikuti oleh yang lainnya. Proses semacam ini terlihat di beberapa kampung tempat pemukiman penduduk di wilayah Kota Yogyakarta pada masa lalu. Ternyata gambaran yang terlihat menunjukkan kepada kita bahwa agama ikut memainkan peranan penting dalam proses perubahan sosial dan jelas mengarah kepada mobilitas sosial<sup>20</sup>, akibatnya untuk sebuah kota dalam pengertian yang utuh dibutuhkan kondisi-kondisi sebagai berikut<sup>21</sup> : (1) adanya pembagian kerja dalam spesialisasi yang jelas, (2) organisasi sosial lebih berdasarkan atas pekerjaan dan kelas sosial dari pada kekeluargaan, (3) lembaga-lembaga pemerintahan lebih berdasarkan teritorium dari pada hubungan kekeluargaan, (4) adanya suatu sistem perdagangan dan pertukangan, (5) mempunyai sarana komunikasi dan dokumentasi, dan (6) berteknologi yang rasional. Dari keenam kondisi yang diperlukan untuk menghadirkan pengertian sebuah kota, ternyata faktor penduduk ikut memegang peranan penting untuk terjadinya mobilitas sosial. Semua ini dapat terlihat dalam gambaran yang senyatanya atas terbaginya wilayah-wilayah tertentu dalam Kota Yogyakarta melalui birokrasi pemerintahannya<sup>22</sup>, karena itu akankah diingkari jika mobilitas sosial seperti di Kota Yogyakarta pada dasarnya juga menunjuk pada heterogenitas masyarakatnya? Hal ini jelas terlihat semenjak dibukanya sekolah-sekolah untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintah kolonial yang tergabung dalam *Binnenlands Bestuur* meskipun pada awalnya tempat yang diperoleh hanya di bagian terendah dari suatu sistem birokrasi administrasi pemerintah kolonial. Salah satu keinginan untuk menjadi "priyayi baru" ialah melalui sekolah guru yang telah dibuka di Yogyakarta pada tahun 1897<sup>23</sup>. Kenaikan status seseorang telah menggelesahkan golongan atas dalam artian priyayi yang sebenarnya. Terlihat dari adanya tulisan yang berasal dari seorang patih Tulung Agung tertanggal 27 Desember 1890<sup>24</sup>, serta tulisan Raden Mas Adipati Arya Hadi Ningrat seorang bupati Demak yang tidak menyetujui jika jabatan yang tinggi dalam pemerintahan dipegang oleh orang yang bukan golongan bangsa-

wan. Hal ini dirasakan bertentangan dengan adat<sup>25</sup>, tetapi jika kita melihat serangkaian tindakan para bekas murid sekolah guru ini nantinya pada masa pergerakan nasional dan revolusi kemerdekaan ternyata di antara mereka ada yang telah dapat dinyatakan sebagai pemimpin gerakan kebangsaan<sup>26</sup>. Sudah pasti dari gambaran ini menunjukkan adanya suatu tingkat mobilitas vertikal dalam diri mereka bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan suatu sarana terbuka pada waktu itu untuk mendapatkan kepastian antara "harapan dan kecemasan"<sup>27</sup> dalam perjuangan kehidupan, karena itu dapat dimengerti bahwa kenyataan semacam ini menunjukkan pada kita jika dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Pergeseran telah terjadi semenjak nilai-nilai pendidikan berkembang dalam dasawarsa 20an awal abad ini. Perpindahan semacam ini pada dasarnya menunjukkan juga berubahnya orientasi masyarakat atas nilai-nilai yang ada. *Ascribed Status* berubah ke arah *Achieved Status* dan merupakan mobilitas sosial semenjak bertambahnya golongan "priyayi" baru pada awal abad ke-20. Masalahnya sekarang bagi kita apakah mobilitas sosial di sini juga diikuti oleh naiknya tingkat ekonomi mereka?

Gambaran di atas untuk Kota Yogyakarta akan dapat kita berikan dengan melihat sekitar tahun 40-an dari tulisan-tulisan yang ada<sup>28</sup> yang mengkhususkan atas perekonomian rakyat.

Studi mobilitas sosial menunjukkan perubahan status sosial seseorang, dengan pengertian bahwa setiap orang menginginkan kenaikan dalam *Social Climbing* mereka. Semua itu merupakan bentuk dari kehidupan modern yang sangat karakteristik yang mana bagi seorang tidak menghendaki kehidupan seperti masa lalunya.<sup>29</sup> Menurut Melvin M. Tumin<sup>30</sup>, problem untuk pembicaraan mobilitas sosial dapat terangkum dalam bidang ekonomi, pendidikan atau prestise dari jabatan yang memperbandingkan antarkehidupan ayah dengan anak atau individu terhadap grup pada suatu saat dengan beberapa individu dalam waktu yang berlainan. Masih banyak hal yang berkaitan misalnya faktor dari pekerjaan, pendapatan, buruh dan

majikan dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Jarak mobilitas sosial dinyatakan sebagai kemampuan yang berbeda dari satu pekerjaan antara ayah dan anak yang tanpa ada hubungan dengan nilai mobilitas itu dan merupakan faktor yang terserap dari perpindahan gerakan pekerjaan itu<sup>31</sup>.

Untuk Kota Yogyakarta periode sekitar awal abad ke-20an rupanya akan memperlihatkan kepada kita bahwa fakta-fakta yang tersedia tidak harus menunjukkan "kepastian yang tepat" karena jenis pekerjaan individu sebagai ayah sulit dinyatakan akibatnya untuk jenis pekerjaan bagi golongan bawah lebih ditunjukkan dengan posisi sosial mereka dalam masyarakat sebagaimana yang terlihat di "kota benteng" ini dengan sebutan *ngindong, magersari, tlosor*<sup>32</sup>.

Suatu studi kasus atas keluarga per keluarga untuk melihat hal semacam ini akan lebih mudah bagi kita jika melihat kepada rumpun keluarga atau yang dalam bahasa Jawa disebut *trah*<sup>33</sup>. Dari gambaran *trah* dengan tiga keturunan ke atas maupun ke bawah sifat-sifat mobilitas sosial individu dapat terpahami sebagaimana yang diinginkan. Masalahnya kini bagaimanakah memilih *trah* keluarga yang akan ditulis? Secara emosional dapat kita katakan bahwa pemilihan itu ditentukan oleh faktor-faktor tertentu dengan daya tarik tertentu atas objek materialnya. *Lovejoy*, menyebut sebagai faktor *interestingness*<sup>34</sup>. Untuk etnik Cina sebenarnya juga memperhatikan daya tarik yang tidak kalah pentingnya bahwa seorang keturunan etnik ini, *Setjodiningrat*<sup>35</sup>, pernah memperoleh jabatan yang tinggi di Keraton Yogyakarta. Apakah yang layak dan pantas diberikan kepada ahli warisnya, kata mobilitas vertikal atau horizontal? Dinyatakan atau tidak, mereka merupakan generasi pewaris daerah pemukiman yang bernama *Secodining-ratan*.

Kemampuan individu untuk mengubah posisi pekerjaan ternyata melahirkan gambaran yang begitu menarik. Kemampuan individu dan berubahnya jenis pekerjaan ternyata memiliki korelasi yang dominan dari apa yang kami sebut sebagai

mobilitas yang vertikal<sup>36</sup>. Perubahan itu ternyata menunjukkan juga bahwa apa yang disebut *ascribed status* mengalami pergeseran<sup>37</sup> saat perangkat "moderen" menyentuh sendi-sendi kehidupan sebuah masyarakat. Meski dalam gambaran senyatanya, tembok benteng keraton merupakan pemisah, pemukiman etnik Jawa tertentu dengan Cina, Arab atau Eropa, ternyata untuk posisi tertentu terbuka kesempatan bagi mereka yang ingin menjadi abdi dalem keraton.

Bagaimanakah kondisi perubahan masyarakatnya semenjak munculnya organisasi-organisasi "politik" semacam Boedi Oetomo atau Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan yang lain? Secara hipotetis, aspirasi perubahan dan kemajemukan warganya atas etnik, jenis pekerjaan semakin meningkat, dengan melihat banyaknya kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang ditimbulkan oleh para warga organisasi masing-masing itu. Bukanlah semua ini pada akhirnya membentuk hubungan seperasaan atas dasar ikatan organisasi? Bukankah hal-hal yang mereka lakukan itu akhirnya dapat dinilai sebagai terciptanya mobilitas sosial kota atas kegiatan para warganya?

Dengan melihat gambaran di atas, sebenarnya Kota Yogyakarta pada masa itu memiliki jaringan sosial bagi warganya baik secara tersembunyi atau tidak yang kesemuanya itu akan muncul pada saat interaksi sosial berlangsung.<sup>38</sup>

Tlepas dari jumlah pertanyaan yang dikemukakan dan jawaban-jawaban yang diharapkan dapat muncul, mobilitas sosial dalam masyarakat melibatkan penduduk dengan berubahnya ekologi setempat yang merangsang hubungan para warganya dalam kehidupan mereka. Semua sektor yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, politik dan kultural berperan dalam mendorong terjadinya mobilitas sosial itu. Pendekatan historis sebagaimana yang telah kami kemukakan di bagian depan dengan dibantu oleh ilmu sosiologi serta antropologi sosial, dianggap penting agar dengan hal semacam ini terlihat segi-segi struktural masyarakat kota dan bagaimana terjadinya mobilitas sosial atas peranan golongan yang hidup dalam masyarakat dapat terlihat dengan jelas.

Dipergunakannya ilmu bantu sosiologi dalam analisis bertujuan untuk melihat interrelasi antarkelompok masyarakat, dan ilmu antropologi sosial untuk analisis kultural yang menetralkan hubungan antarstatus yang ada dalam masyarakat.

Untuk memberikan gambaran atas permasalahan, maka uraian dalam penulisan ini akan disusun bab demi bab. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran yang karakteristik sejarah, yakni menunjuk suatu kontinuitas perkembangan kejadian yang berurutan agar berbagai perubahan sosial di dalamnya menunjukkan aspek-aspek mobilitas sosial yang dapat dipahami baik secara vertikal maupun horizontal. Misalnya, bagaimana kita akan dapat memahami sekolah-sekolah yang didirikan oleh Missi tanpa pemahaman atas perkembangan gereja di Jawa Tengah pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ?

Penulisan ini dimulai dengan menyusun suatu uraian yang diberi judul pendahuluan. Dalam pendahuluan ini diuraikan tentang alasan atau tujuan penulisan, pendekatan terhadap persoalan penggarapan dan landasan teoritis yang dipergunakan. Bab I merupakan gambaran umum atas keadaan Kota Yogyakarta serta perkembangan geografis wilayah, penduduk dan sistem pemerintahan pada suatu kurun masa tertentu. Bab II mencoba melihat proses mobilitas sosial masyarakat Kota Yogyakarta melalui kontak peradaban dengan kebudayaan barat yang diwakili oleh gereja melalui petugas lapangan dan balai-balai kesehatan yang didirikan untuk masyarakat. Bab III akan menguraikan mobilitas sosial itu sendiri, saat pendidikan menyerang ke dalam kubu pertahanan kaum feodal dengan mengambil kasus di keluarga Pakualaman. Bersama ini juga digambarkan sekolah-sekolah yang ada dan pernah diakui sebagai sarana mobilitas sosial masyarakat. Bab IV yang merupakan kesimpulan akan memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang pernah terlontar dalam bab-bab terdahulu sehingga bab ini merupakan suatu gambaran sebenarnya bagaimana dan apa yang disebut sebagai mobilitas sosial dalam tulisan ini secara keseluruhan.

## CATATAN

1. Perjanjian ini berakibat terpecahnya Kerajaan Mataram menjadi dua bagian, yakni : Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta.
2. Lihat, *Buku Kenang-Kenangan Peringatan 200 Tahun Kota Yogyakarta 1756—1956* (Jogjakarta : 1956), halaman 16; Candrasengkala Memet untuk memperingati berdirinya Keraton Yogyakarta ditunjukkan melalui simbol naga yang berbunyi Dwi Naga Rasa Tunggal dan Dwi Naga Rasa Wani.
3. *Penelitian Awal Tata Kota Jogjakarta* (Jogjakarta : Simposium Perentjanaan Kota Jogyakarta : Arsitektur UGM & PUTL, 1971), Jilid I & II, halaman 1 & peta no. : 1.
4. Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota : Pusparagam Sosiologi Kota* (Bandung : Penerbit Alumni, 1978), halaman 48 dan 108.
5. *Benteng Vredeburg*, jilid II (Yogyakarta : Lembaga Studi Kawasan dan Pedesaan UGM, 1978), halaman 153.
6. Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terjemahan Kusumanto (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1981).



7. Lihat, FA. Sutjipto, "Beberapa Tjataan tentang Pasar Pasar di Djawa Tengah abad 17-18" dalam *Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM*, No : 3, 1970, halaman 141; lihat juga Buku Kenang-Kenangan Peringatan 200 Tahun Kota Yogyakarta 1756-1956, *op cit*, hlm. 69
8. Wawancara dengan Soeprapto, bekas Kepala Stasiun Lempuyanan tahun 1936-1942, 24 Juni 1983.
9. Wawancara dengan KRT. Soemodiningrat, 30 Juni 1983.
10. C.F. Winter Sr, *Kawi Javaansch Woordenboek*, Z.P. 1928.
11. W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition* (Bandung Sumur Bandung, 1956), khususnya bab II.
12. Benteng Vredeburg . . . . . *op cit*, hlm. 153.
13. P.J.F. Louw, *De Derde Javaansche Successie Oorlog. 1746-1755* (Batavia : Alrecht & Rusche, 1889).; G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", *Overdruk Uit Adatrechtbundel*, XXXIV, Serie D no. 81, 1931.
14. B.Schrieke, *Indonesian Sociological Studies, Part II : Ruler and Realm in Early Java* (Brussel : A. Manteau, 1959).; M.C. Ricklefs, *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi, 1749 - 1792* (London : Oxpord University Press, 1974).
15. Kiai Yasadipura I, *Babad Gijanti* (Betawi Centrum : Bale Poestaka, 1937-1939), jilid I-XXI, Tumenggung Ronggo Prawirosetiko, *Babad Kraton Kartosuro sampai dengan Babad Perdjandjian Gijanti* (Jogjakarta : Museum Kraton Jogjakarta, t.t.).
16. Sartono Kartodirdjo, "Modernisasi dalam Perspektif Sejarah", dalam *Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM*, no. 5 tahun 1977, hlm. 134.
- 17 Kai T. Erikson, "Sociology and the Historical Perspektive" dalam Michael Drake (ed), *Applied Historical Studies; An Introductory Reader* (London : Methuem & Co Ltd.,

- 1973), hlm. 13\_30. : C. Owen *Social Stratification* (London : routledge & Kegan Paul, 1968) halaman 33.
18. Robert R. Jay, *Javanese Villagers* (Gambridge : The MIT Press, 1969), hlm. 12\_20.
  19. Daldjoeni, *op cit.*, halaman 48.
  20. M.P.M. Muskens Pr, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, jilid IV (Ende Flores : Percetakan Arnlodus, 1973), halaman 230; James L Peacock, *Purifying the Faith : The Muhamadiyah Movement Indonesia Islam* (Philipina : The Benjamin/Cummings Publishing Company, 1978), halaman 53.
  21. Daldjoeni, *op.cit.*, halaman 17.
  22. Lihat, *Tri Warsa: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jogjakarta* (Jogjakarta : 1953), hlm. 421.
  23. Ph. Kleintjes, *Het Staatsrecht Van Nerdelandsch Indie* (Amsterdam: J.H. De Bussy, 1912), hlm. 421.
  24. Partowidjojo, "Nota. Hal. Pengadjaran (Schola) Djawa" dalam *Tijdschrift voor het Binnendlandsch Bestuur*, deel 5, 1891, hlm. 366.
  25. Hadi Ningrat, "De achteruitgang van het prestige der Inlandsche Hoofden en de middelen om daarin verbetering terbergen" dalam *Ttjdschift voor het Binnenlandsch Bestuur*, deel 17., 1899, hlm. 377.
  26. Kasus ini terjadi pada Djuwardi, lihat. Ryadi Goenawan "Jagoan dalam Revolusi", *Prisma, Agustus, 1981, hlm. 46—50* : B.R. O.G. Anderson, *Java in a Time of Revolution; Occupation and Resistance, 1944 — 1946* (Ithaca : Cornell University Press 1972, hlm. 354 — 362 \* 8
  27. Soedjito Sosrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa: Suatu analisa* (Jogjakarta : Penerbit Karja, 1968), Jilid I, hlm. 19.
  28. Lihat beberapa nomor dari "Middenstand" dalam *Perekonomian Rakyat*, dari bulan Maret hingga Mei tahun 1940;

- Lihat Teko Soewodwirjo, "Kaoem Tengahan Priboemi", dan *Volksalmanak Djawi 1941* (Batavia : Balai Poestaka, 1941), hlm. 139.
29. Ioan Davies, *Social Mobility and Political Change* (London: Pall Mall Press Ltd, 1970), hlm. 12.
  30. Melvin M. Tumin, *Social Straification : the Forms and Functions of Inequality* (New Delhi : Prentice Hall, 1969), hlm. 88 - 91.
  30. Ibid, hlm. 90
  32. Koentjaraningrat, "Tjelapar : A Village in South Central Java", dalam *Villages in Indonesia* (Ithaca : Cornell University Press, 1967), hlm. 226-270.
  33. Sjafri Sairin, *Javanese Trah : A Preliminary Description of a Type of Javanese Social Organization*, thesis Unpublished ANU, 1980, hlm 37.
  34. Arthur O. Lovejoy, "Present Standpoints and Past History" dalam Hans Meyerhoff (ed.), *The Philosophy of History n Our Time* (New York : Doubleday & Company, Inc, 1959), hlm. 175.
  35. Wawancara dengan KRT. Puspaningrat, sebagai Ketua Seksi Sejarah Pusat Paguyuban Trah Hamengkubuwono I), pada 2 Juli 1983.
  36. Michael Drake, *op.cit.*, hlm. 233 - 249.
  37. Untuk hal semacam ini lihat kasus daerah Timur Tengah, dalam Daniel Lenner, *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, terjemahan (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1983). hlm. 06-90.
  38. Fredrik Barth (ed.). *Ethnic Groups and Boundaries* (Boston: Little, Brown and Company, 1969), hlm. 9 - 37.

## BAB I

### GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

Isi bab ini memberikan gambaran umum atas Kota Yogyakarta yang menyangkut masalah mobilitas geografis, pertumbuhan penduduk, sejarah singkat pemerintah pada masa Belanda, Jepang, Republik. Telah disinggung dalam pendahuluan, bahwa berdirinya "kota benteng" Keraton Yogyakarta dilambangkan dalam gambar dua ekor naga yang ekornya saling melilit, yang menunjuk kepada tahun berdirinya kota benteng ini yakni 1682 tahun Jawa atau 1756 Masehi. Semenjak berdirinya kota benteng ini dan mengalami perkembangan atas luas wilayahnya, ternyata juga banyak peristiwa baik yang besar maupun yang kecil terjadi dalam sejarahnya. Lintasan berbagai peristiwa itu secara garis besar dapat disebutkan sebagai berikut<sup>1</sup> :

- (1) Berdirinya Kadipaten Pakualaman pada tahun 1813,
- (2) Pecahnya perang Diponegoro tahun 1825 - 1830,
- (3) Kongres I Boedi Oetomo pada tahun 1908 di Yogyakarta,
- (4) Berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912,
- (5) Berdirinya Taman Siswo pada tahun 1922,

- (6) Kongres Wanita I seIndonesia pada tahun 1928 di Yogyakarta, dan
- (7) Pada awal kemerdekaan sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia.

Di bidang pendidikan, ternyata Kota Yogyakarta semenjak dahulu hingga sekarang merupakan tempat yang paling tepat, sehingga kini kota ini memperoleh julukan kota pelajar. Beberapa sekolah itu antara lain Tamanan, *Kweekschool*, *Thechnische School*, AMS A, dan Universitas Gadjah Mada yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri Indonesia. Banyaknya prasarana pendidikan itu menjadikan suburnya benih-benih pergerakan nasional, dan Kota Yogyakarta merupakan salah satu pusat gerakan perjuangan bangsa Indonesia di samping Kota Bandung dan Jakarta.

Berbagai kongres atau kegiatan pergerakan nasional yang pernah diselenggarakan di kota ini adalah Kongres *Jong Java*, Kongres Serikat Islam, Kongres Boedi Oetomo, Kongres Indonesia Muda, Kongres Taman Siswo, Kongres Wanita serta Kongres Muhammadiyah, memberikan warna-warna tersendiri bagi kota Yogyakarta dalam perjalanan sejarahnya, karena itu tidak dapat diingkari jika dari hal yang telah berlangsung di kota ini khususnya yang berhubungan dengan perubahan sosial, mobilitas sosial dipengaruhi oleh pendidikan. Ternyata pendidikan yang dikenyam masyarakat kota ini merupakan motor penggerak perubahan sosial, khususnya melalui tindakan penguasanya yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, pada 5 September 1945<sup>2</sup> bersama dengan Pakualam VIII menyatakan kekhuasannya mulai saat itu masuk dalam wilayah Republik Indonesia, pada dasarnya sikap-sikap politik yang dimiliki oleh para penguasa wilayahnya membuahkan suatu konsolidasi kekuatan politik nasional.<sup>3</sup>

Tindakan perubahan ternyata berlanjut dalam tubuh keraton/kesultanan terhadap berbagai macam upacara yang semula ada semacam *pisowan gerebeg*, *baik gerebeg maulud* atau *gerebeg bakda pasa* serta *gerebeg besar*. Perubahan ini membawa

akibat juga dalam masyarakat atas mitos yang selama ini sulit dihilangkan bahwa sultan merupakan pimpinan satu-satunya bagi masyarakat Kota Yogyakarta. Peniadaan berbagai bentuk kegiatan ritual semacam *pisowanan malem selikuran*, *tingalan ndalem tahunan* baik yang disebut *wiyosan ndalem* atau *jume-nengan ndalem* ternyata sebenarnya ikut memainkan peranan longgarnya ikatan *trah ndalem*. Bagi para abdi dalem, pakaian dalam upacara *pisowanan* juga diubah, dalam *pisowanan* harian mereka cukup memakai pakaian yang disebut *pranakan*, sedangkan dalam pisowanan khususnya cukup memakai *atela* atau yang biasa disebut *beskap putih*.

Salah satu peristiwa yang cukup penting menjelang kemerdekaan, tepatnya 1 Agustus 1945, adalah diberhentikannya KPH Danurejo VIII dari jabatan pepatih dalem<sup>4</sup>. Sejak saat itu terjadi perubahan yang fundamental dalam proses sejarah birokrasi pemerintahan kesultanan sejak awal berdirinya di tahun 1756.

### 1.1 Keadaan Wilayah Geografis

Kota Yogyakarta secara astronomi terletak kurang-lebih antara  $110^{\circ} 23' 79''$  –  $110^{\circ} 28' 53''$  Bujur Timur dan terletak lebih kurang  $7^{\circ} 49' 26''$  –  $7^{\circ} 50' 84''$  Lintang Selatan<sup>5</sup>. Kota Yogyakarta dilalui oleh garis paralel  $8^{\circ} 18' 4,93''$  Lintang Selatan dan garis meridian  $110^{\circ} 51' 50,87''$  Bujur Timur, di samping itu juga dilalui oleh tiga buah sungai yakni Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code yang mengalir di bagian tengah kota, dan Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota.

Bentuk peta Kota Yogyakarta yang mirip belah ketupat<sup>6</sup> ternyata paralel dengan aliran ketiga sungai tersebut dan hal ini ternyata berpengaruh terhadap pola jalur jalan raya yang ada. Beragai jalur jalan yang ada paralel saling tegak lurus antara yang satu dengan yang lain dan kesemuanya ini ternyata berpengaruh terhadap pola pemukiman masyarakat di Kota Yogyakarta.<sup>7</sup>

Secara tofografis Kota Yogyakarta yang terletak di zone tengah ini jarang terkena musibah banjir karena tanahnya terdiri atas pasir. Di Kota Yogyakarta, air bagi penduduk pada umumnya didapatkan dengan dua jalan yakni melalui air yang dihasilkan oleh dinas perusahaan air minum serta berbagai sumber air yang diusahakan penduduk yang berupa sumur. Kedalaman sumur hingga sumber mata air yang dibuat penduduk rata-rata berkisar antara 10 hingga 15 meter di bawah permukaan tanah. Curah hujan di Kota Yogyakarta pertahun sebesar 2000 mm hingga 2500 mm dengan perbandingan untuk bulan-bulan yang kering dan yang basah sebesar 33,3% dan 60%. Meskipun curah hujan dianggap cukup besar, tetapi karena kota ini berpasir maka akan selalu mudah terserap ke bawah tanah.

Secara administratif Kota Yogyakarta yang merupakan pusat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 14 kecamatan dengan 163 rukun kampung<sup>9</sup>. Kota ini merupakan kota penghubung ke arah barat dengan Kota Purworejo, kota yang terletak di daerah Provinsi Jawa Tengah, ke arah timur dengan Kota Solo juga termasuk Propinsi Jawa Tengah, ke arah utara Kota Yogyakarta dengan Kota Magelang yang juga masuk dalam Provinsi Jawa Tengah.

Batas-batas wilayah administratif pemerintahan Daerah Kotamadya Yogyakarta menurut peta wilayah adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman<sup>10</sup>.

### 1.1.1 Mobilitas Geografis

Pertanyaan awal yang muncul untuk mengetahui mobilitas geografis di Kota Yogyakarta adalah, secara fungsional kota ini digolongkan sebagai apa? Kota ini berfungsi sebagai kota pelajar yang berarti melihat perkembangan kota semenjak adanya sekolah-sekolah tertentu di wilayah ini atau sebagai

kota pemerintahan yang bercorak politik yang harus melihat kota ini pada awal berdirinya. Secara historis pertanyaan di atas mungkin akan lebih tepat jika dimasukkan dalam pengertian kota pemerintahan, karena dengan demikian akan dapat diketahui perkembangan luas wilayah kota ini yang biasa disebut sebagai kota kuna atau kota berbenteng.

Melihat data yang tersedia dari sumber-sumber perkembangan kota, secara garis besar dapat dikatakan bahwa awal kota yang hanya seluas 9,7 kolometer persegi pada tahun 1756, telah menjadi seluas 13,5 kometer persegi pada tahun 1824<sup>1 1</sup>. Bukankah dari gambaran ini senyatanya mobilitas geografis kota Yogyakarta relatif kecil jika ingin kita bandingkan dengan data-data yang ada semenjak tahun 1950an? Menurut undang-undang tentang pembentukan *hamminte* Kota Yogyakarta pasal 1, batas-batas wilayah Kabupaten Yogyakarta ditetapkan dengan surat ketetapan Pemerintah Hindia Belanda 24 Juli 1923 nomor 30<sup>1 2</sup>.

Menurut dokumen-dokumen yang ada dalam perpustakaan keraton, batas ibukota Yogyakarta di sebelah utara terletak Kampung Jetis hingga Sagan dan Samirono, sebelah timur dari Kampung Samirono hingga Kampung Lowana, sebelah selatan dimulai dari Kampung Lowano hingga Kampung Bugisan, dan sebelah barat dari Kampung Bugisan sampai Kampung Tegalrejo.<sup>1 3</sup>

Dari batas-batas kampung tersebut dapat diketahui kecamatan-kecamatan yang ada dalam Kotamadya Yogyakarta yaitu: Kecamatan Jetis, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Paulalaman, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Umbulharjo, dan Kecamatan Kotagede.

Pembangunan Kota Yogyakarta yang bersamaan dengan istana ternyata memekarkan diri ke arah utara berupa Benteng Kompeni, pasar, tempat tinggal residen, tempat tinggal patih,



dan kampung-kampung yang mengelilingi istana sebagai tempat tinggal kaum bangsawan dan pegawai istana. Perkampungan orang Cina, perkampungan orang Belanda, dan perkampungan orang-orang Arab terletak di luar tembok benteng keraton. Bentuk dan keadaan Kota Yogyakarta pada awalnya sulit diketahui. Jika keterangan tentang kota ini ada, biasanya keterangan-keterangan itu berdasarkan apa yang tertera di peta yang dibuat pada tahun 1830<sup>1 4</sup>

Inti Kota Yogyakarta adalah istana yang dikelilingi benteng berparit. Daerah ini biasanya disebut sebagai *Jeron Benteng* yang terbagi atas daerah-daerah seperti Alun-alun Utara, *Teratag Pagelaran*, *Shitinggil Kemandungan*, *Kedaton*, *Magangan*, *Kemandungan Kidul*, *Shitinggil Kidul*, dan *Alun-alun Kidul*. Menurut catatan yang ada, benteng berparit yang mengelilingi kompleks istana dan kampung-kampung di sekitar istana sebagai tempat tinggal kaum bangsawan dan kerabat raja serta hambahamba istana dibangun pada tahun 1778<sup>1 5</sup>.

Benteng berparit ini berbentuk persegi empat dengan luas keseluruhan kurang lebih lima kilometer. Temboknya terdiri atas dua lapisan yakni tembok luar dan tembok dalam dengan tebal masing-masing setengah meter. Ruang antara tembok luar dan tembok dalam diisi tanah sehingga tebal keseluruhan tembok mencapai empat meter. Tinggi tembok luar kurang-lebih tiga setengah kilometer, sedangkan tinggi tembok bagian dalam dua meter. Di keempat sudut benteng dibuat tempat pengintaian dan benteng itu sendiri memiliki lima pintu gerbang yang disebut plengkung. Masing-masing nama plengkung itu adalah Plengkung Jagasura, Plengkung Jayabaya, Plengkung Nirbaya, Plengkung Madyasura, dan Plengkung Tarunasura.<sup>1 6</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa di dalam benteng juga terdapat pemukiman golongan bangsawan yang merupakan kerabat keraton dan para *abdi dalem*. Mereka pada umumnya berada dalam kampung-kampung di luar kompleks istana dengan masing-masing tugas tersendiri seperti Kampung Siliran yang merupakan tempat tinggal hamba silir yang bertu-

gas mengurus lampu-lampu istana: Kampung Gamelan adalah kampung tempat tinggal yang bertugas memelihara kuda istana, Kampung Pesindenan yang merupakan kampung para wiraswara istana, Kampung Langenastran dan Kampung Langenarjan yang merupakan kampung prajurit pengawal istana, Kampung Patehan yang merupakan tempat tinggal mereka yang bertugas mengurus minuman, Kampung Nagan yang merupakan tempat tinggal para pemukul gamelan, serta Kampung Suronatan yang merupakan tempat tinggal golongan ulama istana.<sup>17</sup>

Keterangan terhadap pemukiman masyarakat "Jeron Benteng". sebenarnya merupakan kelompok inti pemukiman bagi Kota Yogyakarta. Di luar dari daerah benteng masih berupa tanah persawahan, ladang dan pemukiman rakyat jelata. Di sekitar benteng Kompeni, pasar dan istana kepatihan sebelah utara dari keraton merupakan pemukiman penduduk yang paling padat. Kampung-kampung yang tumbuh di luar benteng yang pada awalnya merupakan tempat pemukiman hamba istana dan tidak melayani tumah tangga istana sehari-hari merupakan kelompok seprofesi dalam bidang pemerintahan, militer, pertukangan, perajin, serta golongan bangsawan yang memimpinya. Nama-nama kampung itu adalah Kampung Pajeksan yang merupakan tempat kediaman para *jaksa*, Kampung Gandekan yang merupakan tempat tinggal pesuruh istana atau *gandek*, Kampung Dagen sebagai tempat kediaman tukang kayu atau undagi, Kampung Jlagran sebagai tempat perajin penata batu atau *jlagra*, Kampung Gowangan sebagai tempat tinggal para tukang kayu ahli bangunan atau *gowong*, Kampung Menduran merupakan kediaman orang-orang Madura, Kampung Wirobrajan, Patangpuluhan, Daengan, Jogokaryan, Prawirotaman, Ketanggungan, Mantrijeron, Nyutran serta Sukokarsan dan Bugisan merupakan tempat tinggal para pasukan istana semenjak keraton ini dibangun oleh Sri Sultan Hemengkubuwono II<sup>18</sup>.

Kampung Mergangsan merupakan tempat tinggal para tukang kayu bangunan atau *mergongso*. Kampung Keparakan

merupakan kampung tempat tinggal pelayan istana. Kampung Gerjen merupakan tempat tinggal tukang jahit atau *gerji*. Kampung Kauman merupakan tempat tinggal kaum ulama istana. Kampung Gedong Tengen adalah kampung hamba istana yang mengurus kepentingan bagian luar istana, sedangkan Kampung Gedong Kiwo merupakan tempat tinggal para hamba yang mengurus harta istana. Di samping nama-nama kampung dari para hamba istana ini ada juga kampung yang merupakan tempat tinggal bangsawan di luar istana seperti Kampung Timuran, Ngabean, Pugeran, Notoprajan, Notojudan dan lain-lain.

Di sektor benteng Kompeni dan pasar tumbuh pemukiman orang-orang Eropa dan sekitar pasar tumbuh pemukiman orang-orang Cina. Tentang pemukiman orang-orang Eropa di luar benteng kemungkinan dilakukan sejak adanya kaum bangsawan istana yang menyewakan tanah jabatan mereka. Golongan Eropa ini biasanya mengusahakan perkebunan dan mereka merupakan golongan pensiunan Kompeni. Beberapa nama orang-orang Eropa yang terkemuka pada waktu itu dan tercatat sebagai pengusaha adalah Andries Klaring, John Jansen, Pieter Wieseman, Baumgarten, de Cevelaire, J. Raaf Wendeling, Emmen, Schalk Weijnschenk, Dom, dan lain-lain. Mereka merupakan penduduk golongan tertua dari bangsa Eropa yang bermukim di Kota Yogyakarta. Perkampungan orang-orang Eropa yang pertama terletak di timur benteng Kompeni yang disebut sebagai Kampung Loji Kecil di samping golongan Eropa yang berdiam di Loji Besar. Kelak golongan Eropa ini meluaskan pemukiman mereka ke bagian timur Sungai Code dan kampung itu sekarang bernama Bintaran.<sup>19</sup> Awal abad ke-20 orang-orang Eropa membuka daerah pemukiman baru di bagian utara kota dan kampung ini disebut Kotabaru.<sup>20</sup>

Mobilitas geografis Kota Yogyakarta menurut hasil penelitian sementara kami ternyata dilakukan oleh golongan masyarakat Cina. Pemukiman orang-orang Cina yang ada di sekitar Pasar Beringharjo, sebenarnya menunjuk hubungan kehidupan

ekonomi antarpasar dan masyarakat Cina itu tidak dapat dilepaskan. Hal ini dikarenakan mata pencaharian golongan Cina pada waktu itu sebagai pedagang, pemungut cukai, pemilik rumah-rumah candu. Hal semacam ini merupakan suatu kenyataan yang sering ditemukan dari berbagai arsip kolonial, cukai pasar digadaikan kepada orang-orang Cina kaya yang mampu membayar sekaligus untuk waktu satu tahun atau lebih. Pengertian fiskal yang berarti pajak merupakan pengertian yang sama atas nama Kampung Beskalan yang terletak dalam lingkungan dengan Pecinan dan Ketandan. Tugas orang-orang Cina yang selalu berkaitan dengan ekonomi masyarakat berakibat juga meluaskan pemukiman Cina ke bagian utara kota yakni daerah Kranggan. Hal ini sejalan dengan munculnya jaringan transportasi kereta api antara Yogyakarta dan kota pelabuhan Semarang pada tahun 1872.

Di luar golongan Eropa dan Cina, orang-orang Arab berdiam di kampung yang bernama Sayidan. Mereka biasanya mempunyai posisi di bawah golongan Eropa dan Cina tetapi dalam bidang ekonomi mereka memegang peranan dalam dunia cukai.

Perkembangan Yogyakarta terutama sesudah tahun 1870 sangat pesat karena munculnya pabrik pabrik gula di sebelah selatan dan barat kota khususnya yang dimiliki oleh orang-orang Belanda<sup>2 1</sup>. Ada 17 pabrik gula pada dekade tahun tersebut yang hidup di daerah Yogyakarta. Mengingat perlunya transportasi ekonomi untuk pabrik pabrik gula ini akhirnya dibukalah jalur kereta api yang dilakukan oleh NIS (*Nederlandsch Indische Spoorwegmaatschappij*) yang secara resmi dibuka pada 2 Maret 1872.<sup>22</sup> Stasiun pertama yang dibangun oleh NIS di Kota Yogyakarta terletak di Lempuyangan. Akibatnya di sekitar daerah ini tumbuh pemukiman-pemukiman baru dari berbagai golongan masyarakat yang ada di Kota Yogyakarta yang kesemuanya pada dasarnya ikut memberikan andil dalam perkembangan geografis wilayah Kota Yogyakarta. Pada 12 Mei 1887 dibuka sebuah jalur kereta api yang diselenggarakan oleh pemerintah yang biasa disebut SS (*Staats Spoorwegen*), dengan

stasiunnya di sebelah selatan Tunggu<sup>2 3</sup>. Perkembangan jalur kereta api dalam kota di bagian selatan, untuk para pedagang kecil dari Pasar Beringharjo. NIS membangun stasiun kecil di Ngabean. Akhirnya secara berturut-turut NIS membuka jaringan transportasi kereta api ke arah utara dan timur, berakibat juga perluasan pemukiman penduduk yang diwakili oleh orang-orang Cina seperti yang terjadi atas daerah Kranggan. Jika untuk daerah bagian utara kota perkembangan wilayah geografis diakibatkan oleh jaringan transportasi kereta api, maka untuk bagian timur kota, perkembangan wilayah geografis karena pemukiman penduduk akibat adanya *NV Constructie Atelier de Vorstenlanden* (CAV) yang berdiri pada 30 November 1901 sebagai pabrik konstruksi bangunan dan segala bidang teknik serta usaha dagang yang berbentuk jual-beli barang-barang dari logam<sup>2 4</sup>. Perusahaan ini mampu menyerap tenaga sebanyak 450 orang tukang sedangkan pada tahun 1944 mampu mempekerjakan 2300 orang.

#### 1.1.2 Pertumbuhan Penduduk

Sebagai gambaran umum atas penduduk di Kota Yogyakarta selama 50 tahun yakni dari tahun 1900–1950, secara garis besar dapat dikemukakan bahwa etnis masyarakat yang berada di kota ini adalah sebagai berikut<sup>2 5</sup>.

- (a) Etnik Eropa yang terdiri atas bangsa Belanda, Jerman, Perancis dan Spanyol serta Portugal yang biasanya memiliki pekerjaan di bidang keamanan perkebunan, dan leveransir kebutuhan hidup masyarakat Eropa sekitar Loji Besar.
- (b) Etnik Tionghoa dan Arab yang dimasukkan dalam kelompok orang-orang timur asing dan biasanya memiliki pekerjaan sebagai pedagang atau bergerak dalam lapangan perekonomian lainnya seperti pemungut cukai pasar, jembatan, rumah gadai, serta rumah candu dan merupakan penghubung masyarakat Eropa untuk pemenuhan kebutuhan di Kota Yogyakarta.

- (c) Etnik Pribumi yang secara garis besar diwakili oleh raja dan para kawulanya yang terdiri atas orang Jawa, Madura, Bugis, Bali yang kesemuanya merupakan pasukan-pasukan istana dan telah memiliki hubungan yang cukup lama dengan masyarakat Jawa semenjak munculnya dinasti pedalaman yang menggantikan hegemoni dinasti pesisiran.

Pembagian atas golongan <sup>26</sup> masyarakat yang menempati ruang dan posisi tertentu atas jenis pekerjaannya di wilayah Kota Yogyakarta semenjak tahun 1900 -- 1940 adalah sebagai berikut <sup>37</sup>.

### KOMPOSISI GOLONGAN MASYARAKAT TAHUN 1900-1940

No	Golongan Masyarakat	Jenis Pekerjaan	Lokasi Tempat Tinggal
1.	Eropa yang terdai atas : Orang Belanda Jerman, Perancis serta keturunan Spanyol/Portugal	Keamanan, Perkebunan, administrasi/Keuangan	Loji Kecil dan Loji Besar, Kota-baru, Bintaran, dan Sagan
2.	Timur Asing yang terdiri atas : orang Cina dan Arab	Pedagang, Mandor, Penarik pajak	Pecianan, Sayidan, Kranggan, dan, Loji Kecil
3.	Melayu yang terdiri atas : Jawa, Madura Bugis, Bali, Lombok Sunda	Penguasa tradisional, kawulo alit	Dalam benteng keraton dan setiap wilayah kasultanan

Sumber : Catatan kaki no. 25

Data tentang jumlah penduduk di Kota Yogyakarta dari tahun 1900-1930 adalah sebagai berikut <sup>28</sup>. Pada tahun 1900

sebanyak 1.084.327 jiwa, tahun 1905 sebanyak 1.118.705 jiwa, tahun 1917 sebanyak 1.374.168 jiwa, tahun 1920 sebanyak 1.282.815 jiwa, dan tahun 1930 sebanyak 1.559.027 jiwa. Angka kenaikan penduduk dalam jiwa dari tahun 1900-1905 sebanyak 34.372 jiwa, dari tahun 1900-1917 sebanyak 255.463 jiwa, dari tahun 1917-1920 terjadi penurunan sebanyak 91.353 jiwa, sedangkan dari tahun 1920-1930 mengalami kenaikan sebanyak 276.212 jiwa. Secara total pertambahan penduduk di Kota Yogyakarta dari tahun 1900-1930 sebanyak 456.700 jiwa.

Menurut sebuah buku berbahasa Jawa yang terbit tahun 1923, data penduduk di luar benteng Keraton Yogyakarta adalah sebagai berikut.<sup>29</sup> Pada tahun 1923 sebanyak 1.123.024 jiwa, tahun 1925 sebanyak 1.124.562 jiwa, tahun 1928 sebanyak 1.427.815 jiwa, dan tahun 1930 sebanyak 1.320.442 jiwa.

Menurut data yang ada setelah sensus penduduk tahun 1930 klasifikasi golongan masyarakat untuk Kota Yogyakarta, yakni Indonesia (89,27%), Eropa dan keturunannya (4,09%), Cina (6,52%), dan lain-lain (1,12%).<sup>30</sup> Klasifikasi semacam di atas sebenarnya memang kurang rinci mengingat bahwa untuk golongan masyarakat Eropa yang ada di Kota Yogyakarta ada orang Jerman dan Perancis. Meski demikian, minimal data yang disebutkan di atas dapat memberikan gambaran secara umum atas golongan-golongan masyarakat di kota ini.<sup>31</sup>

Jika data tentang penduduk terasa kurang hal ini dikarenakan terbatasnya sumber yang dapat diperoleh serta dilangsungkannya sensus itu sendiri secara moderen baru pada tahun 1930 an. Sebelumnya, untuk kurun waktu abad ke-19 memang ada bentuk pencatatan penduduk, tetapi data yang dapat diperoleh masih merupakan kompilasi catatan secara lokal dari para pamong praja setempat. Demikianlah gambaran secara umum telah dicoba untuk melukiskan hal yang berkaitan dengan penduduk di Kota Yogyakarta selama 50 tahun dari tahun 1900 -- 1950.

## 1.2 Sejarah Pemerintahan Yogyakarta

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa daerah ini merupakan bekas kerajaan, karena itu sejarah singkat pemerintahan yang ada di sini akan dimulai semenjak hadirnya kekuasaan yang bernama Kesultanan Yogyakarta. Adapun gambaran secara singkat dimaksudkan agar para pembaca mudah mengerti bagaimana pemindahan bentuk-bentuk pemerintahan yang ada ini sejak awal perkembangannya hingga masuknya ke dalam pemerintahan Republik Indonesia dapat kita ikuti uraian berikut .

### 1.2.1 Masa Pemerintahan Kesultanan

Berdasarkan isi surat Perjanjian Gianti, sebenarnya pemerintahan kesultanan ini lebih merupakan sekutu Belanda atau *Oost Indische Compagnie* yang pada prinsipnya harus selalu membantu kegiatan pemerintah kolonial di daerah Jawa. Masa pemerintahan kesultanan pada prinsipnya susunan pemerintahan kesultanan pada waktu itu di bawah pimpinan kanjeng sultan dan dibantu oleh pepatih dalem (*rijksbestuurder*). Segala kebijaksanaan pemerintahan dibebankan di pundak pepatih dalem. Pembantu Sultan HB. I yang biasa disebut Pangeran Mangkubumi ialah Patih Danuredjo I yang sebelumnya menjabat bupati Banyumas dengan nama Raden Tumenggung Yudonegoro.<sup>32</sup>

Menurut beberapa catatan dari Hartiningsih dalam *Dag Register* dilukiskan bahwa pribadi Patih Danurejo I yang mendampingi sultan secara umum sebagai *keris* dan *warongko* yang bersatu memimpin pemerintahan Kesultanan Yogyakarta.

Secara garis besar susunan pemerintahan kesultanan di bawah pepatih dalem pertama adalah bupati patih kepatihan atau sekretaris satu, kedua, bupati pemerintah atau sekretaris dua; ketiga, bupati yang memerintah kebugatian-kebugatian di wilayah Kesultanan Yogyakarta keempat, di bawah bupati ada jabatan wedana yang secara administratif membawahi



kewedanaan-kewedanaan dan di bawah kewedanaan ada jabatan peneweu yang memimpin kepenewuan-kepenewuan dan akhirnya adalah lurah yang memimpin kelurahan.<sup>33</sup>

Semenjak Sultan Hamengkubowono I wafat begitu juga Papatih Dalem Danuredjo 1, pemerintahan kesultanan jatuh kepada keturunannya dan hanya beberapa tahun yakni pada awal abad ke-17, Kesultanan Yogyakarta harus membagi diri menjadi daerah pemerintahan Pakualaman dan kesultanan. Batas-batas daerah administratif keduanya ini hanya dibatasi oleh Sungai Code yang membedakan bagian sebelah barat sungai merupakan daerah kesultanan, sedangkan daerah timur sungai merupakan daerah milik Pakualaman. Susunan pemerintahan di Pakualaman adalah : Kanjeng Gusti Pakualam sebagai penguasa Kadipaten Pakualaman dibantu oleh bupati patih yang merangkap sebagai sekretaris dengan asisten wedana kota. Di bawahnya lagi ada pimpinan kebugiatan adikarto dan di bawah adikarto ada kepenewuan-kepenewuan, dan di bawah kapenewuan ada kelurahan-kelurahan.<sup>34</sup>

### 1.2.2 Zaman Jepang

Beberapa hal yang terjadi sebagai bentuk perubahan pada masa pemerintahan ini adalah dihilangkannya fungsi papatih dalem oleh Sultan Hamengkubuwono IX untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pada masa sebelumnya. Seperti telah diketahui posisi Kesultanan Yogyakarta yang diatur dalam politik kontrak pada masa pemerintahan Hindia Belanda, menguatkan kedudukan papatih dalem karena sebelum memangku jabatan papatih dalem ini harus bersumpah akan membantu Belanda jika terjadi konflik antarraja/sultan dan Belanda.

Begitu juga pada bulan April 1945 kewedanaan yang ada di lingkungan pemerintahan kesultanan dihapuskan, sedangkan di pusat dibentuk *Paniradyapati* yang beranggotakan enam orang. Keenam orang ini memimpin bagian kesekretariatan atau yang disebut sebagai *sanapanitra*, bidang pendidikan atau

*wiyotoprojo*, bagian perencanaan penerangan atau *pacana pancawarsa*, bagian jawatan pemerintahan umum disebut *ayahan umum*, dan bagian ekonomi serta yayasan umum. Susunan yang membantu sultan akibat kosongnya jabatan pepatih dalem disebut *utaradyapati* yang membawahi urusan pegawai, pemeriksa keuangan dan pengadilan daerah dalem atau *sridarmayukti*.<sup>35</sup>

### 1.2.3 Zaman Republik

Pernyataan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII pada 5 September 1945 menjadikan Kota Yogyakarta utuh tanpa pembagian daerah barat dan timur sungai. Menurut Maklumat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 tentang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikeluarkan pada 18 Mei 1946 sebenarnya berawal dari pokok peraturan maklumat Nomor 7 yang dikeluarkan 6 Desember 1945.

Kota Yogyakarta yang terdiri atas daerah kesultanan dan Pakualaman menjadi kotapraja yang bersifat otonom sejak keluarnya Undang-undang No. 17 tahun 1947.<sup>36</sup> Disebut juga sebagai *haminte* Kota Yogyakarta dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Penyerahan wewenang secara nyata dari Daerah Istimewa Yogyakarta baru dapat dilaksanakan dalam tahun 1951 karena terjadinya Agresi Belanda I dan Agresi Belanda II. Beberapa hal sebagai perubahan kota atas susunan pemerintahannya adalah sebagai berikut. Kota Yogyakarta menjadi kota yang otonom dengan hadirnya Dewan Perwakilan Rakyat Haminte Kota, Dewan Pemerintahan Kota dan Walikota<sup>37</sup>. Kotapraja Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Pokok No. 22 tahun 1948 ditetapkan sebagai daerah tingkat II yang menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>38</sup>

## CATATAN

1. Periksa buku-buku yang mencatat kejadian itu : P.J.F. Louw, *De Java Oorlog van 1825 tot 1830*. I, Batavia, 1984; *Babad Ngajogyakarta*, vol. I – III (Jogjakarta : Museum Sanabudaja, 1876); KRT. Mandojokusumo, *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat* (Yogyakarta, 1977).; *Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jogjakarta: Kementerian Penerangan, 1953).; *Peringatan Tri Pantja Warsa Kotapradja Jogjakarta 7 Djuni 1947 -- 7 Djuni 1962.*, *Kota Jogjakarta 200 tahun* (Jogjakarta : Panitia Peringatan *Kota Jogjakarta 200 tahun*, 1956).; James L. Peacock, *Perifiying the Faith : The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam* (Philippines : The Benyamin/Cummings Publishing Company 1978) .
2. Republik Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta . . . *op cit* halaman 36.
3. Lihat, Atmakusuma (penyunting), *Tahta untuk Rakyat* (Jakarta : Gramedia, 1982), halaman 301.; *Tri Warsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapradja Jogjakarta 29 Nopember 1950 -- 1953* (Jogyakarta : Panitia Penerbitan buku Tri Warsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jogjakarta, 1953), halaman 8.

4. KPH. Sudarisman Poerwokusumo, *Peranan Kota Yogyakarta Dalam Perjuangan* (Yogyakarta : Pusat Penelitian dan Studi Kebudayaan UGM, 1982). halaman 5.
5. *Penelitian Awal Tata Kota Yogyakarta*, jilid I (Yogyakarta: Fakultas Teknik Arsitektur UGM dan Dit. Tata Kota & Daerah DITDJEN Tjipta Karja, 1971), halaman 1.
6. *Ibid*
7. *Ibid*
8. *Laporan Tjurah Hudjan di Daerah Istimewa Jogjakarta* (Jogjakarta : Dinas Pertanian DIJ, 1965). halaman 1 -- 10.
9. Bandingkan antara buku : Bintarto *Geografi Kita* (Jogjakarta : Spring, 1969), yang menyatakan bahwa jumlah rukun kampung Kodya Yogyakarta berjumlah 163 dan Peringatan Tri Pantja Warsa . . . *op cit*, halaman 60.
10. *Monografi Kodja Jogjakarta*, 1968
11. Penelitian Awal Tata Kota Yogyakarta . . . *op cit*, halaman .
12. *Himpunan Peraturan-Peraturan dari Sedjarah Kota Yogyakarta* (Jogyakarta : Penerbit Karja-Pradja, 1952), halaman 118 120.
13. Kota Jogjakarta 200 tahun . . . *op cit.*, halaman 23.
14. *Gegevents Oven Djokjakarta*, 1925. halaman 99.
15. Bandingkan, *pertumbuhan Perkampungan di sekitar dalam Benteng dan Luar Benteng* (Jogjakarta : Seksi Kebudayaan PPK, 1953 ) dan *Peta Pendataan Letak Nama-nama Kampung di Jogjakarta* (Jogjakarta DPU, 1957).
16. Kelima plengkung ini sebenarnya merupakan gambaran dari kelima nama-nama pasaran yang ada : Pon. Wage. Kliwon, Legi, Pahing. Hal ini disangkutkutan dengan pembangunan masing-masing plengkung yang dimulai dari pasaran tersebut di atas. Lihat KRT. Soerjobroto *Tegese Plengkung lan Beteng ing Kraton Surokarto Hadiningrat lan Kraton Ngajogjakarta Hadiningrat* (Solo : Penerbit Soerjokoka, 1923). halaman 12 - - 37.

17. *Ibid.*, halaman 45.
18. Deskripsi tentang kampung-kampung yang berada di luar dan dalam benteng keraton baik yang menyangkut nama dan artinya, bandingkan, *Rencana Pelestarian dan Pengembangan Benteng Vredenburg* (Yogyakarta : LSPK UGM, t.t.), jilid II, halaman 149--189, dan Pertumbuhan Perkampungan di sekitar benteng dan di luar benteng . . . . op. cit., halaman 23.
19. Nama Bintara berasal dari seorang pangeran keraton yang bernama Pangeran Bintoro. Di tempat ini juga terletak ndalem (rumah bangsawan) Bintaran.
20. Wawancara dengan mbah Slamet 18 Juli 1983 (beliau kini berusia 84 tahun dan dahulu bekerja sebagai penjaga malam Rumah Sakit Bethesda) Kotabaru yang kini bukanlah merupakan kompleks perumahan bangsa Eropa karena rumah yang ada sekarang telah berbentuk campuran. Jikalau dahulu berjalan ke utara maka akan terlihat dari bangunan yang ada bahwa Kotabaru ini merupakan kompleks "ndorodoro tuwan".
21. Untuk masalah pabrik-pabrik gula di Kota Yogyakarta, periksa, *Encyclopedia van Nederlandsch-Indie*, jilid IV (Leiden : 's-Gravenhage, 1921), halaman 179; lihat juga, "Aanteekening en Betreffende Particulier Suikerfabricatie" di dalam TNI. 1871, jilid I, halaman 103--129.
22. Untuk sejarah perkembangan perkeretaapian di Kota Yogyakarta, lihat Tjokrosumanto *Selintas Sedjarah Perkembangan Djawatan Kereta Api* (Djogjakarta : Penerbit Bersaudara, 1951) halaman 15 -- 67, : Brosur Angkatan Moeda Kereta Api Berjoeang, tt, hlm. 2 - 8 . Soepran Kastomo, *Dari Oecap Menjadi Diesel* (Bandung Pertetakan Doea-doea 1958), halaman 15 -- 28
23. Tjokrosumanto, *ibid*, hal 8.
24. Lihat, Sejarah Singkat Perusahaan Besi Daeah Istimewa Yogyakarta" PD. PUROSANI", 1991.

25. Untuk serangkaian sumber penduduk setelah dijumlahkan dan dikurangi, baik dari tahun 1950an hingga 1950-an, lihat dalam : *Kolonial Verslag* (The Hague . Departemen dan Kolonien, annual, 1842 – 1929); Pauline D. Milone, *Urban Areas in Indonesia Administrative and Census Concepts* (Berkeley : Institute of International Studies University of California, 1966) masri Singarimbun, *The Population of Indonesia, 1930-1968 : A Bibliography* (London International Planned Parenthood Federation, 1969); *Volkstelling 1930* (Batavia : Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, 1933 - 1936), 8 vol.; Widjojo Nitisastro, *Population Trends in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1970), *Pirang Tjatjah sak Temene ing Njobo beteng kuwi?* (Ngajogjakarta, 1923) menyebut bahwa sebenarnya penduduk di luar benteng keraton menurut perkiraan kasar berkisar satu juta lebih; T.S. Fafflees, *The History of Java* (London Black Parbury and Allen, 1817). 2 vols.
26. Istilah golongan ini dipinjam dari Abdurrachman Surjamiharjo, "Golongan Penduduk di Jakarta, Sebuah Ikhtisar Perkembangan" dalam *Seni Budaya Betawi, Pra Lokakarya Penggalan dan Pengembangannya* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1976), halaman 27 --35.
27. Komposisi ini dibuat berdasarkan sumber-sumber tertulis sebagaimana yang dipergunakan dalam catatan kaki no. 25, sedangkan untuk jenis pekerjaan dan lokasi tempat tinggal berdasarkan peta wilayah perkembangan pemukiman di Yogyakarta yang dibuat tahun 1924. Perubahan atas luas wilayah untuk Kota Yogyakarta terjadi setelah tahun 1910 untuk daerah Kotabaru, sedangkan untuk daerah Bintaran ternyata lebih dahulu. Untuk daerah Sagan yang menurut cerita lama dibangun oleh orang Perancis yang bernama Franzoius Sagan sebenarnya bersamaan dengan perkembangan Kotabaru.
28. Widjojo Nitisastro, *op cit.*, halaman 6 ; Bandingkan juga dengan Pauline D. Milone *op cit.* halaman 166, khususnya

- untuk jumlah penduduk di Kota Yogyakarta pada tahun 1905.
29. Pirang Tjatjah sak Temene ing Njobo Befeng Kuwi . . . . .  
*op cit.*, halaman 9 -- 12.
  30. Pauline D. Milone *op cit.*, halaman 124.
  31. *Ibid*, halaman 22 -- 23 (kategorisasi atas etnis dirasakan belum tepat karena penggolongan yang dilakukan hanya berdasarkan kekuatan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial).
  32. Soekanto, *Sekitar Jogjakarta, 1755—1825* (Djakarta: Mahabarata, 1952) halaman 35 dilihat juga, *Sarasilah Kadanoeredjan* (Jogyakarta. Museun Sanabadaja),; *Babad Gijanti, Pratelan Nama ning Tijang lan Panggenan* (Batavia: 1939), TBG. Vol. LXXI, 1931, halaman 323.
  33. Lihat dalam Republik Indonesia, Daerah Istimewa Jogjakarta . . . *op cit.*, halaman 29.
  34. *Ibid*, lihat juga Kota Jogjakarta 200 Tahun . . . *op cit.* halaman 24.
  35. Republik Indonesia, Daerah Istimewa Jogjakarta . . . *op cit.*, *halaman 30*. Untuk masalah-masalah kepamongprajaan, lihat Riwayat Pamong Praja dalam tiga jaman yang dikeluarkan oleh Panitia Pertemuan Kangen-kangenan Eks Pamong Praja se Derah Istimewa Yogyakarta, Minggu wage 8 Juli 1979, di Auditorium Gedung LPP Yogyakarta.
  36. Tri Pantja Warsa Kotapraja Jogyakarta . . . *op cit.*, halaman 17.
  37. *Ibid*, halaman 17.
  38. *Ibid*, untuk serangkaian perundang-undangan yang membahas masalah otonomi Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam berbagai buku seperti berikut R.W. Prodjosugardo, *Buku Pegangan Pamong Praja Daerah Istimewa Jogjakarta* (Jogjakarta: Djawatan Pamong Pradja DIJ, 1950), lihat juga, *Kenang-kenangan Pekan Raja Dwi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1961 di Jogjakarta*.

## **BAB II**

### **PROSES MOBILITAS SOSIAL BAGI MASYARAKAT DI KOTA YOGYAKARTA**

Membicarakan masalah di atas untuk memberikan pengertian atas proses mobilitas masyarakat di Kota Yogyakarta selama awal abad ke-20an, akan dilihat melalui dua aspek kehidupan yang melingkupi masyarakatnya. Alasan untuk mengaji perkembangan masyarakat melalui aspek kultural karena fenomena sosial juga menunjukkan bagaimana penting dan berartinya kehidupan secara kultural ini. Begitu juga alasan mengaji kehidupan keagamaan, karena justru dari sisi ini masyarakat Kota Yogyakarta terlihat menunjukkan gejala perubahan sosial semenjak munculnya kegiatan Zending atau Missi dari agama-agama Kristen Protestan dan Katolik.

Agaknya variasi berbagai perubahan itu harus dikaitkan dengan kondisi dan situasi yang melingkupinya agar dapat dipahami lebih nyata apa yang ingin dikemukakan dalam bab II ini untuk masuk ke dalam bab III atas mobilitas sosial di Kota Yogyakarta dengan segala perubahannya<sup>1</sup>. Bukankah pernyataan solidaritas sosial yang ada pada waktu itu dari struktur masyarakat juga menunjuk pada kondisi tertentu? Masyarakat masih



bertipe agraris dengan hubungan sosial atas afiliasi kelompok dan lebih bersifat "primordial" dalam hubungan yang menyangkut keluarga, kepercayaan dalam lokalitas tertentu. Bukankah kehidupan yang senyatanya ini atas masyarakatnya digambarkan masih memiliki apa yang disebut *collective conscience* atau totalitas kepercayaan dan sentimen yang sama? Kehidupan "pendalaman" agaknya juga memiliki kaitan yang erat dengan hal-hal di bidang pertanian?.

Sejak timbulnya kerajaan-kerajaan di Jawa, kehidupan sosial ekonomi selalu dilibatkan dalam permasalahan pertanahan. Tanah menunjuk pada seseorang akan status tertentu begitu juga semua aspek kehidupan yang melingkupi perorangan atau kelompok selalu berhubungan dengan pemilikan tanah dan hasil kerja atas tanah. Masalah-masalah pengolahan tanah ini membawa juga ke arah pengertian ikatan tradisional masyarakat Jawa sendiri, yaitu ikatan vertikal atau feodal yang kian hari menjadi semakin kuat. Menurut Burger<sup>2</sup>, manifestasi dari ikatan vertikal itu merupakan suatu bentuk atas kekuasaan dan kekuatan dalam pertuanan tanah. Hal ini semakin nampak dengan adanya kewajiban menyerahkan hasil daerah, kerja rodi<sup>3</sup> untuk para penguasa yang pada kesempatan lain selalu diperluas.

Ikatan-ikatan tradisional ini telah mengangkat kedudukan golongan<sup>4</sup> bangsawan ke tingkat yang lebih tinggi lagi sementara kedudukan rakyat biasa menjadi semakin merosot tak berarti. Keadaan seperti ini memuncak pada abad ke-18 dan ke-19 manakala kebudayaan Jawa telah mencapai "senja" kemashurannya. Masalahnya kini sejauh mana pengertian di atas tetap bertahan sejak dikeluarkannya *Agrarische Besluit* atau *Agrarische Wet* pada tahun 1870 atau jauh sebelumnya semenjak adanya memorandum tahun 1851? Arti dan makna *agraria* mengalami perkembangan, sejak gubernur jenderal diberi wewenang untuk menyewakan tanah yang bukan milik desa atau sawah penduduk kepada pengusaha partikelir atau swasta dengan hak *erfpacht* selama 75 tahun dan dapat diperpanjang kembali jika telah habis waktunya. Memorandum tahun 1851<sup>5</sup> menguatkan

garis kerja gubernur jenderal, meski untuk seluruh Jawa pengaruh politik kolonial ini, khususnya yang berhubungan dengan sosial ekonomi agraria baru dirasakan dan berjalan secara intensif sesudah pertengahan kedua dari abad ke-19 bersamaan dengan proses pengikisan kefeodalan masyarakat Jawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui sistem pendidikannya.

Hak *domein* atau hak milik raja atas tanah-tanah di wilayah kekuasaannya telah lama dikenal oleh masyarakat dalam suatu kesadaran hukum rakyatnya, namun apakah hukum ini memang telah ada sejak semula ataukah sesuatu yang baru dan dipaksakan, kesemuanya merupakan masalah yang perlu dipecahkan dahulu<sup>6</sup>.

Telah dijelaskan di bagian depan dari bab II ini bahwa struktur masyarakat golongan atas yang terdiri atas raja dan bangsawan ternyata ikut juga menentukan "hak" atas daerah tertentu yang pada gilirannya akan memberikan arti secara sosial atau ekonomi kepada pemilikinya<sup>7</sup>. Konsekuensi logis atas sistem ini bahwa kepala daerah dapat bertindak semuanya untuk mengeksploitasi daerah yang bersangkutan demi kepentingan pribadi, yang pada gilirannya tanah-tanah itu terlepas dari hak desa dan merupakan suatu *apanase* baru. Di Yogyakarta tanah semacam ini dikenal sebagai *siti dalem pamahosan*<sup>8</sup>.

Hilangnya perdagangan pantai menjadikan daerah pedalaman berkembang, dengan kekhususan dalam bidang perdagangan hasil agraria. Kesultanan Yogyakarta tak terkecuali. Mengapa saat Mangkubumi mendirikan keraton atau daerah kekuasaan yang baru justru masuk ke daerah hulu sungai? Di samping faktor kesuburan juga berkaitan dengan kebudayaan tradisional yang bertitik tolak dari pemujaan dewi kesuburan berikut mitologi dan religinya yang diangkat menjadi kebudayaan istana yang agung<sup>9</sup>. Karena itu dapat dikatakan berdasarkan hal-hal di atas, pasar-pasar yang ada di Kota Yogyakarta<sup>10</sup> yang merupakan daerah terbuka atau tertutup dan dipergunakan sebagai arena kegiatan ekonomi masyarakat sebagai tempat jual-beli secara bersama dan langsung antardua golongan yang saling

berkepentingan, umumnya merupakan tipe pasar pedalaman dengan jenis perdagangan hasil produksi agraris seperti beras, sayuran, palawija, buah-buahan, serta barang kerajinan rakyat.

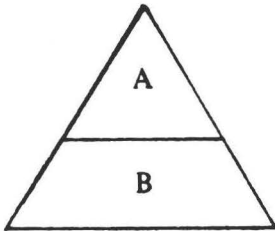
Secara garis besar menurut FA. Sutjipto<sup>11</sup>, masyarakat Mataram yang merupakan pewaris budaya Jawa dapat dibagi menjadi dua bagian. Lapisan atas atau merupakan kelas elite, priyayi luhur. "wong gedhe", merupakan kelas yang memerintah. Di strata ini ada raja dan para bangsawan serta pejabat kerajaan. Sebenarnya jika dilihat dalam sistem katagorisasi, kelompok atau golongan ini merupakan kelompok campuran priyayi yang berasal dari *darah dalem* serta priyayi yang berasal karena pangkat atau pengabdian. Lapisan bawah atau rakyat biasa, rakyat kecil atau "wong cilik" alias "kawulo" alit yang merupakan mayoritas penduduk merupakan kelas yang diperintah. Di dalam kelas ini rakyat dengan berbagai profesi seperti petani, perajin, buruh atau tukang.

Secara nyata ada keterpisahan masyarakat dalam artian kultural yang sengaja dibuat untuk membedakan golongan-golongan dalam masyarakat. Keterpisahan ini disahkan dalam ungkapan "priyayi luhur" versus "wong cilik", "wong njero" versus "wong njobo", "trahing ngaluhur" versus "turun pidak pedarakan", dan masih banyak lagi yang lain. Keterpisahan secara kultural ini juga terlihat atas pemakaian simbol-simbol atau lambang-lambang seperti payung, rumah kediaman, kain yang dipakainya<sup>12</sup>. Sewaktu Kerajaan Mataram berjaya, dalam kehidupan masyarakat dikenal urutan gelar yang terinci baik secara hubungan darah, jabatan atau sebutan kebangsawanan berdasarkan darah dan sebutan kebangsawanan berdasarkan jabatan<sup>13</sup>.

Secara nyata strata kehidupan dalam sisi kultural ini terus dipertahankan hingga datangnya penguasa kolonial. Sejak kontak "peradaban" berlangsung antargolongan-golongan yang ada dalam masyarakat di Kota Yogyakarta, ternyata membawa perkembangan sistem kelas yang sejajar dengan struktur yang telah ada. Jelas kesemua ini berlangsung dalam proses sejarah

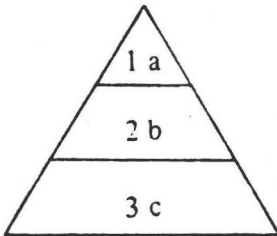
masyarakat Kota Yogyakarta sendiri. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Skema awal strata masyarakat Jawa:



A = Golongan Atas  
B = Golongan Bawah

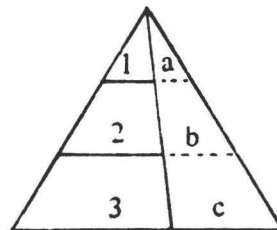
Setelah kontak antargolongan dalam masyarakat terjadi, khususnya semenjak datangnya pengaruh kolonial, menjadi:



1 = Golongan Eropa    a = Penguasa  
2 = Golongan Indo + Cina + Arab    b = Menengah  
3 = Golongan Pribumi    c = Bawah

Secara nyata proses ini dapat diartikan sebagai masa evolusi yang bersifat dinamis atau infolusi yang bersifat statis.

Evolusi = dinamis  
Involusi = statis



Garis kultural

Semenjak kapankah strata dalam masyarakat di Kota Yogyakarta itu berubah, akan sulit dapat secara tepat dikatakan, tetapi dalam gambaran yang umum<sup>14</sup> dapat dikatakan semenjak bergesernya tindakan kolektif menjadi tindakan individual. Jika hal ini dapat dimengerti, paling tidak perubahan itu terjadi sejak dalam kehidupan masyarakat ada berbagai fungsi yang baru dan berakibat adanya diferensiasi fungsional yang kompleks atas kehidupan masyarakatnya<sup>15</sup>.

## 2.1 Kehidupan Kultural

Timbulnya berbagai fungsi yang baru dalam kehidupan masyarakat ternyata melemahkan kehidupan yang nyata terhadap diri masyarakat. Berbagai dasar kehidupan kultural menjadi goyah saat dalam interaksi sosial terjadi kesulitan pemahaman khususnya hubungan manusia dengan tanah, seperti sistem penggarapan sebagai pertukaran sosial atas tanah dan tenaga serta jasa yang semula merupakan hal-hal bersifat perlindungan, informasi, keamanan dan sistem pertukaran barang berupa sumbangan atau pucungan dalam masyarakat. Resiprositas sebagai prinsip moralitas menjadi melemah<sup>16</sup>. Hal semacam ini dikarenakan mundurnya kehidupan kultural karena munculnya priyayi-priyayi baru yang berpendidikan. Gelar priyayi yang "baru" ini mengikis gambaran kehidupan priyayi yang "lama".

Gelar kebangsawanan itu menunjuk juga klas sosial tertentu serta derajat ke beberapa individu itu dekat atau jauh dari raja yang sedang berkuasa, sebenarnya dapat menunjukkan rasa harga diri individu yang bersangkutan dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Hal seperti ini ditunjukkan dengan sistem perkawinan yang endogami dalam status tertentu atau atas kehendak raja yang ada pada akhirnya memunculkan gelar jabatan atau kepangkatan menurut keturunan. Saat birokrasi kolonial menjadi mapan, berbagai gelar kepangkatan atau jabatan semakin menjadi banyak karena tersedianya posisi semacam itu bagi mereka yang menginginkannya dengan aturan-aturan

tertentu. Muncul gelar *mas mantri*, *bu sinder*, di samping gelar yang telah ada semacam *mas dono* atau *bu newu*.

Gambaran atas status seseorang yang diperlihatkan oleh rumah kediaman, pakaian kedinasan bahkan payung kepangkatan rupanya merupakan simbol kebanggaan bagi para pengikut bahkan tak jarang menjadi persekutuan kekuatan antarmereka yang sederajat dalam masalah politik atau ekonomi. Akhirnya saat pemerintah kolonial menganggap bahwa perlu dilakukan pengaturan atas kehidupan pejabat di bawah tingkat bupati dengan berbagai benda upacaranya, kesemua hal itu diatur dalam *Reglement op de titels, de rangen, de staatsie en het gevolg der inlandsche ambtenaren op het eiland Java aan de Regenten ondergeschikt zijnde*<sup>17</sup>.

Sisi lain dari aspek kultural adalah bahasa, yang tidak kalah penting artinya dalam berinteraksi dan mampu menunjukkan dari kelompok mana individu yang bersangkutan itu berasal. Begitu rumit dan sangat ditentukan oleh derajat seseorang baik dari hubungan darah maupun dari jabatannya. Secara garis besar bahasa ini hanya dibedakan menjadi *kromo* dan *ngoko*, meski dalam realisasi pemakaiannya pengertian atas *kromo* sendiri masih terbagi dalam bentuk *kromo inggil*, *kromo madyo*. Hal ini diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sejak seorang individu masih kecil dengan harapan agar individu yang bersangkutan mengenal aturan sopan-santun sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, karena itu aspek kultural ini merupakan suatu lembaga kontrol sosial saat berinteraksi bagi masyarakat.

Kontrol sosial ini dalam waktu-waktu tertentu terasa sangat ketat bagi seorang individu yang kurang memperhatikan dan berakibat tersingkirnya ia dalam pergaulan masyarakat. Ajaran-ajaran yang merupakan sarana pendidikan untuk hal-hal yang bersifat kultural ini dapat diketemukan dalam berbagai mainan atau tembang-tembangan (nyanyian) kerakyatan khususnya dalam dunia kanak-kanak masyarakat Jawa<sup>18</sup>. Pola keseimbangan kosmis ternyata merupakan *paugeran* yang diyakini oleh

seorang individu sejak kecil sebagai suatu jalan pembenaran atas kehidupan ini. Jika seorang individu terlalu banyak berbuat melanggar aturan "jagad gedhe" baik ia sebagai golongan yang memerintah maupun golongan yang diperintah, pasti juga akan berakibat terhadap "jagad cilik" atau diri individu tersebut. Inilah lingkup gambaran kehidupan kultural yang tumbuh berkembang dan terus dipelihara di Yogyakarta yang pada suatu saat tertentu akan mengalami perbenturan atau penyelarasan saat terjadi kontak kultural dengan orang-orang barat yang diwakili oleh bangsa Belanda.

Semenjak terjadinya kontak dan berakhir dengan dikuasainya kehidupan ekonomi masyarakat Jawa, sebenarnya telah terjadi pola-pola pertukaran sosial yang pada gilirannya menimbulkan suatu kode moral tertentu dalam tingkah-laku anggota masyarakatnya. Menurut Peter Ekeh<sup>19</sup>, terjadi pertukaran sosial karena eksistensi diri terlepas dari pertukaran sosial itu sendiri yang mana moralitas pertukaran sosial ini merupakan kekuatan yang mempengaruhi hubungan pribadi baik dalam kerangka ekonomi, sosial ataupun politik. Jangkauan pengaruh dari moralitas semacam ini ternyata luasnya melebihi situasi pertukaran sosial sendiri sebagai dasar hubungan sosial.

Moralitas yang muncul bersamaan dengan proses pertukaran sosial merupakan dorongan atau sangsi pada jaringan komunikasi kultural. Suatu proses pertukaran sosial menciptakan hubungan sosial dan kultural yang pada gilirannya memiliki arti terpisah dan terlepas dari tingkat perkembangan ekonomi dan sosial yang ada di dalam masyarakat. Iklim kultural yang muncul menciptakan solidaritas sosial sendiri. Gambaran ini melahirkan organisasi Boedi Oetomo dan Gerakan Perguruan Taman Siswa<sup>20</sup>.

Bagi keduanya, organisasi Boedi Oetomo maupun Perguruan Taman Siswa memiliki akar budaya Jawa, meski golongan priyayi di Boedi Oetomo dianggap lebih rendah golongannya<sup>21</sup>. Perguruan Taman Siswa memberikan dasar pembentukan kepribadian dalam pendidikan dengan amat menghormati tradisi

budaya bangsa dalam rangka pencapaian kemajuan nasional. Pertautan antarsendi-sendi keagamaan dan kebudayaan ternyata terlihat dari sistem apa yang disebut *pawiyatan* yang telah dimodernisasikan dan merupakan sendi organisasi Taman Siswa<sup>22</sup>. Istilah *pawiyatan* sebenarnya menunjuk pada pola hubungan Taman Siswa dan masyarakat Jawa. Alasan ini merupakan hal yang terpenting untuk memasukkan Perguruan Taman Siswa dalam tulisan berikutnya, pertautan atarkehidupan budaya dan kehidupan keagamaan dalam kerangka mobilitas sosial di Kota Yogyakarta. Gambaran pemahaman kultural yang dikembangkan melalui berbagai sarana seperti tembang, tari dan sistem among merupakan suatu reaksi positif terhadap kolonialisme di bidang pendidikan masyarakat. Ada sekat penahan erosi kultural saat ada penetrasi budaya barat, minimal pertautan antarkehidupan kultural dan agama<sup>23</sup> membuahkan suatu sikap pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya dan melahirkan perubahan sosial yang pada gilirannya akan berguna dalam diri kaum intelegensia di Kota Yogyakarta pada awal abad ke-20 ini.

Perkerabatan dalam masyarakat Jawa dapat dilihat secara nyata dengan pengenalan istilah-istilah tertentu untuk menyebut klasifikasi kekerabatan orang Jawa berdasarkan keturunan. Ada sepuluh urutan generasi ke atas serta sepuluh generasi ke bawah. Klasifikasi tersebut sebagai berikut .

Generasi ke atas :

1. Wong Tuwo (tiyang sepuh)
2. Embah (eyang)
3. Buyut
4. Canggah
5. Wareng
6. Udheg-udheg
7. Gantung siwur
8. Gropak senthe
9. Debog bosok
10. Galih asem

Generasi ke bawah :

1. Anak (putra)
2. Putu (wayah)
3. Buyut
4. Canggah
5. Wareng
6. Udheg-udheg
7. Gantung siwur
8. Gropak senthe
9. Debog bosok
10. Galih asem

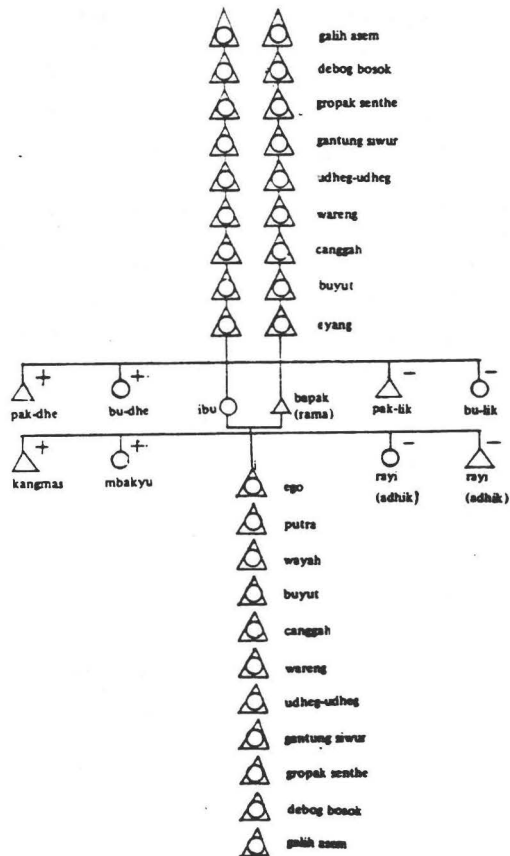


Dari klasifikasi kekerabatan berdasarkan keturunan, sebenarnya kedudukan keluarga batih (*nuclear family*) sangat begitu penting. Tetapi benarkan demikian? Apakah kehidupan dalam keluarga luas (*extended family*) diabaikan? Pertanyaan ini akan diperluas dalam bab III untuk meninjau kedudukan suatu bentuk kesatuan sosial orang Jawa yang disebut organisasi *trah*.

Untuk lebih jelasnya pembagian atas klasifikasi di atas, akan diberikan gambaran istilah kekerabatan orang Jawa berdasarkan keturunan sebagaimana yang tertulis dalam bagan I ini.

### Bagan I

#### Istilah Kekerabatan Orang Jawa Berdasarkan Keturunan



Selain istilah kekerabatan berdasarkan keturunan, masyarakat Jawa juga menggunakan istilah-istilah panggilan (sapaan) yang dipakai oleh ego untuk memanggil seseorang kerabat, misalnya :

- (1) Istilah panggilan untuk kakak laki-laki atau perempuan nenek adalah *eyang ageng (embah gedhe)* atau *eyang*
- (2) Istilah panggilan untuk adik laki-laki atau perempuan nenek adalah *eyang alit (embah cilik)* atau *eyang*
- (3) Istilah panggilan untuk kakak laki-laki ayah atau ibu adalah *pak-dhe, wa* atau *uwa*
- (4) Istilah panggilan untuk kakak perempuan ayah atau ibu adalah *bu-dhe, wa* atau *uwa*
- (5) Istilah panggilan untuk adik laki-laki ayah atau ibu adalah *pak-lik, paman* atau *lik*
- (6) Istilah panggilan untuk adik perempuan ayah atau ibu adalah *bu-lik, bibi, lik* atau *bi*
- (7) Istilah panggilan untuk ayah adalah *pak, bapak* atau *rama*
- (8) Istilah panggilan untuk ibu adalah *bu, ibu, mbok, simbok, biyung* atau *yung*
- (9) Istilah panggilan untuk kakak laki-laki adalah *kangmas, mas, kakang* atau *kang*
- (10) Istilah panggilan untuk kakak perempuan adalah *mbakyu, mbak* atau *yu*
- (11) Istilah panggilan untuk adik laki-laki atau perempuan adalah *adik, dik* atau dipanggil namanya
- (12) Istilah panggilan untuk seorang laki-laki generasi lebih muda adalah *gus, kelik* atau *lik, thole* atau *le*
- (13) Istilah panggilan untuk seorang perempuan generasi lebih muda adalah *wuk, genduk* atau *nduk, denok* atau *nok*
- (14) Istilah panggilan untuk anak laki-laki saudara-saudara ayah atau ibu yang lebih tua adalah *kangmas, mas, kakang* atau *kang*, sungguhpun ada kemungkinan bahwa anak-anak itu sebenarnya lebih muda dari pada yang dipanggil
- (15) Istilah panggilan untuk anak perempuan saudara-saudara ayah atau ibu yang lebih tua adalah *mbakyu* atau *mbak*,

meskipun ada kemungkinan bahwa anak-anak itu sebenarnya lebih muda dari pada yang memanggil

- (16) Istilah panggilan untuk anak saudara-saudara ayah atau ibu yang lebih muda, baik laki-laki maupun perempuan adalah *adik* atau *dik*, meskipun ada kemungkinan bahwa *adik* itu sebenarnya lebih tua dari pada yang memanggil

Sedangkan istilah-istilah "menyebut" misalnya :

- (1) Istilah *keponakan* digunakan untuk menyebut anak laki-laki atau perempuan dari kakak laki-laki atau kakak perempuan.
- (2) Istilah *prunan* digunakan untuk menyebut anak laki-laki atau perempuan dari adik laki-laki atau adik perempuan
- (3) Istilah *naksanak* digunakan untuk menyebut anak laki-laki atau perempuan dari *pak-dhe (bu-dhe)* atau *pak-lik(bu-lik)*
- (4) Istilah *misan* digunakan untuk menyebut saudara satu (tunggal) *mbah buyut*
- (5) Istilah *maratuwa* digunakan untuk menyebut ayah atau ibu suami atau istri seseorang
- (6) Istilah *besan* digunakan untuk menyebut orang tua menantu
- (7) Istilah *pripean* digunakan untuk menyebut antara saudara ipar dan ipar
- (8) Istilah *ipe* digunakan untuk menyebut kakak atau adik suami atau istri
- (9) Istilah *mantu* digunakan untuk menyebut menantu laki-laki atau perempuan

Prinsip keturunan di dalam kekerabatan masyarakat Jawa ini telah melembaga. Hal ini diperkuat dengan adanya pengertian keluarga *batih* itu, yang pada dasarnya bagi seorang individu berfungsi sebagai: (a) kelompok yang membantu si individu dan memberikan bantuan yang bersifat utama dan keamanan kehidupannya dan (b) kelompok yang mengasuh individu saat kanak-kanak dan pemberi pendidikan awal individu yang bersangkutan.

Sistem perkerabatan yang bersifat *bilateral* dalam masyarakat Jawa menjadikan seorang individu diperhitungkan untuk mendapatkan warisan menurut garis keturunan ayah maupun ibu. Ada dua macam pengertian harta warisan, yaitu harta pusaka dan harta pencaharian selama perkawinan (*gono-gini*). Untuk harta pusaka tidak boleh dijual, harus dipelihara, dan umumnya diturunkan kepada anak laki-laki. Jika seseorang tidak memiliki keturunan dalam perkawinannya, maka harta waris dapat diturunkan kepada kemenakannya. Di dalam hal warisan, masyarakat Jawa mengenal istilah *segendhong-sepikul*. Bagi anak laki-laki memperoleh *sepikul*, sedangkan untuk anak perempuan mendapat *segendhong*, artinya, anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat besarnya harta warisan itu daripada anak perempuan.

## 2.2 Kehidupan Keagamaan

Sub bab ini akan menguraikan tentang kehidupan keagamaan yang melingkupi masyarakat Kota Yogyakarta. Untuk ini harus diperhatikan latar dan perkembangan sejarah persebaran agama di masyarakat kota ini. Yang dimaksud dengan persebaran agama ini akan dibatasi bagi agama Kristen Protestan dan Katolik, mengingat bahwa agama Islam sendiri telah lebih awal dipeluk oleh masyarakat Jawa. Proses persebaran agama Islam yang dimulai semenjak abad ke-16 secara intensif oleh para ulama menjadikan berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa mempergunakan gelar yang berkaitan dengan agama Islam, seperti sultan, yang pada prinsipnya bagaimana dinasti Mataram Islam memanipulasi pengumpulan gelar-gelar itu.<sup>24</sup>

Seperti yang terjadi di Eropa pada awal perkembangan sejarah "keimanan", berbagai agama ikut memberikan andil dalam proses perjalanan masyarakatnya, begitu juga untuk kehidupan di Kota Yogyakarta. Agama Islam yang lebih dahulu dianut masyarakat akhirnya disusul oleh agama Kristen Protestan atau Katolik karena adanya kontak kultural sejak datang orang-orang barat ke daerah ini<sup>25</sup>. Kesemua itu pada gilirannya

ikut memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam proses mobilitas sosial masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialnya baik dalam pembangunan kesehatan dalam bentuk membangun rumah-rumah sakit atau dalam bidang pendidikan. Di bidang kesehatan masyarakat, beberapa rumah sakit yang dikelola oleh agama Kristen Protestan seperti Rumah Sakit Bethesda atau yang dikelola oleh agama Katolik seperti Rumah Sakit Panti Rapih bahkan yang dikelola oleh agama Islam seperti Rumah Sakit Muhammadiyah, di kawasan Kota Yogyakarta lebih menunjuk pada "gerakan keagamaan". Kehadiran lembaga-lembaga kesehatan masyarakat itu memang tidak bersamaan, tetapi pada dasarnya merupakan hasil suatu kontak kultural dalam sebuah peradaban manusia dari suatu masa yang dalam gambaran umumnya merupakan usaha transformasi kegiatan manusia dan berpengaruh terhadap struktur-struktur sosial yang ada serta perilaku suatu masyarakat.<sup>26</sup>

Kuatnya hubungan antarrumah sakit di masyarakat dengan kehidupan agama, menjadikan tulisan ini harus melihat meski dalam gambaran yang serba umum hadirnya beberapa kehidupan agama di atas beserta hal-hal yang melingkupinya di Kota Yogyakarta.

### 2.2.1. Agama Katolik

Awal perkembangan agama Katolik di Yogyakarta adalah semenjak adanya kontak pribadi antara Pastor van Lith dengan Pangeran Sasraningrat, tetapi kehadiran gereja Katolik di Yogyakarta dilakukan oleh seseorang missionaris Indo-Belanda yang bernama Henri van Drisseche SJ<sup>27</sup>. Suatu sekolah Missi yang pertama kali dibuka di kota ini adalah *Standardschool* di daerah Kumendaman pada tahun 1917. Setahun kemudian, berkat bantuan beberapa orang pangeran, pada 1 Agustus 1918 dibuka dua HIS (*Hollands Inlandsche School*) dengan murid sebanyak 450 orang. Pada 19 September 1920 dari kongregasi *Santa Perawan Maria yang Terkandung Tak Berdosa* (OO atau FIC) lima bruder tiba di Indonesia dan memulai karyanya

dengan mengambil alih kedua HIS. Taman Kanak-kanak dibuka pada tahun 1918 dan sekolah putri Jawa (HIS) dibuka pada tahun 1920 oleh para suster Fransiskanes.

Di samping Pastor van Driessche, tugas missionaris di Kota Yogyakarta juga dilakukan oleh Pater Frans Strater SJ. Ia memulai tugas di Yogyakarta pada tahun 1918. Pada tahun 1922 ia menjabat pimpinan Novisiat Serikat Jesus yang baru dibuka di Kota Yogyakarta. Ia lebih banyak bergerak di pedesaan sekitar Yogyakarta. Banyak sekolah Katolik yang dibangunnya tanpa harus bersaing dengan sekolah negeri. Sedapat mungkin Pastor Strater memulai dengan mendirikan *Staandaarschool* yang lamanya lima tahun dalam daerah yang dianggap strategis. Pembangunan sekolah biasanya berlanjut dengan masuknya sebagian anak didik menjadi penganut agama ini, dan berlanjut dengan dibangunnya gereja sederhana. Pola semacam ini yang dilakukan di desa-desa dengan mendirikan sekolah desa tiga tahun dan kapel-kapel kecil dengan pelajaran agama serta persembahan misa menjadi agama Katolik cepat berkembang di masyarakat.

Permulaan tahun 1922 oleh para bruder FIC secara sederhana dibuka sebuah percetakan. Ada tiga tujuan pendirian percetakan ini, yakni: (1) barang cetakan Katolik dengan harga murah, (2) lapangan pekerjaan bagi orang-orang Jawa dengan kondisi sosial yang baik, dan (3) sekedar keuntungan finansial bagi sekolah-sekolah kanisius.

Meski pada awal pendirian lebih merupakan kerja sosial, namun pada akhirnya percetakan ini cukup memberikan arti bagi perkembangan agama Katolik di Yogyakarta. Masih ada dua proyek yang dikerjakan oleh para missionaris ini, antara lain : (a) proyek pertukangan membuat perabotan dari kayu untuk memenuhi kebutuhan sekolah-sekolah Kanisius dan gereja-gereja dan (b) proyek keterampilan menjahit.

Perkembangan gereja Katolik di Yogyakarta dengan berbagai kegiatan sosialnya dapat dicatat sebagai berikut. Pada

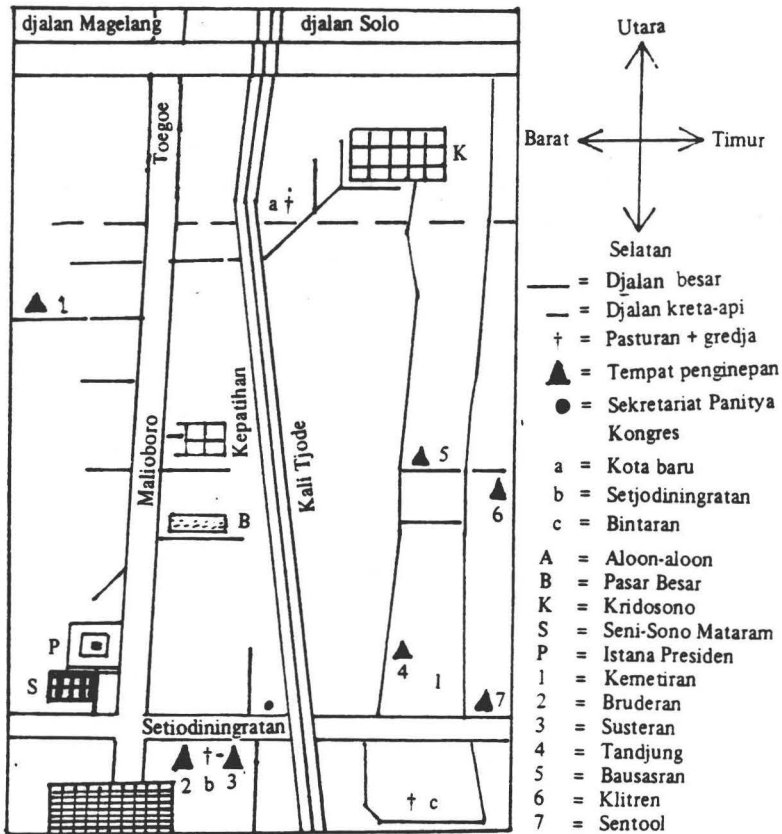
tahun 1919 berdiri *Katolieke Sociale Bond* (KSB) dengan anggota 30 orang Jawa dan 50 orang Belanda. Ide pendirian KSB dari pater Y. van Rijckevorsel di Jakarta. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Belanda untuk kegiatan diskusi maupun ceramah. Kegiatan KSB di tahun 1920 yang dapat dianggap berguna adalah diselenggarakannya pekan sosial, yang membicarakan pelbagai persoalan sosial yang berpangkal pada *ensiklik Rerum Novarum*.<sup>28</sup>

Kesatuan umat bagi orang Jawa lebih terasakan dengan dibentuknya *khalwat*, dan melahirkan *Poesara Katolika Wandawa*. Perkumpulan ini berasal dari Katolik Wandawa yang dibentuk pada tahun 1913, dengan anggota pertama sebagian besar guru tamatan Muntilan. Di Kota Yogyakarta pada tahun 1923 akhirnya untuk golongan putri terbentuk organisasi *Wanita Katolik*.

Setahun seelah berdirinya Katolik Wandawa, tepatnya pada bulan Januari 1914, diterbitkan sebuah majalah bulanan sebagai media komunikasi antarbekas para siswa Muntilan, dan pada nomor pertama memakai nama *Djawi Sraya*. Majalah ini merupakan majalah *khalwat* yang pada akhir tahun 1914 memiliki langganan sebanyak 500 orang dan mereka kebanyakan bukan pemeluk agama Katolik. Akhirnya majalah *Djawi Sraya* pada tahun 1920 diganti menjadi majalah *Swara Tama* dan terbit dua bulan sekali. Alasan penggantian karena majalah *Djawi Sraya* dinilai kurang tepat lagi memaparkan berbagai jajaran sosial ekonomis akibat munculnya berbagai propaganda komunis. Nomor pertama majalah *Swara Tama* beredar ke masyarakat dengan oplag sebanyak 1500 eksemplar, terbitnya tepat pada 1 September 1920. Kemunduran majalah ini akibat adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan mundurnya agitasi golongan Komunis di masyarakat. Bulan Februari 1942 dalam rapat *Poesara Katolika Wandawa* diputuskan bahwa *Swara Tama* menjadi terbitan mingguan dan lebih bersifat Katolik. Majalah ini hidup hingga zaman Jepang.

Perkembangan gereja dalam Kota Yogyakarta membawa juga konsentrasi permukiman masyarakat pemeluk agama ini. Pada awalnya konsentrasi kegiatan keagamaan berada di Gereja Kidul Loji (sekarang di Jalan Panembahan Senopati). Selanjutnya berkembang ke arah utara Gereja Kotabaru,<sup>29</sup> dan ke arah timur sebagai Gereja Bintaran. Setelah tahun 1930 berdiri Gereja Pugeran dan pada tahun 1942 berdiri Gereja Kenteran. Perkembangan gereja ini dapat dilacak melalui sketsa Kota Yogyakarta sebelum tahun 1930 seperti di bawah ini.

### SCHETS KOTA JOGJAKARTA





Sebagaimana telah dikemukakan di bagian depan bahwa pada dasarnya perkembangan ajaran agama dan kesehatan serta pendidikan dalam masyarakat lebih merupakan kontak sosio-kultural, sehingga secara nyata hal ini dapat diterangkan melalui kehadiran sebuah rumah sakit yang dimiliki oleh Missi di Yogyakarta yang bernama *Onder de Bogen*, yang kelak berganti nama menjadi *Panti Rapih*. Berikut ini riwayat singkat rumah sakit itu.

Bulan Januari 1929 hadir lima orang suster kongregasi St. Carolus Boromeus (CB) untuk melayani mereka yang terkena musibah sakit. Nama kelima suster itu adalah Sr. Gaudentia Brand, Sr. Yudith de Laat, Sr. Ignatia Lemmens, Sr. Simonia, dan Sr. Ludholpha de Groot. Kelima suster ini datang dari jauh, rumah induk biara Suster Carolus Borromeus di Maastricht, Negeri Belanda.<sup>30</sup>

Sebuah rumah sakit dibangun atas usaha dan prakarsa direktur Pabrik Gula Ganjuran bernama Ir. Schmutzer. Pembangunan dengan peletakan batu pertama dilakukan oleh Ny. CTM. Schmutzer van Rijkeversel pada 15 September 1928. Pembangunan rumah sakit ini selesai pada pertengahan bulan Agustus 1929 dan pada tanggal 25 bulan itu, Mgr. van Velsen SJ. berkenan memberkati bangunan itu. Pada 14 September 1929 secara resmi rumah sakit ini dibuka oleh Sri Sultan Hamengku-Buwono VIII dan diberi nama Rumah Sakit *Onder de Bogen*. Semenjak tahun 1929 hingga tahun 1950an beberapa kejadian yang dianggap penting yang berkaitan dengan pembangunan fisik rumah sakit ini adalah:

- Tahun 1929 : Rumah Sakit *Onder de Bogen* lahir dengan fasilitas yang ada, yaitu dua bangsal perawatan, satu unit kamar bedah, satu unit dapur, sebuah kapel dan rumah biara kecil untuk para suster
- Tahun (?) : Membangun bangsal Theresia khusus untuk orang miskin, dibangun dengan dana bantuan Broeder FIC

Tahun 1939 : Membangun bangsal Anna khusus untuk bagian kandungan

Tahun 50an : Membangun bangsal Carolus, bangsal Albertus, bangsal Yacinta dan Poliklinik umum

Nama-nama pimpinan rumah sakit dari tahun 1929–1950-an adalah:

- Tahun 1929--1932 : Moeder Goudentia CB  
Tahun 1032--1936 : Moeder Ambrosino CB  
Tahun 1936--1939 : Moeder Ignatio CB  
Tahun 1939--1942 : Moeder Agnella CB  
Tahun 1942--1945 : Moeder Sponsaria  
CB Tn. Owada + dr. Cucihatsi  
(pada zaman Jepang)  
Tahun 1945--1947 : Moeder Agnella CB  
dr. R.M. Sentral  
Tahun 1947--1950an : Moeder Cornelianne CB  
dr. R.M. Sentral

*Onder de Bogen Ziekenhuis* merupakan perwujudan nyata dari persambungan ide-ide golongan humanis di Negeri Belanda. Sesuai dengan tema politik etis pada akhir abad ke-19 sesungguhnya rumah sakit ini merupakan juga "niat" yang terkandung di lapisan golongan tertentu dalam masyarakat Eropa. Untuk mengelola rumah sakit ini dibentuklah sebuah yayasan, sedangkan dalam penyelenggaraan sehari-hari kegiatannya diserahkan kepada para suster dari kongregasi St. Carolus Borromeus. Untuk tidak menyebut para dokter yang pernah bekerja di rumah sakit ini, mungkin saja terasa janggal. Bagaimana dapat diketahui eksis tidaknya sebuah rumah sakit tanpa melihat seluruh aspek yang ada di dalam kehidupannya? Inilah nama para dokter yang pernah berkarya di bawah atap *Onder de Bogen Ziekuehuis*<sup>3 2</sup> :

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| (1) dr. Van Der Meulen      | (6) dr. Tan Tjoen Gwan    |
| (2) dr. Siem Ki Ay, (alm)   | (7) dr. Ko Sing Po        |
| (3) dr. R.M. Sentral, (alm) | (8) dr. Moh. Salim, (alm) |
| (4) dr. Pikauli             | (9) dr. N. Pop            |
| (5) dr. Sudarmadji          | (10) dr. dr. Ismangun     |

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| (11) dr. Ong Liang Kiong  | (17) dr. Suwito      |
| (12) dr. Marthohusodo     | (18) dr. Yudono      |
| (13) dr. Thio Kiem Djawan | (19) dr. Purwonosodo |
| (14) dr. FX Tendean       | (20) dr. Linawati    |
| (15) dr. Swie Ban Gee     | (21) dr. Sukiman     |
| (16) dr. Suratiman        |                      |

Berbagai pergeseran tugas dari para suster maupun dokter bangsa Belanda ke tangan orang-orang Indonesia secara nyata terjadi pada zaman pendudukan Jepang<sup>33</sup>. Pada masa tersebut nama *Onder de Bogen Ziekenhuis* yang berbau Belanda harus diganti dengan nama Indonesia. Atas usaha Mgr. Alb. Soegijoprano, Sj. sebagai uskup Semarang memberikan nama yang baru, yakni Rumah Sakit Panti Rapih, artinya rumah penyembuhan.

Gambaran pendidikan paramedis yang diselenggarakan oleh rumah sakit ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun Mulai Pendidikan	Macam Pendidikan	Dasar Pendidikan Minimal	Lama Pendidikan	Keterangan Setelah Lulus
1939	juru rawat	SR	3 tahun	mantri juru rawat
1942	bidan	SMP	3 tahun	bidan C
1950-an	perawat	SMP	3 tahun	perawat A

Tabel di atas sebenarnya memberikan gambaran akan pasang-surutnya sejarah rumah sakit ini dan makin meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Pendidikan tenaga paramedis di atas dimaksudkan untuk membantu pengembangan layanan kesehatan di bagian-bagian tertentu rumah sakit ini, khususnya di kalangan masyarakat sendiri, melalui pendidikan kesehatan.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan untuk berbicara tentang hubungan masyarakat dan pendidikan serta rumah sakit yang didirikan Missi ini ialah mereka yang pernah menjadi pengurus yayasan *Onder de Bogen*. Tanpa keuletan kerja dari mereka, niscaya apa yang dikenal sebagai Rumah Sakit Panti Rapih kini tidak mungkin akan berkembang sedemikian pesat.

Di sini tidak akan disebut nama-nama mereka yang pernah menjabat sebagai pengurus yayasan ini, cukup jika sampai sekitar 1931 mengingat terbatasnya sumber yang tersedia dan dapat diketemukan khususnya pada zaman pendudukan Jepang.

Sejak 22 Februari 1927 -- 22 Oktober 1930 susunan kepengurusan yayasan adalah sebagai berikut:

22 Februari 1927

Ketua : LTH. Schlattmann  
Penulis : JFM. Strater  
Bendahara : JM. Gatzen  
Anggota : Pastor J. van Baal  
CFM. Duijzings  
WA. Haattink  
JRAM. Schmutzer

5 April 1927

Ketua : Ir. JRAM. Schmutzer  
Penulis : Ir. J. Th. Rietveld  
Bendahara : Mr. Th. WAF. Versteegh  
Anggota : Pastor H. An. Sterneberg  
Ir. WA. Hattink

22 Oktober 1930

Ketua : Ir. WA. Hattink  
Penulis : Ir. J. Th. Riefveld  
Bendahara : LBM. Rattier  
Anggota : Pastor GAM. Schmedding

Perubahan susunan kepengurusan yayasan pada 5 April 1927 dilakukan dengan cara mengurangi jumlah anggota yayasan sebanyak dua orang, sedangkan pada 22 Oktober 1930 sebanyak satu orang. Dengan demikian dalam beberapa tahun saja yayasan ini telah melakukan penyederhanaan organisasi yang bersifat ke dalam karena hal-hal tertentu.<sup>34</sup>

Menurut catatan yang ada semenjak tahun 1931, jabatan penulis ditiadakan jauh sesudah Perang Kemerdekaan. Sesudah

perang, rumah sakit ditinggal oleh para pengurus lama dan sebagai pengelola untuk berlangsungnya kehidupan rumah sakit ini, di bawah pengawasan dr. RH. Sentral, Mgr. A. Soegijopranoto SJ., dan Suster Carolus Borromeus.

### 2.2.2 Agama Kristen Protestan

Pertanyaan awal jika ingin melihat perkembangan agama Kristen di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta, adalah, bagaimanakah Zending pada waktu itu dan siapakah yang menjalin kontak hubungan "keyakinan" masyarakat Jawa? Pertanyaan ini merupakan dasar pengertian sejarah perkembangan penganut agama Kristen Protestan di lingkungan kehidupan masyarakat Jawa. Bukankah pada awal perkembangan dari kontak itu telah dikenal oleh masyarakat Jawa berbagai agama dan telah dianutnya? Mengapa mereka dapat menerima dan akhirnya meyakinkannya? Etnik mana yang paling berperan dalam penyebaran agama ini?

Di bawah ini akan diuraikan serba sedikit mengenai proses perkembangan dan penyebaran agama Kristen Protestan di Kota Yogyakarta,<sup>35</sup> tetapi sebelum itu harus diuraikan terlebih dahulu gambaran umum etnik Tionghoa yang ikut berperan dalam penyebaran agama ini di kalangan masyarakat Jawa.

Orang-orang Tionghoa yang telah bermukim jauh sebelum kedatangan orang-orang Barat dan setelah menetap beberapa lama biasanya melakukan perkawinan campuran dengan penduduk asli. Hasil perkawinan campuran ini melahirkan sebuah generasi yang biasa disebut sebagai golongan peranakan Tionghoa.<sup>36</sup> Sistem kemasyarakatan yang dibentuk oleh orang-orang Barat sebagaimana yang telah dikemukakan di bagian depan dari tulisan ini menjadikan golongan Tionghoa ini sebagai kelas menengah. Mereka diperlakukan sebagai *vreemde oosterlingen*. Kegiatan perdagangan dan pengusaha bidang perekonomian menjadikan gerak hidup mereka sangat "mobil", maksudnya,

mereka dapat bergerak di kota-kota besar atau kecil.<sup>37</sup> Tempat-tempat pemukiman mereka yang disebut *Chineesche wijk* menjadikan perkembangan gereja di kalangan orang-orang Tionghoa penganut agama Kristen Protestan mempergunakan bahasa pengantar dalam lalu-lintas perdagangan, yakni bahasa Melayu dan sifat gerejanya menjadi "gereja kota".

Hubungan perdagangan dengan para penguasa khususnya saat pemerintahan Inggris (1811 -- 1815), secara kebetulan memberikan arti untuk berkembangnya agama Kristen di Indonesia.<sup>38</sup> *Baptist Missionary Society* dan *London Missionary Society* sebagai badan-badan Zending Inggris yang semula akan ditugaskan ke Tiongkok, tetapi mengambil perhatian golongan masyarakat Tionghoa yang ada di Jawa, khususnya di Jakarta dan Surabaya. Para pengabar Injil ini, khususnya yang bernama *Medhurst* dari *London Missionary Society* cukup lama bekerja di lingkungan masyarakat peranakan Tionghoa yang berbahasa Melayu. Semangat penginjilan pada pertengahan abad ke-19 menjadikan terhadirnya "perkumpulan untuk pekabaran Injil di dalam dan di luar gereja" di wilayah Jakarta. Pimpinan yang terkemuka dari perkumpulan ini ialah Mr. Anthing. Kegiatannya juga melibatkan para pengabar Injil golongan pribumi.

Pengabar Injil dari golongan masyarakat Tionghoa yang banyak jasanya bernama Gan Kwee. Ia berasal dari Tiongkok Selatan dan menggabungkan diri dalam perkumpulan Mr. Anthing. Ia melakukan kegiatan-kegiatan Injil di kalangan Tionghoa totok dan peranakan. Kegiatan ini pada tahun 1866 membuahkan dibaptisnya seorang Tionghoa bernama Khouw Tek San yang pada gilirannya ikut memberikan andil untuk tersebarnya agama ini di daerah Jawa Tengah bagian selatan.

Sejak 1902 kegiatan penginjilan ini untuk daerah Jawa Tengah bagian selatan diambil alih oleh gereja-gereja *Gereformeerd* Negeri Belanda yang memfokuskan kepada orang-orang pribumi dan pembentukan gereja-gereja Jawa. Mulailah

perpindahan etnik penganjur dari orang-orang Tionghoa kepada orang-orang Jawa.<sup>39</sup> Sejalan dengan penganjuran atas orang-orang Tionghoa dibuka pendidikan sekolah seperti *Hollandsch Chineesche School met de Bijbel* pada tahun 1917.

Menurut sejarahnya,<sup>40</sup> perkembangan agama Kristen di daerah Kesultanan Yogyakarta semenjak adanya kontak penduduk di daerah Jawa Tengah dengan agama ini pada tahun 1860. Atas kesadaran sendiri empat orang penduduk diberi sakramen pembaptisan. Pembaptisan ini terjadi di daerah Purworejo terhadap seseorang bernama Khephas oleh pendeta Braams. Alasan dibaptisnya penduduk itu, karena pada waktu itu untuk kegiatan pembaptisan di daerah kesultanan masih dilarang.

Penduduk yang bernama Khephas atas kesaksian pendeta Lion Cachet mengenal secara baik ajaran Hindu, Budha, maupun Jawa dan disebut, "*Hij is geen gewoon man, die het Nederlandsch even zuiver spreekt als het Malaisch and zijn moder-taal, het Javaansch, en daarbij met nog een of twee moderne talenniet onbekend is*". Pada tahun 1891 ada sejumlah 460 jiwa yang minta dibaptiskan. Hal ini berkat usaha "gerakan-gerakan keagamaan" yang lebih bersifat "kejawan" di bawah pimpinan Sadrach<sup>41</sup> "Kebangkitan" masyarakat Jawa untuk memeluk agama Kristen telah dimulai.

Sejak beberapa tahun sejak "kebangkitan gerakan itu", pada tahun 1897 perkembangan agama Kristen di Kota Yogyakarta semakin pesat. Hal ini berkat usaha seorang dokter berkebangsaan Belanda bernama dr. JG. Scheurer. Pada 1 Juli 1897 ia mendirikan sebuah rumah dengan pendopo untuk membuka praktek perawatan kesehatan bagi siapa yang memerlukannya. Banyak penduduk yang tertarik dan hasilnya masuk menjadi penganut agama Kristen. Usaha sang dokter dibantu oleh seorang penduduk pribumi bernama Yoram, sedangkan lokasi prakteknya di daerah Bintaran.

Tahun 1900 kelompok-kelompok pribumi yang menganut agama Kristen di Kota Yogyakarta telah berkembang. Seluruh

penduduk kota yang berjumlah 55.000 orang, penganut agama Kristen sebanyak 900 jiwa. Mereka tersebar di sekitar wilayah Gondokusuman. Semenjak tahun di atas, kebutuhan akan rumah ibadah mulai terasakan, sebagai rumah kebaktian yang permanen Akhirnya pada tahun 1904 didirikan gereja Mungil yang terletak di sebelah utara simpang tiga dari Kampung *Klitren Lor*. Kapasitas penampungan sebesar 400 pengunjung kebaktian. Bentuk asli dari bangunan gereja itu kini telah tidak ada. Pada tahun 1953 gedung itu dibongkar, diganti dengan bentuk yang baru. Kini merupakan toko buku Taman Pustaka Kristen yang terletak di ujung timur Jalan Jenderal Sudirman

Pembinaan terhadap umat semenjak tahun 1900 ke atas semakin mantap, dan pada tahun 1913 tepatnya pada 23 November telah memiliki Dewan Majelis untuk mengurus jema'at tanpa bantuan siapa pun. Majelis Gereja Kristen Jawa Gondokusuman yang pertama memiliki anggota yang terdiri atas Yusup Wasman, Eliada, Kalam Efrayin, dan Raden Sudikun sebagai *tua-tua* dan Samuel Wasman serta Daniel Wasman sebagai *diaken*. Kemajuan penyiaran agama Kristen semenjak tahun 1913 -- 1920 dilakukan juga dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar yang bernapaskan agama Kristen.

Setelah berjalan selama 21 tahun, gedung gereja yang dibangun pada tahun 1904 dirasakan telah tidak dapat menampung umat yang ingin melakukan kegiatan rohani. Jalan tengah yang diambil ialah menyalurkan kegiatan kebaktian ke daerah Lowanu -- Tungkak. Didirikan pula gereja yang merupakan cabang dari Gereja Kristen Jawa Gondokusuman. Sekarang gereja ini telah berdiri sendiri dengan nama Gereja Kristen Jawa Mergangsan.

Meningkatnya mereka yang beribadah di kawasan Gondokusuman mengharuskan adanya tambahan perluasan atas gereja yang lama. Majelis gereja merencanakan dibangunnya sebuah gereja yang baru dengan kapasitas tampung untuk 1.000



pengunjung kebaktian Diusahakan dana dan akhirnya terkumpul untuk awal pembangunan gereja. Peletakan batu pertama pembangunan gereja dimulai pada hari Senin 18 November 1929 di Kampung Klitren Lor. Gedung gereja itu direncanakan selesai pada bulan Mei 1930, sedangkan tanggung jawab pembangunannya diserahkan kepada Tn. Pluyter.

Gedung yang baru ini baru selesai pada bulan November 1930 berarti mundur beberapa bulan dari rencana semula. Secara resmi gedung gereja baru ini dipergunakan sejak hari Kamis 11 Desember 1930. Upacara pembukaan dilakukan dengan pelayanan kotbah oleh Pendeta P. Sopater, seorang pendeta Jema'at Kristen Jawa Gondokusuman yang pertama dan pribumi asli yang berasal dari Kotagede Yogyakarta. Setiap minggu kebaktian dilakukan hingga tahun 1940.

Ada masa berkembang dan ada juga masa suram. Hal ini ternyata berlaku juga untuk Gereja Kristen Jawa Gondokusuman. Semenjak masuknya kekuasaan pemerintahan *Dai Nippon*, umat Kristen di kawasan Gondokusuman mengalami tekanan-tekanan yang cukup berat. Sekolah-sekolah yang bernapaskan ajaran agama Kristen harus ditutup. Bulan Juni 1944<sup>43</sup>, Majelis Gereja Kristen Jawa Gondokusuman mendapat perintah dari pembesar *Dai Nippon* agar segera mengosongkan bangunan gereja dan menutupnya. Jika mau melakukan kebaktian pemeluk agama Kristen Jawa Gondokusuman dapat melakukannya di gedung bekas pabrik es yang sekarang menjadi Gedung Bioskop Rahayu. Perintah itu jelas diterima tanpa dapat berbuat apa-apa.

Pada 5 Juli 1944 semua barang yang dipergunakan untuk kebaktian terpaksa diangkut dan dipindahkan ke gereja yang lama. Ternyata setelah dikosongkan gereja itu dipergunakan sebagai gudang untuk menyimpan keperluan pemerintah *Dai Nippon*. Pada 9 Juli 1944 kebaktian dimulai, tetapi karena tempatnya begitu sempit maka terpaksa para pengunjung ada yang berdiri di luar gedung gereja. Selama itu kebaktian dirasa-

kan kurang tenang. Inilah keprihatinan yang dirasakan oleh penganut agama ini pada masa pendudukan Jepang.

Proklamasi Kemerdekaan mengakhiri keprihatinan itu. Gedung Gereja Kristen Jawa Gondokusuman di Klitren Lor dikembalikan kepada umat Kristen dan kembali dipergunakan sebagai kebaktian. Acara kebaktian setelah Proklamasi dilaksanakan pada hari Minggu bulan September 1945, dan ini mengawali kegiatan tugas panggilan bidang kerohanian agar terbina dan tegaknya iman umat Kristen di Negara Republik Indonesia yang merdeka.

Telah disinggung pada bagian depan bahwa perkembangan agama berkaitan erat dengan dibangunnya perawatan kesehatan masyarakat. Hal ini tak terkecuali dengan perkembangan agama Kristen Protestan di daerah Yogyakarta. Perkembangan rumah kesehatan masyarakat yang dikelola oleh agama Kristen ini, sejarahnya adalah sebagai berikut.

Pada 27 April 1893 di Gereja *Nieuwa Westerkerk* di Rotterdam, dokter JG. Scheurer diteguhkan sebagai *missionary art* (dokter utusan) oleh pendeta DS. Lion Cochest. Pengukuhan jabatan tersebut mengambil pernyataan Injil Lukas 10 ayat 9 yang berbunyi: ". . . dan sembuhkanlah orang sakit di situ, serta katakan padanya Kerajaan Allah sudah dekat denganmu". Dengan bekal ayat ini berangkatlah dokter JG. Scheurer sebagai utusan *Nederlandsche Zendingvereninging* ke Indonesia untuk ditempatkan di Jawa Tengah.

Pelayaran ke Indonesia dilakukan pada 13 Mei 1893 bersama seorang pemuda Jawa bernama Yoram. Perjalanan memakan waktu selama satu setengah bulan. Pada 27 Juni 1893 mereka tiba di Batavia. Mereka berdua merupakan orang-orang pertama yang membangun bidang kesehatan dari Zending dan telah menghasilkan apa yang dikenal sebagai Rumah Sakit Bethesda.

Pada awalnya dokter Scheurer harus belajar bahasa Jawa di Surakarta. Izin bekerja sebagai dokter utusan datang dan dia

dipindahkan ke Yogyakarta. Di kota ini ia bertempat tinggal di sebuah rumah sewa yang terletak di Jalan Bintaran. 17 Maret 1897 merupakan awal kerjanya saat mendirikan rumah darurat dari bambu di samping rumahnya untuk tempat praktek pengobatan. Bangunan ini selesai pada bulan Juni 1897. Digantungkannya sebuah papan bertuliskan, "Gusti Yesus Poenika Djoeroe Wiloedjeng Sedjatos". Mulailah kerja yang akan dicatat oleh sejarah sebagai gerak perkembangan agama Kristen di daerah Kota Yogyakarta.

Pada 1 Juli 1897 poliklinik sederhana itu dibuka dengan pemuda Yoram sebagai pegawainya.<sup>44</sup> Tidak ada upacara pembukaan dan tidak ada pesta, yang ada hanya semangat kerja dan cinta-kasih untuk mereka yang menderita serta memerlukan perawatan kesehatan. Pada bulan-bulan pertama orang yang datang ke poliklinik untuk berobat antara 10--15 orang. Hanya dalam waktu satu setengah tahun yang datang berobat tercatat sebanyak 15 367 orang. Selama itu dr. JG. Scheurer telah berhasil menjalankan operasi dengan *narcose* sebanyak 12 kali hanya dengan peralatan sederhana dan di atas meja makan.

Kebutuhan akan ruangan dalam perawatan orang-orang sakit semakin terasakan. Terpaksa direncanakan membangun sebuah rumah sakit dengan kapasitas 150 tempat tidur. Berbagai instansi membantu keinginan dr. Scheurer ini, khususnya dari Sri Paduka Sultan Hamengkubuwono VIII. Sebidang tanah di daerah Gondokusuman, seluas 30.000 meter persegi dihadiahkan.<sup>45</sup> Tanah ini sebelumnya merupakan kebun tebu milik *Onderneming Muja-muju* Sultan memberikan ganti kepada perkebunan tebu Muja-muju untuk menempati daerah lain. Saat itu, tanah yang akan dipakai sebagai bangunan rumah sakit berada di luar dari apa yang disebut Kota Yogyakarta.

Pada 20 Mei 1899 peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit dilakukan oleh anak dr. Scheurer. Simbolisme ini melambankan keinginan sang dokter agar cita-citanya diteruskan oleh anaknya. Pada 1 Maret 1900 dapat diselesaikan dua *zaal* untuk merawat penderita pria dan wanita. Pada 13 Maret

1900 ada 15 pasien yang dirawat di bangunan itu, di antaranya seorang wedana dari Madiun yang harus dioperasi. Kehadiran wedana ini ternyata cukup memberikan arti bagi rumah sakit. Masyarakat lebih mengharapkan berperannya rumah sakit ini khususnya bagi mereka yang tinggal di Kota Yogyakarta. Ada kaitan kehadiran seorang pejabat di rumah sakit sebagai pasien dengan pengharapan dan kepercayaan masyarakat yang semakin besar atas usaha-usaha di bidang kesehatan masyarakat dari Zending. Pembangunan rumah sakit berjalan terus dan bantuan terus mengalir. Pengawasan pembangunan dan perencanaan pembangunan dikerjakan secara cuma-cuma oleh Stegerhoek dan Stuur. Di samping itu dana berupa uang sebesar 10.000 dan 5.000 gulden diperoleh dari seorang pensiunan pendeta bernama Coeverden Andriani. Permintaan sang pendeta yaitu, agar rumah sakit ini diberi nama "Petronella" sebuah nama dari istrinya yang dicintainya.

Perkembangan rumah sakit yang berawal dari poliklinik di Bintaran kini telah memiliki tiga *zaal* laki-laki dan dua *zaal* wanita hanya dalam waktu beberapa tahun. Nama yang diberikan untuk rumah sakit yakni *Zendingsziekenhuis Petronella*. Masyarakat waktu itu mengenalnya sebagai "Dokter Pitulungan" atau "Dokter Tulung".

Tahun 1904 ruwat perawatan penderita penyakit kusta dan orang-orang miskin milik kesultanan yang terletak di daerah Tungkak, diserahkan kepada *Petronella* untuk dipergunakan sebagai tempat merawat penderita yang tidak memerlukan pengawasan dan pengobatan secara kontinyu di bawah bimbingan dokter. Setelah dipugar, rumah sakit ini dapat menampung dan merawat 50 orang pasien dan akhirnya dijadikan rumah sakit pembantu Tungkak yang merupakan cabang dari *Petronella Hospital*.

Rumah sakit pembantu di Tungkak pada awalnya diserahkan di bawah pengawasan seorang pimpinan bernama mas Mandor Sambiyo. Julukan semacam di atas bertahan hingga tahun 1925. Selanjutnya oleh pihak kesultanan, di sebelah

selatan rumah sakit pembantu Tungkak itu dibangun sebuah tempat untuk penampungan orang-orang miskin atau gelandangan. Penyelenggaraan dan pengawasan diserahkan kepada rumah sakit pembantu Tungkak ini, tak terkecuali masalah makan mereka.

Tugas dr. Scheurer begitu banyak, selain mendidik tenaga perawat kesehatan juga berdialog dengan para pasien tentang "kasih Allah". Para perawat kesehatan umumnya belum memiliki ijazah. Syarat diterima sebagai perawat kesehatan adalah mereka yang pernah dirawat dan harus penuh cinta-kasih terhadap sesamanya. Kerja keras dan udara tropis yang bertahun-tahun tidak dihiraukan suatu waktu harus diperhitungkan juga. Hal ini terjadi pada diri dr. Scheurer. Tahun 1906 beliau terserang penyakit beri-beri yang melemahkan badannya. Ia harus meninggalkan Indonesia dan kembali ke Negeri Belanda. Pekerjaan yang telah digelutinya selama bertahun-tahun harus ditinggalkan. Penggantinya ditunjuk dr. HS. Pruys. Semula beliau adalah dokter militer dan pembantu dr. Scheurer. Pergantian hanya bersifat sementara, tetapi rupanya penyakit yang diderita dr. Scheurer tidak pernah sembuh sehingga pimpinan Rumah Sakit Petronella tetap dipegang oleh HS. Pruys hingga tahun 1918. Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta maupun pemerintah daerah dan pusat, dituntut sekali lagi kerja keras. Hasilnya, dana mengalir dari Pemerintah Daerah Yogyakarta dan pabrik-pabrik gula untuk membangun rumah sakit pembantu di sekitar daerah Yogyakarta.

Pendidikan untuk para juru rawat semakin diintensifkan dan untuk pendidikan jenis ini diterbitkan buku pelajaran dalam bahasa Jawa. Pendidikan di bidang kebidanan mulai dirintis. Selama bertugas di Rumah Sakit Petronella, dr. HS. Pruys tidak pernah mengambil cuti ke Negeri Belanda. Pada tahun 1918 harus meninggalkan kerja yang dicintainya karena menderita sakit. Ditunjuk sebagai pengganti adalah dr. J. Offringa<sup>46</sup> yang sejak tahun 1912 telah mendampingi dr. HS. Pruys.

Kebaikan dari pimpinan dr. J. Offringa membuahkan semakin banyaknya orang-orang yang membutuhkan perawatan kesehatannya datang ke Rumah Sakit Petronella.<sup>47</sup> Bantuan tidak hanya datang dari dalam kota tetapi juga datang dari luar kota seperti Boyolali, Salatiga, Delanggu, Klaten, Kutoarjo, yang pada umumnya pernah menjadi pasien rumah sakit ini dan menyatakan terima kasih dengan memberikan sumbangan material. Kesulitan merupakan hal yang harus dapat diatasi, seperti kurangnya bahan makanan di masyarakat dan epidemi yang silih-berganti menjadikan kerja Zending yang dikaitkan dengan kesehatan masyarakat membuahkan banyak pengikut di berbagai daerah tak terkecuali di sekitar Kota Yogyakarta. Kesemuanya jelas berkata, "kepercayaan dan doa kepada Tuhan Allah", berbagai kesulitan itu dapat diatasi.

Keramahtamahnya sangat terkenal di antara para penderita. Hal ini jelas berkaitan dengan pesan-pesan sebelum tahun 1912 dari dr. Scheurer yang selalu diingatnya, "*Naar Javaan, gaan goed, naar dan moot je minder zijn dan de minste Javaan*". Banyaknya pasien yang berobat ke Petronella menjadikan perlunya penambahan ruangan atau perluasan rumah sakit ini. Tahun 1920 dr. J. Offringa mengajukan rencana kepada *Gereformeerde kerken in Nederland* di Amsterdam untuk memperbesar *Petronella Hospital* agar dapat menampung 500 pasien. Rencana ini diterima oleh *gereformeerde Kerken in Nederland*, bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII memberikan tanah yang luas membujur ke barat dan berbatasan dengan Jalan Bedog, serta di bagian selatannya dengan *Militaire Hospital*. Tahun 1924 pembangunan dimulai dan selesai pada tahun 1925. Bantuan ini didapatkan tidak saja dari pemerintah daerah dan pusat tetapi juga dari pabrik-pabrik gula, *onderneming-onderneming* tembakau, perusahaan kereta api *de Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij*. Selesaiannya pembangunan gedung baru itu tepat juga 25 tahun usia rumah sakit ini sejak peletakan batu pertama pada 20 Mei 1899. Rumah seorang pangeran yang bernama Gondokusumo dibeli dan dipergunakan

sebagai asrama putri. Letaknya tepat di sebelah barat *Petronella Hospital*.

Tahun 1926 dibeli sebuah rumah di Jalan Lempuyangan. Setelah diperbaiki, dipergunakan sebagai klinik bersalin. Rumah sakit bersalin ini dikepalai oleh Suster Enserinok. Tahun 1928 suster ini meninggal dunia dan diganti oleh Suster J. Prins. Hingga kini masyarakat umum mengenal klinik bersalin cabang *Petronella Hospital* ini sebagai klinik *Suster Prins*.

Bertambahnya pasien serta perluasan bangunan ternyata juga mengharuskan semakin teraturnya kegiatan administrasi rumah sakit ini. Untuk hal itu, pekerjaan dalam bidang administrasi dipercayakan kepada seorang akuntan negeri bernama L. Gogzen. Sebuah mesin penghitung pembukuan merek *National Cash Register* dibeli seharga 10.000 gulden. Pemeriksaan kas dilakukan oleh kepala kantor.

Semua perawat yang tadinya mendapat julukan *mandor*, setelah tahun 1925 berubah menjadi *pak* atau *den mantri*. Hal ini bermula dari mantri *verpleeger* atau *ster*. Semua perawat yang menuntut pendidikan dan memiliki ijazah dari ujian negeri disebut *mantri verpleeger* untuk golongan pria dan *mantri verpleegster* untuk golongan wanita. Sebelum ujian negeri berlaku, Rumah Sakit *Petronella* mengadakan ujian sendiri bagi perawat medis tersebut. Mengapa terjadi perubahan sistem ujian bagi perawat? Ternyata hal ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru tentang pemberian subsidi atau permintaan subsidi. Bagi rumah sakit yang menghendaki subsidi pemerintah diwajibkan melampirkan daftar nama para juru rawat yang telah lulus dalam ujian negeri. Sejak tahun 1926 *Petronella Hospital* menyelenggarakan ujian mantri *verpleeger* yang pertama di hadapan panitia ujian negeri untuk urusan kesehatan yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan (*Dienst der Volksgezondheid*). Pengikut ujian negeri pertama ini diikuti oleh mereka yang telah memiliki masa kerja sekitar 15 -- 20 tahun lebih.

Tahun 1930, dr. J. Offringa dipanggil oleh pemerintah untuk menjabat sebagai kepala Dinas Kesehatan (*Hoofd van den Dienst der Volksgezondheid*), dan berakhir masa dinas beliau sebagai pimpinan *Zendingsziekenhuis Petronella*.

Sebagai penggantinya ditunjuk dr. KP. Groot, yang sebelumnya memimpin *Zendingszuikenhuis Surakarta*.<sup>48</sup> Bertepatan dengan pergantian pimpinan Rumah Sakit Petronella ini, tahun 1930 merupakan awal krisis ekonomi. Penghematan di segala bidang harus dilakukan. Tahun 1932 diberlakukan peraturan gaji baru yakni mengurangi sebanyak 10% dari gaji lama untuk para pegawainya. Pegawai yang tidak cakap diberhentikan atau dipindah ke tempat yang lain. Kegiatan poliklinik *auto's* yang semula diadakan untuk melayani masyarakat pedesaan ditiadakan. Ternyata penghematan ini juga tidak banyak menolong. Hal ini terbukti dari sikap beberapa pabrik gula. Semula mereka membiayai secara nyata tetapi krisis ekonomi tidak dapat ditolerir sehingga bantuan biaya untuk Petronella Hospital juga harus dikurangi sebanyak 25% setiap tahun. Akibatnya beberapa cabang rumah sakit ini hanya tinggal merupakan poliklinik. Usaha dr. KP. Groot untuk mengatasi kesulitan keuangan ialah dengan jalan menaikkan pungutan bagi orang-orang yang berobat ke rumah sakit ini dan mengedarkan sumbangan dalam berbagai bentuknya. Tahun 1934 dibangun *zaal* klas satu dengan golongan mampu dengan memakai sebagian dana pensiunan.

Tahun 1939 Eropa terlibat dalam Perang Dunia II. Negeri Belanda tak luput juga. Akibat didudukinya Negeri Belanda oleh Jerman, tertutuplah bantuan untuk *Petronella Hospital*. Menghebatnya perang dunia kedua juga melibatkan kesiagaan golongan penduduk Eropa di Indonesia. Tahun 1941 pemerintah memerintahkan Petronella Hospital supaya mempersiapkan rumah sakit darurat di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Diperlukan 4 000 tempat tidur dari kayu jati yang dapat dilipat komplut dengan kasur, bantal, sarung, sprengi dan pakaian orang sakit, hingga piring, senduk dan perlengkapan dapur. Jangka



waktu yang pendek, harus juga disiapkan obat-obatan dan bahan makanan yang tahan lama. Jawatan gedung-gedung negeri, membangun rumah sakit darurat di sekitar Pingit<sup>49</sup> dengan kapasitas 500 pasien. Di Rumah Sakit Panti Rapih dan Rumah Sakit Mata dr. Yap, dibangun beberapa *zaal* dengan perlengkapan yang memadai. Pendidikan juru rawat diperbanyak. Tugas semacam ini diserahkan kepada *Petronella Hospital*, sedangkan biayanya ditanggung oleh pemerintah. Akhirnya persiapan dapat selesai tepat pada waktunya.

Perang Asia Timur Raya berkobar dan pada akhir bulan Desember 1941 korban-korban peperangan mulai berdatangan, kebanyakan serdadu Amerika. Sebelumnya, telah ada persetujuan antarkomandan tentara Amerika dan dr. KP. Groot untuk mengatasi korban perang ini. Tentara Amerika yang luka dan membutuhkan perawatan dapat dirawat di rumah sakit ini, para perwira menempati bagian klas, sedangkan para bintangara di bagian *zaal*. Membanjirnya jumlah korban peperangan mengharuskan semua penderita yang dirawat di *Petronella Hospital* harus dipindahkan ke rumah sakit darurat di Pingit, kecuali bagi mereka yang harus dioperasi.

Tahun 1942, Jawa berhasil diduduki pemerintahan militer Jepang, Yogyakarta tak luput dari hal ini. Sebelum itu semua tentara Amerika yang dirawat di *Petronella Hospital* berhasil dipindahkan ke tempat lain. Kerugian yang diderita oleh *Petronella Hospital* akibat perang ini adalah diambilnya Rumah Sakit Pingit beserta perlengkapan oleh tentara pendudukan ini. Berakhirlah pimpinan yang dipegang oleh dr. KP. Groot. Untuk sementara pimpinan dipegang oleh dr. LGJ. Samalo hingga beberapa bulan.

Semenjak datangnya beberapa dokter dan dua perawat wanita ke rumah sakit ini praktis rumah sakit telah dikuasai pemerintahan pendudukan. Digantilah nama *Petronella Hospital* menjadi *Jogjakarta Tjuo Bjoin*. Berakhirlah azas dan nama *Petronella Hospital*. Harus mulai merintis kembali napas

rumah sakit Kristen. Masa-masa itu merupakan kemunduran yang hebat, semua rumah sakit pembantu dan berbagai poliklinik dikuasai oleh pemerintah daerah.

Kemerdekaan tiba juga. Akhirnya pada 25 September 1945, beberapa dokter Indonesia dan para kepala bagian mengadakan rapat. Rapat memutuskan bahwa rumah sakit *Jogjakarta Tjuo Bjoin* harus kembali ke azas semula, yakni rumah sakit Kristen yang dikelola oleh swasta. Putusan rapat ini diajukan ke rapat umum pada 26 September 1945, pukul 08.00. Keputusan disepakati secara bersama kembali ke azas semula. Pada awalnya Pemerintah Jepang enggan menaati permintaan ini, setelah diancam dengan akan dilakukan tindak kekerasan, baru diserahkan. Akhirnya secara aklamasi disepakati bahwa rumah sakit ini akan dipimpin oleh dr. LGJ. Samalo (direktur), dr. JO. Ricauly (wakil direktur), Foertanus (kepala kantor), dan R. Soetoyo (kepala perawat). Rupanya 26 September merupakan hari bersejarah bagi bekas Rumah Sakit Petronella. Hari itu juga nama rumah sakit berganti menjadi *Rumah Sakit Pusat*. Bantuan untuk mengembalikan nama "dokter tulung" harus dicari kembali. Setelah pemerintahan berjalan, melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bantuan diberikan kepada Rumah Sakit Pusat ini. Selama subsidi belum diterima, rumah sakit menyediakan pelayanan cuma-cuma kepada para pasien yang tidak dapat membayarnya.

Tahun 1948, kembali rumah sakit yang telah banyak mengalami perubahan zaman diuji kembali. Tentara kerajaan Belanda menyerbu Yogyakarta, rumah sakit mengalami kekurangan biaya karena semua instansi pemerintah tidak berjalan alias ditutup. Gaji untuk para pegawainya terpaksa ditunda, begitu juga untuk membeli perlengkapan obat-obatan. Bantuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberikan arti tersendiri. Sokongan pribadi berupa uang. Setelah Belanda meninggalkan Yogyakarta, berbagai kesukaran masih dialami oleh rumah sakit ini. Banyak usaha dan tawaran dari berbagai pihak ditolak. Rumah sakit pusat harus kembali menjadi rumah

sakit Kristen. Akhirnya dalam rapat 28 Juni 1950 diputuskan agar masyarakat umum mengetahui bahwa rumah sakit pusat itu rumah sakit Kristen, dan namanya diganti menjadi Rumah Sakit *Bethesda*. Sejak saat itu kepengurusannya diserahkan kepada swasta. Terjadi sekali lagi pemindahan kekuasaan pimpinan rumah sakit, dr. LGJ. Samalo yang telah menjadi dokter negeri harus menyerahkan jabatannya kepada dr. Kasmolo Paulus. Urutan direktur Petronella Hospital (Rumah Sakit Bethesda) sejak tahun 1897 adalah: dr. JG. Scheurer (1897 – 1906), dr. HS. Pruys (1906 – 1918), dr. J. Offringa (1918 – 1939), dr. KP. Groot (1930 – 1942), dr. LGJ. Samalo (1942 – 1945 = zaman Jepang), LGJ. Samalo (1945 – 1949), dan dr. Kasmolo Paulus (1949 – 1957).

### 2.2.3 Agama Islam

Ajaran agama Islam masuk ke dalam kehidupan masyarakat Jawa pada masa pertumbuhan dan perluasan Kerajaan Hindu Majapahit<sup>50</sup>. Sejalan dengan adanya kontak-kontak perdagangan dari para pedagang Islam India terjadi proses pengislaman. Mengapa kini dari proses kontak itu gambaran terhadap para penganut masih kurang dalam pengetahuan doktrin-doktrin Islam pada abad ke-16?<sup>51</sup> Kontak di pedalaman Jawa dengan negara-negara Islam di luar daerahnya relatif masih sangat terbatas. Hegemoni Belanda merupakan salah satu alasan mengapa Islam di Jawa mengalami kelambatan penyesuaian sebagaimana di tempat asalnya. Kehadiran perusahaan dagang Hindia Belanda (VOC) yang pada gilirannya mampu mengembangkan kekuasaannya atas bidang kehidupan ekonomi dan politik di dua pertiga dari seluruh wilayah daerah Jawa<sup>52</sup>, berakibat kehidupan agama ini yang selaras dengan jalur perdagangan juga mengalami hambatan. Menurut Raffles<sup>53</sup>, kegiatan Belanda itu tidaklah semata-mata berdasarkan konsep penyebaran agama Kristen, tetapi lebih jauh ke bidang masyarakat Jawa untuk kelangsungan ekonomi dan politik pemerintahan Belanda.

Masalahnya kini, apakah dengan pembatasan gerak yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda<sup>54</sup> kepada perorangan atau kelompok atas kegiatan keagamaan juga membawa akibat yang mendasar bagi proses persebaran agama Islam itu sendiri di pedalaman Jawa? Atas gejala kehidupan masyarakat waktu lampau, hal-hal ini dapat dipertanyakan kembali akibatnya bagi orang banyak dalam penghayatan keagamaan itu. Kegiatan ritual yang lama bukanlah lebih dominan dalam kehidupan masyarakat yang senyatanya ?

Pengokohan kehidupan ritual yang lama lebih dapat dikatakan sejalan dengan pengokohan kekuasaan tradisional itu sendiri. Hal semacam ini akan lebih dapat terpahami manakala melihat proses islamisasi di Jawa dalam kerangka global. Agama Islam ternyata menyebar ke masyarakat Jawa dengan proses yang tidak mudah, penuh tantangan dan bertahap<sup>55</sup> Tahapan awal yang bermula, pada awal abad ke-15 sampai abad ke-16. Pengislaman hanya dalam bentuk kuantitasnya, belum segi-segi kualitas<sup>56</sup>. Tahap selanjutnya pemantapan yang bertahap untuk mengganti kepercayaan lama tetapi berakhir dengan terpotongnya kedatangan bangsa-bangsa Eropa sehingga mengalami "kekurangsempurnaan". Mengapa hal itu dapat terjadi? Donald K. Emmerson<sup>57</sup> mengatakan:

"Sejauh Islam dianggap anti kolonial, kaum priyayi lebih cenderung untuk mengembangkan pola kehidupan keagamaan yang lebih bersifat kejawan dari pada memilih menjadi santri. Ketakutan Belanda kepada orang-orang yang sangat condong kepada Islam mempengaruhi struktur dan kesempatan dalam administrasi kepegawaian pribumi; pada waktu seorang patih yang dilaporkan menghina Islam oleh Belanda dinaikkan pangkatnya menjadi bupati, maka hal itu jadi pelajaran yang jelas bagi teman-temannya."

Kutipan di atas menunjukkan secara nyata bagaimana sebenarnya posisi seseorang ditentukan oleh batas dirinya dengan jarak pemahaman agama yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupannya itu. Kenyataan seperti ini lebih merupakan gambaran yang nyata atas simbol-simbol kekuasaan seperti "sultan" yang

telah mengalami degradasi arti yang tersymbol di dalamnya. Akankah diingkari jika akhirnya dinamika ajaran agama Islam juga semakin kehilangan "elan vital"-nya. Saat penguasa daerah seperti sultan pada abad ke-18 dan 19 tidak begitu berambisi meningkatkan pengetahuan dan ketaatan pendudukan terhadap ajaran agama Islam seperti semasa pemerintah Kesultanan Demak dan Pajang? Untuk Yogyakarta, tak terkecuali. Kekuatan politik di kota-kota yang telah diambil alih penguasa kolonial Belanda ternyata juga membatasi aktivitas Islam sebagai sebuah kekuatan utuh dari gambaran sosial, politik atau kultural, masyarakat yang beragama Islam. Menurut Zamakhsyari Dhofier<sup>58</sup>, penyebab semacam di atas menjadikan kekuatan Islam lebih berada di pedesaan. Hal ini juga berlaku di sekitar daerah Yogyakarta hingga awal abad ke-20.

Bukan maksud mengecilkan arti dan sumbangan agama Islam untuk terjadinya pengertian mobilitas sosial di Kota Yogyakarta. Hal semacam ini harus dikemukakan mengingat terbatasnya kemampuan jangkauan berbagai sumber yang ada tentang peranan Islam dalam kehidupan masyarakat kota ini. Jika ada tentang berbagai sumber yang membicarakan agama Islam, tak dapat diingkari lebih merupakan gambaran dari kehadiran "Islam Muhammadiyah" yakni suatu gerakan sosial keagamaan yang muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat pada awal abad ke-20 di Kota Yogyakarta.

Untuk itulah uraian dalam sub bab tentang agama Islam, fokus pembicaraan akan lebih dilibatkan terhadap organisasi ini, minimal pada awal pergerakannya kesemuanya bersumber dari ketidakpuasan para pemimpinnya atas kehidupan agama Islam ini cukup memberikan alasan yang kuat bagi tinjauan perkembangan dan kehadiran organisasi keagamaan Islam yang bernama Muhammadiyah<sup>59</sup>. Berawal dari Yogyakarta perkembangan ini menyebar ke berbagai daerah di luar batas wilayah Kota Yogyakarta dan pada gilirannya membawa sikap-sikap tertentu bagi para anggotanya dalam menatap kehidupan sehari-hari dalam lingkungannya. Akankah diingkari jika pada awal-

nya pendirian sekolah-sekolah yang dikelola oleh organisasi Muhammadiyah ini bermula hanya dari lingkungan kerabat dekat pencetus ide dan dari warga Kampung Kauman, Yogyakarta akhirnya menjadi suatu kekuatan yang mampu mengadakan suatu bentuk perubahan kehidupan ?

Kelahiran organisasi Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari gambaran perjalanan hidup Mohammad Darwis, yang kelak berganti nama menjadi Achmad Dahlan. Ia merupakan anak keempat dari Kiai Haji Aboebakar bin KH. Sulaiman, seorang khotib mesjid besar Kesultanan Yogyakarta. Darwis melakukan pengembaraan jasmani maupun rohani<sup>60</sup> ke berbagai tempat lembaga pengetahuan Islam di luar Indonesia<sup>61</sup>, dan pada tahun 1905 kembali ke Indonesia<sup>62</sup>. Ia mengganti namanya sebagai seorang muslim yang telah kembali dari Mekkah, dan menerjunkan dirinya ke pergerakan kemasyarakatan dan keagamaan. Di samping menjadi pengurus Boedi Oetomo kring Kauman, beliau juga menjadi *adviseer* Serikat Islam, serta anggota *Djamijah Chorijah Jakarta*<sup>63</sup>.

Perkembangan agama Islam dalam lingkungan masyarakat dinilai begitu lamban dan senantiasa berada dalam "zaman Jahiliah"<sup>64</sup>. Harus ada perubahan ke arah dinamisasi umat. Sebagai khotib mesjid besar kesultanan dengan gelar "Ketib Amin" persoalan kehidupan umat Islam dapat ditangkap secara jelas, bahwa dibutuhkan suatu "kegairahan kehidupan" dalam ajaran Islam jika agama ini tidak ingin menghadapi kemandegan-kemandegan atas berbagai persoalan kemasyarakatan<sup>65</sup>.

Uraian di sini tidak akan mengetengahkan gambaran Achmad Dahlan secara rinci, karena telah banyak orang baik sarjana asing maupun dalam negeri yang melakukan studi kemasyarakatan di lingkungan Kota Yogyakarta menyinggung apa yang mau diuraikan. Disadari bahwa uraian semacam di atas hanya lebih merupakan "gambaran pengulangan", maka di sini pun pengisahan tentang organisasi ini hanya menyangkut masalah yang dianggap relevan dengan apa yang ingin dibahas.

Beberapa tindakan yang cukup bernilai untuk diuraikan dari pribadi Achmad Dahlan adalah, keinginannya untuk member-sihkan atau tepatnya memurnikan ajaran Islam kepada landasan pokok tuntunan *Al Qur'an* dan *Hadist* di samping keinginannya untuk memperbaiki pendidikan dan pengajaran serta penyebar-an kebudayaan Islam dalam masyarakat. Semangat *Ukhuwah Islamiyah* dihidupkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan ma-salah sosial, ekonomi dan politik, yang pada garis besarnya ke semua itu berguna untuk menghadapi aktivitas dari agama Kristen dan Katolik di masyarakat<sup>66</sup>.

Perlawanan atas ide-ide yang dikembangkan oleh Achmad Dahlan tidak hanya datang dari luar kelompoknya seperti dari kelompok Zending dan Missi, tetapi juga datang dari kelompok Islam<sup>67</sup>. Hal ini terjadi saat keinginannya untuk membenarkan kiblat shalat dengan serong ke arah utara. Biasanya shalat meng-hadap lurus ke barat.

Kelahiran organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912, pada dasarnya memberikan suatu koreksi atas dunia Islam sendiri di Kota Yogyakarta. Para penganjur gerakan organisasi ini bermula hanya dalam lingkaran kecil, dan mereka adalah: Abdullah Sirat, Haji Achmad, H. Abdurrachman, RH Sarkowi, H. Muhammad, RH Djaelani, H. Anies dan RH Fekih<sup>68</sup>. Izin berdiri pada mulanya hanya oleh pemerintah kolonial untuk lingkungan dalam Kota Yogyakarta. Kebangkitan gerakan orga-nisasi keagamaan ini dijiwai oleh semangat Surat Ali Imron ayat 104<sup>69</sup> yang bermakna, "Bangunlah di antara kamu umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan memerintahkan untuk berbuat baik, serta melarang berbuat jahat. Umat yang demikian itulah umat yang berbahagia".

Pengikut Muhammad yang berkumpul dalam organisasi Muhammadiyah menyadari bahwa gerakan itu lebih bersifat<sup>70</sup>:

- (a) Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan
- (b) Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islami-yah

- (c) Lapang dada luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam
- (d) Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah
- (e) Amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang serta menjadi contoh yang baik
- (f) Kerjasama dengan setiap golongan Islam dalam usaha menyiarkan dan menegakkan agama Islam serta membela kepentingannya
- (g) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan
- (h) Membantu pemerintah dan bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridloi Allah swt.
- (i) Aktif dalam masyarakat dengan maksud Islam dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam
- (j) Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana

Hal di atas kemudian melahirkan pandangan yang utuh atas kerja di dalam organisasi ini Akhirnya dalam beberapa saat saja, gerakan keagamaan ini mampu memberikan andil yang nyata terhadap gerak perubahan masyarakat Kota Yogyakarta. Pendidikan dan sarana kesehatan yang dikelolanya merupakan rangkaian kerja nyata atas ide-ide yang pernah muncul pada awal abad ke-20. Proses selanjutnya menunjukkan bahwa ide-ide yang telah direalisasikan itu sebagai wadah gerakan umat Islam di Kota Yogyakarta mampu bersaing dan sejajar dengan Missi atau Zending untuk memajukan masyarakat.

Proses perkembangan organisasi Muhammadiyah ke seluruh Indonesia pada dasarnya melalui dua jalan. Pertama, organisasi ini tersebar secara organisatoris atau kelembagaan resmi melalui berdirinya cabang-cabang serta ranting-rantingnya. Kedua, terse-



bar sebagai paham atau ajaran tentang kemurnian Islam di kalangan umat Islam Indonesia<sup>71</sup>.

Meski penekanan atas usaha Muhammadiyah tidak pada banyaknya cabang-cabang dan ranting-ranting yang berdiri tetapi bagaimana paham dan cita-cita semula dapat tersebar luas di masyarakat<sup>73</sup>. Disadari secara utuh oleh para pendukungnya, bahwa organisasi Muhammadiyah adalah alat bukan tujuan, yakni alat untuk berdakwah, berjuang serta beramal dalam strategi menjunjung keluhuran agama Islam<sup>73</sup>.

Usaha yang dikerjakan oleh KH. Achmad Dahlan memiliki nilai tersendiri, yakni sebagai pelopor usaha bidang pendidikan pribumi yang diusahakan sendiri dan bersifat "moderen". Kalau sebelum awal abad ke-20 pendidikan pribumi yang berkaitan dengan ajaran Islam lebih berfokus ke lembaga-lembaga pesantren<sup>74</sup>, dalam periode 1900an pendidikan yang dilahirkan oleh Muhammadiyah lebih berorientasi pada kata, "membentuk intelektual ulama dan ulama intelektual".<sup>75</sup>

Keberhasilan dari usaha yang dirintis oleh beberapa pemuka Islam dengan tokoh sentralnya KH. Achmad Dahlan, dapat terlihat juga bagaimana sistem kegiatan Missi direduksi menjadi suatu kegiatan kepanduan yang bernama *Hisbul Wathan*<sup>76</sup>. Berbagai kegiatan yang menyingkup dan menggerakkan organisasi ini semakin terkenal di masyarakat, tak lain karena ikatan dari ketujuh lembaga yang ada di dalamnya dan biasa disebut sebagai Majelis, seperti: Majelis Pendidikan dan Pengajaran, Majelis Tatjih Lembaga Hukum Islam, Majelis Hikmah (Lembaga Kebijaksanaan), Majelis Penolong Kesengsaraan Umum (PKU), Majelis Ekonomi, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, dan Majelis Da'wah.

Beberapa organisasi yang otonom seperti Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada dasarnya memberikan gambaran yang nyata bagaimana ide-ide perkembangan gerakan keagamaan ini semakin hari se-

makin memantapkan diri melalui berbagai bidang kegiatan masing-masing.

Muhammadiyah sebagai sebuah perkumpulan yang selalu berusaha untuk menyempurnakan bidang pendidikan masyarakat, membantu orang miskin, menolong orang sakit dan segala pekerjaan sosial yang menjadi keperluan masyarakat sehari-hari pada dasarnya dituntut oleh ajaran-ajaran agama Islam<sup>77</sup>. Sebelum berbicara tentang peranan pendidikan yang telah dilakukannya dan yang akan terangkum dalam bab III, ada baiknya jika diketahui juga awal terbentuknya dan perkembangan dari balai kesehatan organisasi Muhammadiyah yang kini bernama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, yang terletak di sebelah barat Kantor Pos Yogyakarta.

Menurut sejarahnya, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah<sup>78</sup> yang didirikan pada 15 Februari 1923 adalah lanjutan dari organisasi Penolong Kesengsaraan Umum. Organisasi ini didirikan pada tahun 1918 untuk menolong meringankan korban akibat letusan Gunung Kelud. Organisasi ini memang didirikan oleh beberapa *person* pimpinan Muhammadiyah, dan masuk ke dalam lingkup Muhammadiyah semenjak tahun 1921, ikut berperan dalam menolong korban kebakaran yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Sejak didirikan pertama kali masih berupa klinik dengan kapasitas untuk merawat orang sakit sebanyak 10 orang. Letak poliklinik ini di Jalan Notoprajan dengan luas kurang lebih 150 meter persegi. Tahun 1928 -- 1935 pindah ke Jalan KHA. Dahlan No. 12b secara sewa dan pada saat itu kapasitas penampungan bagi penderita telah mencapai 70 pasien. Tahun 1936 kembali pindah tempat ke jalan yang sama tetapi nomor 14. Tempat ini merupakan hasil pembelian seharga 5.600 gulden atas nama H. Abdul Hamid. Kapasitas untuk menampung pasien sebanyak 75 orang.

Struktur organisasi rumah sakit ini yang merupakan proyek PP Muhammadiyah, menjadikan pimpinan tertinggi berada di

tangan PP Muhammadiyah, pimpinan pusat ini menunjuk pengurus untuk mengelola. Pengurus menunjuk direksi untuk melaksanakan dan mengemudikan rumah sakit dengan dibantu oleh bagian tata usaha, bagian rumah tangga, bagian keuangan, bagian medis, bagian kerohanian, dan bagian pendidikan<sup>79</sup>. Kenyataan perkembangan yang bermula dari beberapa orang saja, pada akhirnya memberikan suatu gambaran bahwa adanya hubungan pribadi di antara masing-masing *person* lebih memudahkan kerjasama antarorganisasi Penolong Kesengsaraan Umat dengan pusat pimpinan Muhammadiyah sendiri, dan merupakan kerja nyata yang dapat dinikmati oleh warga Kota Yogyakarta. Namun demikian benarkah kehadiran PKU ini pada dasarnya hanya atas prakarsa para pimpinan, tanpa ada faktor lain yang menjadikan beberapa *person* pimpinan itu bergairah ?

Pertanyaan di atas hanya dapat dijawab dengan "kemungkinan" jika tidak terdapat sumber-sumber tertulis. Masalahnya kini dengan munculnya berbagai organisasi dari Zending dan Missi di lingkungan warga Kota Yogyakarta rupanya juga ikut merasakan bagi gerakan organisasi sejenis Muhammadiyah<sup>80</sup>. Sikap toleransi yang ditunjukkan oleh organisasi ini di dalam kehidupan sehari-hari disertai pengabdian yang sungguh-sungguh dari para pimpinannya menjadikan organisasi ini cepat mendapat pendukung. Tahun 1925 organisasi ini telah memiliki cabang sebanyak 29 dengan anggota sebesar 4000 orang<sup>81</sup>.

Kongres silih-berganti setiap kali memberikan hasil keputusan untuk kemajuan organisasi ini. Terbentuknya Hisbul Wathan hingga didirikannya Majlis Tarjih atau keharusan memakai kerudung bagi guru-guru wanita di sekolah Muhammadiyah pada dasarnya semakin menjadikan organisasi ini memiliki kesatuan pikiran baik ke luar maupun ke dalam dari para pendukungnya.

## CATATAN

1. Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terjemahan Kusumanto (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981, hlm. 177–261).
2. D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, terjemahan Prajudi, jilid I (Djakarta: Pradnja Paramita, 1962) hlm. 94–96.
3. Arminus, "Heerendiensten en Misbruiken", *TNI*. VVI (1854), II, hlm. 256–257.
4. Suatu kelompok masyarakat yang tak dapat ditembus oleh kelompok lain. Lihat, Soedjito Sosrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa, suatu analisa* (Jogjakarta, Penerbit Karja, 1961), hlm. 2.
5. Isi memorandum itu: ". . . daerah-daerah taklukan harus memberi keuntungan materiil bagi Belanda, keuntungan yang memang telah menjadi tujuan penaklukannya", periksa: Sartono Kartodirdjo, "Politik Kolonial Belanda Abad 19 19", dalam *Lembaran Sejarah*, no. 1 (Yogya: Fakultas Sastra & Kebudayaan UGM, 1972), hlm. 1.
6. K.P.H. Notojudjo, *Hak Sri Sultan atas Tanah di Yogyakarta* (Yogya, 1975), hlm. 4–5.

7. Sistem ini berjalan dengan pengertian Ministerialis atau pemerintahan perwakilan yang dimulai sejak Amangkurat I memerintah.
8. G.P. Rouffaer, "Vorstenlanden", *Adatrechtbundels*, XXXIV ('s-Gravenhage, 1931), hlm. 7.
9. Daerah agraris, kepercayaan terhadap dewi kesuburan sangat menonjol. Dewi kesuburan merupakan "ibu" yang selalu menghidupi semua penduduk. Hal ini merupakan pandangan filosofis atas tanah induk, yang dalam gambaran femimin diwujudkan dalam pola sebuah desa yang dilingkari oleh pagar-pegar lengkap dengan jalur-jalur jalan seperti keraton dengan benteng dan jalur jalan yang berpola papan catur di tengah bangunan keraton terletak sumber penghidupan masyarakat, sebuah pesarean ageng dalam ruangan yang disebut *prabasuyasa* atau rumah yang bersinar terang. Prototipe bangunan ini di rumah desa adalah sebuah lumbung padi tempat bersemayamnya dewi kesuburan yang bernama Sri.
10. F.A. Sutjipto, "Beberapa Tjatatatan tentang Pasar-Pasar di Djawa Tengah", dalam: *Bulletin Fakultas Sastra & Kebudayaan UGM*, no. 3, 1970, hlm. 136-150.
11. F.A. Sutjipto, *Beberapa Aspek Kehidupan Priyayi Jawa Masa Dahulu* (Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM seri bacaan Sejarah Indonesia, no. 11), hlm. 1-2.
12. *Ibid.*, hlm. 3.
13. L.W.C. van den Berg, *De Inlandsche rangen en titels op Java en Madoera* ('s-Gravenhage, 1902), hlm. 2-4).
14. Soedjito Sosrodihardjo, *op. cit.*, hlm. 9.
15. Andre Beteille, *Social Inequality* (England: Penguin Books Ltd. 1969), hlm. 9-42.
16. Lihat pada, Emille Durkheim, *The Devision of Labour* (London: The Free Press, 1964).

17. Lihat masalah ini dalam berbagai karangan: T.S. Raffles, *History of Java*, jilid I (London: Black, Barbury and Allen, 1817), hlm. 312; J. Groneman, *Javaansche Rangen en Pa-joengs* (Jogjakarta, 1882), hlm. 1–12; J.J. Verwijk, "Nota over de staatsie en het govolg der Inlandsche Ambtenaren in de Gouvernementslanden op Java en Madoera", *TBG*, XVII, 1899, hlm. 452; *Staatblad*, no. 13, tahun 1824.
18. *Javaansche Meisjesspelen en Kinderliedjes* (Jogjakarta Java Institut, t.t.), hlm. 213–221, lihat juga, Hadisukatno, "Permainan Kanak-Kanak", dalam *Madjalah Budaja*, 1953, hlm. 20–27.
19. Lihat pada: Peter Ekeh, *Social Exchange Theory* (London: Heinemann, 1974).
20. Ki Soeratman, "Masalah Kelahiran Taman Siswa" dalam *Madjalah Poesara*, djilid XXV no. 1–2, bulan Djanuari – April, 1964, diterbitkan oleh Persatuan Taman Siswa, Jo-  
gjakarta, hlm. 34–43.; *Buku Peringatan Taman Siswa 30 Tahun, 1922–1952* (Jogjakarta: Panitia Peringatan Taman Siswa 30 tahun, 1952) hlm. 166–302.
21. Akira Nagazumi, *The Dawn of Indonesian Nationalism, The Early Years of the Boedi Oetomo, 1908–1918* (Tokyo: Institute of Development Economics, 1972), hlm. 91–198.
22. Ki Hadjar Dewantara, "Systeem Pondok dan Asrama itulah Systeem Nasional", *Waskita*, jilid I, no. 2, 1928. hlm. 39–43.
23. Lihat tentang sifat non Islam Taman Siswa, dalam Ruth McVey, "Taman Siswa and the Indonesian National Awake-ning", *Indonesia*, jilid IV, 1967, hlm. 128–149.
24. Untuk pembicaraan ini, lihat pada: H.J. de Graff, "Later Javanese Sources and Historiography", dalam Soejatmoko, et.al., *An Introduction to Indonesian Historiography* (Ithaca: Cornell University Press, 1965), hlm. 128; J.H. Meinsma (ed.) *Babad Tanah Djawi* (s-Gravenhage, 1941),

- hlm. 68 & 133; F.A. Sutjipto, "Penembahan dalam Sistem Titulatur Tradisional", *Bulletin Fak, Sastra & Kebudayaan UGM*, no. 1, 1969, hlm. 88.
25. Pengertian kontak kultural ini harus dilihat dalam kerangka perubahan sosio-kultural sebuah masyarakat. Lihat, Daniel Lerner, *Memudarnya Masyarakat Tradisional*, terjemahan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm. 38 - 49.
  26. H. Harta, "Acceleration in Social Change", dalam F. Allen, *Technology and Change*, (New York, 1957), hlm. 27.
  27. Lihat untuk selanjutnya tentang perkembangan Gereja Katolik di Kota Yogyakarta, di buku: *Sejarah Gereja Katolik Indonesia* (Ende-Flores: Percetakan Arnلودus, 1974), hlm. 860-866.
  28. *Ibid.*, hlm. 871.
  29. Gereja ini diresmikan tanggal 26 September 1926. Lihat, G. Moedjanto, dan kawan-kawan, *Sejarah Gereja Kotabaru Santo Antonius dan Kehidupan Umatnya* (Yogyakarta: Panitia Peringatan 50 tahun Gereja Antonius Kotabaru, 1976), hlm. 16. Lihat juga untuk perkembangan gereja-gereja dalam *Sint Claverbond Unitgave der P.P. Jezuieten, Ten bate Hunner Missie op Java, 1917 - 1940*.
  30. Untuk ini, lihat *Buku Kenangan Lima Puluh Tahun Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, 1929 - 1979* (Yogyakarta: Penerbit Panitia Pesta Emas P.S. Panti, 1979), hal. 33.
  31. *Ibid.*, hal. 36.
  32. *Ibid.*, hal. 36
  33. Abdul Syukur, *Berbagai hal Perubahan dari istilah sampai Nama Tempat di Beberapa Daerah Semasa Djaman Djepang* (Yogyakarta : Penerbit Muria, 1951), hal. 12-23.
  34. *Buku Kenangan Lima Puluh Tahun Rumah Sakit Panti Rapih ..... op. cit.*, hal. 38

35. Lihat, *Sejarah Perkembangan Agama Kristen di Yogyakarta* (Yogyakarta: Sekretariat Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, 1983); Th. Muller Kruger, *Sedjarah Gereja di Indone-sia* (Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1959), hal. 157-161.
36. Liem Kie Hok, *Adanja Orang-orang Tionghwa dan Keturun-annja di Beberapa Kota Pesisiran Djawa* (Semarang' Radja-wali, 1937), hal. 18.
37. *Ibid* , hal. 42
38. Widyapranawa, *Benih Yang Tumbuh* (G.K.I. Jawa Tengah: BPK, Gunung Mulia, 1973), hal. 22.
39. *Ibid.*, hal. 24
40. Sejarah perkembangan Agama Kristen di Yogyakarta .....  
*op. cit.*, hal. 1-2.
41. Untuk gerakan Sadrah, periksa beberapa buku yang me-nyinggung masalah ini, seperti: Widyapranawa, *op. cit.*, hal. 24. Sejarah Gereja Katolik Indonesia ..... *op. cit.*, hal. 854., 'Proses Identifikasi dan Agama" dalam *Prisma*, LP3ES, no. 6, Juni 1983, hal. 91-93., Th. Muller Kruger, *op. cit.*, hal. 156.
42. Sejarah Perkembangan Agama Kristen..... *op. cit.*, hal. 3.
43. *Ibid.*
44. *Sejarah Singkat Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta* (Yogya: Humas R.S. Bethesda, 1976), hal. 1-15.
45. *Ibid.*, hal. 1. menyebutkan seluas 30.000 meter persegi, sedangkan catatan bagi hak tanah Kesultanan menyebutkan lebih kurang 38.000 meter persegi.
46. .... ?
47. *Ibid* , hal. 3.
48. *Ikhtisar pergantian pimpinan Petronella Hospital*, stensilan, Yogyakarta, 1973 hal. 8.
49. *Riwayat Singkat Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta*.....  
*op. cit.*, hal. 6.
50. Zamakhsyari Dhofler, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pan-dangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 8.



51. T.S. Raffles, *The History of Java*, vol. II (London: Black, Berbury and Allen, 1830), hal. 2.
52. B.H.M. Vlekke, *Nusantara, A History of East India Archipelago* (Cambridge: Massachusetts, 1945), hal. 146-163.
53. *Raffles, op. cit.*, hal. 3.; Untuk masalah ini lihat juga bukunya F. de Haan, *Priangan* (Bataviassch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1912), hal. 12-13. (pernyataan ini sering ditolak oleh para sarjana Islam di Indonesia. Mereka pada umumnya menyatakan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda menyokong gerakan berbagai organisasi missi Kristen di Indonesia khususnya di pulau Jawa pada periode abad 19 hingga pertengahan abad 20).
54. Lihat pada: F. de Haan, *op. cit.*, hal. 474 dan 747.; Jacob Vredembrecht, "The Hadj, Some of Its Features and Functions in Indonesia" dalam *BKI*, jilid 118, 1962, hal. 98.; J. Eisenberger, *Indie en de Bedebart naar Mekka* (Leiden, 1928), hal. 188
55. Zamakhyari Dhofier, *op.cit.*, hlm. 12.
56. Oemar Sahidu, *Sedjarah Perkembangan Agama Islam, Wudjud dan Tjitra untuk bermasyarakat* (Surabaya: Badan Usaha Penerbit Islam, 1963), hlm. 34-39.
57. Donald K. Emmerson, *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 1976), hlm. 39.
58. Zamakhsyari Dhofler, *op.cit.*, hlm. 13; Lihat juga, Clifford Geertz., *Islam Observed* (New Haven and London: Yale University Press, 1968), hlm. 11-12.
59. James L. Peacock, *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesia Islam* (Philippines: The Benyamin/Cummings Publishing Company, 1978), hlm. 29.
60. Junus Salam, *K.H.A. Dahlan, Amal dan Perdjuangannya* (Jogjakarta: Dokrah P.P. Muhammadiyah, 1968), hlm. 61.

61. Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia, 1900–1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), hlm. 85.
62. *Benteng Vredeburg*, jilid II (Yogyakarta: Lembaga Studi Kawasan dan Pedesaan UGM, 1978), hlm. 192.
63. Junus Salam, *op.cit.*, hlm. 10.
64. Pengertian ini memiliki kaitan dengan kebodohan, kemiskinan dan tiadanya kesehatan baik lahir maupun batin. Lihat Hamka *Pengaruh Muhammad Abdul di Indonesia* (Djakarta: Tinta Mas, 1961) hlm. 5.
65. *Peringatan 40 tahun Muhammadiyah* (Djakarta: Panitia Peringatan 40 tahun Muhammadiyah, 1952), hlm. 367–368.
66. Amir Hamzah *Pembaharuan Pendi dan Pengajaran Islam yang diselenggarakan oleh Pergerakan Muhammadiyah* (Jogjakarta: Penyelenggara Publikasi Pembaharuan Pendidikan/Pengadjaran Islam, (1962) hlm.54
67. Tantangan yang sangat keras datang dari penghulu keraton Kasultanan Yogyakarta yang bernama Kiai Haji Mohammad Halilil terlepas dari cara dan bentuk pertentangan ternyata sebenarnya hal itu memperlihatkan suatu gambaran khas budaya Jawa atas "Kekuasaan dan wewenang" seseorang atas pengikut-pengikutnya.
68. L. Stoddard, *Dunia Baru Ilam* (Djakarta: Panitia Penerbit, 1966), hlm. 308.
69. Benteng Vredeburg, *op.cit.*, hlm. 206.
70. *Pedoman Pendjelasan Tentang Kepri bagian Muhammadiyah* Jogjakarta: P.P. Muhammadiyah, 1963), hlm. 15.
71. Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 86–89; Wawancara H. Achmad Adaby Darban, tanggal 26 September 1983.
72. *Ibid.*
73. *Makin Lama Tjinta* (Djakarta: Departemen Penerbangan Republik Indonesia, 1963), hlm. 164.

74. Dawam Rahardjo, "Kyai Pesantren dan Desa: Suatu Gambaran Awal", *Prisma*, no. 4, 1973; lihat juga: *Pesantren dan pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1974).
75. Istilah ini dilontarkan oleh Delier Noer dalam bukunya: *Intelektual Ulama dan Ulama Intelektual*.
76. Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 92.
77. D.M.G. Koch, *Menuju Kemerdekaan* (Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1951), hlm. 120.
78. *Sejarah Singkat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah* (Jogyakarta: Bagian Tatausaha R.S. PKU Muhammadiyah; 1982), hlm. 2.
79. Bagan Struktur Organisasi (sebagai lampiran)
80. Beberapa kalangan intelektual muslim berpendapat bahwa kesadaran KHA. Dahlan terhadap situasi abad 20 mencerminkan adanya "kesadaran historis" atas perjalanan umat dan agama Islam di masyarakat Indonesia saat penetrasi peradaban Barat semakin kokoh dan lancar masuk kelingkungan penduduk yang sejak awal abad ini terkonsentrasi dalam bidang pendidikan.
81. Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 95.

### **BAB III**

## **MOBILITAS SOSIAL DI KOTA YOGYAKARTA**

Telah dikemukakan dalam bab II bahwa aspek kultural dan agama yang hidup dalam masyarakat telah memberikan pengaruh yang tidak kecil atas proses mobilitas sosial masyarakat di Kota Yogyakarta. Kedudukan raja dan keraton sebagai pusat orientasi masyarakat Jawa semakin memainkan peranannya sebagai "katalisator" pertemuan budaya antarbarat dan timur saat raja memberikan bantuan kepada Missi dan Zending. Kontak secara langsung antarmasyarakat Jawa dan orang-orang barat terjadi, di antaranya ialah saat terbukanya bangsal-bangsal pengobatan masyarakat sebagai sarana kesehatan. Hal ini memberikan kemungkinan atas proses perubahan pandangan masyarakat Jawa terhadap kebudayaan barat. Ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat Jawa yang begitu berminat untuk mengubah posisi kehidupan mereka, dan hal ini harus dilakukan melalui sarana pendidikan yang dijalankan oleh pemerintah kolonial.

Melihat kenyataan bahwa pada tahun 1818 sekolah Eropa yang diselenggarakan pemerintah kolonial bagi anak-anak bang-

sa Eropa di Indonesia<sup>1</sup> masih belum mampu menarik minat kalangan pribumi sebenarnya bukankah pendidikan "tradisional kejawaan" masih begitu menyungkup kehidupan masyarakat Jawa di Kota Yogyakarta? Hal semacam ini harus dilihat kembali kepada kenyataan strata masyarakat sendiri sebagaimana yang pernah dikemukakan di bagian depan dari bab ini. Kelas yang memerintah lebih merupakan kelas yang pasif<sup>2</sup>. Seiring dengan tuntutan kepentingan pemerintah kolonial Belanda untuk melaksanakan politik Tanam Paksa, pintu pendidikan bagi masyarakat bumiputera secara perlahan telah dibuka. Sebenarnya kenyataan semacam ini lebih merupakan berkuasanya golongan liberal dalam pemerintahan dan pendidikan yang diadakan itu lebih merupakan suatu bentuk tuntutan politik kolonial golongan liberal<sup>3</sup>.

### **3.1 Modernisasi Masyarakat Jawa : Gagasan Kaum Liberal**

Beberapa peristiwa penting baik langsung atau tak langsung yang ikut berpengaruh atas terjadinya perkembangan pendidikan di Hindia Belanda ini adalah

- (1) Pada tahun 1863 dan 1864 di Negeri Belanda dilaksanakan program pembaharuan pendidikan oleh Fransen van de Putte.
- (2) Tahun 1869 Terusan Zues dibuka dan berakibat mudahnya pengangkutan produksi rempah-rempah dan komoditi perdagangan lain yang laku di pasaran Eropa. Kapal uap sebagai sarana angkutan laut muncul dalam dunia pelayaran. Maskapai pelayaran di Belanda dibuka pada tahun 1870.
- (3) Tahun 1870 terjadi suatu tatanan sosial ekonomi baru yang melanda Eropa dan di dalamnya juga Negeri Belanda. Hal ini juga berakibat bagi daerah jajahan di Hindia Belanda dengan keluarnya Undang-undang Agraria, de Waal yang memberikan kebebasan berusaha bagi perkebunan swasta. Tahap ini terkenal sebagai dilaksanakannya liberalisme<sup>4</sup>.

- (4) Jalan kereta api dibuka bagi daerah Jawa. Maksud dan tujuan dibangunnya jalan kereta api ini untuk membuka daerah-daerah pedalaman Jawa dan menghubungkan daerah perkebunan besar yang kebanyakan terletak di pedalaman dan kota-kota pelabuhan terdekat yaitu Batavia di Jawa Barat dan Semarang di Jawa Tengah.
- (5) Tahun 1888 dibuka usaha pengiriman barang oleh *Paketaartmaatschappij*, untuk pengiriman barang interinsuler<sup>5</sup>.

Berbagai usaha dari kelompok liberal ini atas politik baru bagi daerah jajahan adalah perubahan sistem pemerintahan ala barat tanpa disertai kenyataan atas kondisi masyarakat yang ada. Slogan kaum liberal "lebih banyak memberikan arti kemakmuran bagi golongan pribumi dengan cara mengurangi hak-hak feodal para kepala-kepala bumiputera", sebenarnya memunculkan pertanyaan untuk membatasi permasalahan yang ingin dibicarakan dalam bab III ini. Pernyataan itu berkisar kepada "sejauh mana golongan penguasa juga memperhatikan pendidikan moderen ala barat itu dalam kaitannya dengan kepentingannya? Akibat apa yang ditimbulkan oleh golongan masyarakat elit itu sendiri atas diperkenalkannya sistem pendidikan moderen ini? Sejauh mana aspek kultural yang menyungkup kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat Jawa ini ikut memberikan andil atas proses diselenggarakannya pendidikan moderen ini?"

Keinginan pemerintah kolonial atas pendidikan bagi masyarakat pribumi dilaksanakan melalui surat keputusan Pemerintah Kerajaan Belanda pada 30 September 1848. *Kweekschool* atau sekolah guru bagi bumiputera didirikan dengan biaya sebesar 25.000 gulden<sup>6</sup>. Realisasi keputusan ini diwujudkan dengan dibukanya secara resmi untuk yang pertama kali di Surakarta pada bulan April 1852<sup>7</sup>. Peraturan yang menjamin pendidikan bagi warga bumiputera secara tegas baru dicantumkan dalam *Regering Reglement* pada tahun 1854. Anehnya, berbagai keinginan itu sendiri sebenarnya mencerminkan sikap pemerintah

kolonial atas usaha pendidikan itu. Tahun 1864 saat dibuka kemungkinan bagi anak bumiputera yang akan mengikuti pendidikan di sekolah 'Eropa, ternyata tidak setiap anak dapat diterima dengan mudah. Bagi mereka, para anak kepala pemerintahan pribumi harus mengajukan permohonan ke Pemerintah Belanda. Sebelum uraian ini masuk lebih lanjut, ada baiknya dibicarakan terlebih dahulu beberapa gambaran yang ada tentang pendidikan dalam masyarakat Jawa sebelum pendidikan moderen itu diselenggarakan.

Sistem pendidikan pada awalnya dalam masyarakat Jawa lebih tepat disebut sebagai sistem ajaran yang membentuk watak manusia yang bersangkutan menjadi ksatria. Hal ini jelas menurut proses sejarahnya sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Hindu atas kasta tertentu yang diambil oleh penguasa praja kejawen untuk membentuk tipe ideal sifat kstaria atas priyayi individu yang bersangkutan yang dibentuk menjadi seorang priyayi Berbagai padepokan sebagai tempat sarana mendapatkan pendidikan, saat agama Islam mulai berkembang ternyata juga diintrodusir menjadi lembaga yang bernapaskan keislaman. Berbagai perubahan juga terjadi terhadap berbagai mata pelajaran yang diberikan oleh lembaga pendidikan ini. Berkembangnya agama Islam dan dominasi dari agama ini dalam kehidupan masyarakat pendukungnya menjadikan sistem pondok yang terlihat hingga kini lebih merupakan bentuk adaptasi dari sistem padepokan dalam kerangka sistem pendidikan bagi masyarakat. Peranan *ajar* dan *peranan kiai* yang mendasari lembaga pendidikan itu merupakan kaitan yang terpenting, untuk terhadirnya jenis lembaga pendidikan tertentu dalam masyarakat.

Berbagai isi *Serat Piwulang* yang hingga kini dapat dikaji dan merupakan karya sastra ternyata lebih merupakan suatu petunjuk bahwa pendidikan moral, pada masa praja kejawen masih berada dalam tingkat perkembangannya merupakan syarat utama bagi seorang yang ingin mendapatkan posisi tertentu untuk mempelajarinya. Apa kegunaannya serta bagaimana seharusnya "menginterpretasikan" ajaran dalam kehidupan sehari-

hari harus diketahui juga<sup>8</sup>. Dari hal semacam ini sebenarnya, apakah yang diinginkan sistem pendidikan kejawaan itu? Menurut Niels Mulder<sup>9</sup>, pandangan hidup orang Jawa ternyata lebih menekankan pada ketenteraman batin, keselarasan dan keseimbangan, sikap narima terhadap segala peristiwa yang terjadi, sambil menempatkan individu yang bersangkutan berada di bawah masyarakat, sedangkan masyarakat berada di bawah alam semesta.

Kenyataan di atas memberikan arti yang besar bagi bertahannya kultur Jawa terhadap berbagai intervensi yang datang dan menghampirinya. Salah satu tindakan yang lebih merupakan jawaban atas intervensi kultur barat dalam pendidikan, dijawab juga pada awal abad ke 20an dengan munculnya sekolah Taman Siswa. Pengetahuan sastra merupakan kelengkapan yang harus dimiliki di samping diajarkan juga sifat sabar, berada di jalan yang lurus, bersyukur dan menerima karunia yang diberikan kepadanya, usaha, teguh hati, berani, setia akan kejujuran, gagah berani dan berilmu serta waspada<sup>10</sup>

Bermula dari sistem yang berakar dari budaya setempat, pendidikan di praja kejawaan Yogyakarta, sebenarnya lebih memberikan arti dalam kaitannya dengan *tatakrama* dan mengatur hubungan individu tersebut dengan Tuhan serta kaidah-kaidah moral yang menekankan sikap narima, sabar serta mawas diri, *andap asor* dan *prasaja* yang juga pada gilirannya kesemua hal itu untuk mengatur gejolak dorongan emosi-emosi yang ada dalam diri pribadi seorang individu<sup>11</sup>.

Karya sastra menjadi pegangan bagi para priyayi untuk melanjutkan tradisi dalam sikap kehidupan sehari-hari. Tak jarang bagi seorang penguasa selalu berusaha untuk menurunkan karya-karya mereka pada zamannya<sup>12</sup> agar tindakannya itu menjadi suri teladan bagi keturunannya serta masyarakat pendukungnya. Isi materi pendidikan ini dalam arti tradisional itu diajarkan melalui bentuk wejangan yang diberikan secara lisan dan dilakukan oleh orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan luas serta kewibawaan dan selalu dihormati. Cara pemberian pengetahuan



itu ada juga yang berbentuk *sarasehan*, yakni beberapa orang berkumpul dan salah satu di antara mereka yang dianggap paling banyak mempunyai pengetahuan tentang berbagai masalah akan bertindak sebagai juru penerang. Otomatis dengan begitu bagi individu yang bertindak sebagai juru penerang ini sekaligus dapat dianggap sebagai pemimpin kelompok di dalam pertemuan sejenis itu. Model semacam ini lebih merupakan bentuk pembahasan isi buku, yang diawali dengan pembacaan isi buku baik yang berasal dari *babad* atau *serat*. Kegiatan semacam ini memang tidak dapat dilakukan setiap saat, tetapi biasanya dikaitkan dengan hari-hari yang dianggap memiliki makna tertentu, seperti: *malem Selasa Kliwon* atau *malem Jum'at Kliwon* bahkan hari lain yang menurut pengamatan orang Jawa memiliki arti tersendiri. Hari-hari tersebut berkisar pada hari kelahiran atau peringatan suatu peristiwa penting lainnya, seperti hari naik tahtanya seorang raja atau sebagai hari *tingalan ndalem*.

Gambaran atas pendidikan di atas, sebenarnya hanya merupakan sebagian kecil saja dari yang dapat dilacak atas sistem pendidikan masa lampau dalam kehidupan masyarakat Jawa. Disadari bahwa pendidikan pada awalnya hanya diperkenankan bagi golongan atas dalam masyarakat karena mereka berada di lingkungan istana. Bagi seorang individu, keraton memberikan gambaran yang menarik, di samping gambaran lingkungan kehidupan keraton merupakan "pusat pengetahuan dari isi budaya Jawa". Seperti telah disinggung di bagian depan, mata pelajaran *bahasa* dan *kesusastraan Jawa* merupakan syarat utama<sup>13</sup> di samping hukum ketatanegaraan, seperti Undang-Undang Sepuluh, *angger pradata* (hukum perdata), dan *angger pidana* (hukum pidana).

Tak dapat diingkari pada akhirnya jika peranan bentuk kesenian<sup>14</sup> seperti tembang mocopatan, wayang kulit, wayang orang dan berbagai tarian yang merupakan bagian integral atas pendidikan kejawaan di samping sebagai media penerangan juga mampu mengekspresikan pandangan hidup orang Jawa, yang di da-

lamnya banyak terkandung ajaran serta falsafah kehidupan Jawa.

Sejak terjadinya proses Islamisasi di berbagai daerah dan praja kejawen, pengertian sultan merupakan simbol kehadiran penguasa Islam atas kebudayaan Jawa<sup>15</sup>. Sejak saat itu pendidikan di lingkungan keraton juga harus menghadirkan mata pelajaran pengetahuan yang berkaitan dengan keagamaan Islam dan bahasa Arab. Pendidikan ini juga diberikan di mesjid-mesjid atau pondok-pondok pesantren baik yang dilakukan oleh seorang mubaliq atau guru ngaji. Pendidikan jenis ini di kalangan keraton menghasilkan golongan *pemetak* atau *putihan* dan biasanya menempati jabatan dalam kaitannya dengan kepenghuluan keraton.

Inti dalam bidang pendidikan yang disebut sebagai pendidikan tradisional ini, dan dikenal dalam lingkungan kehidupan masyarakat Jawa adalah : pendidikan agama yang umumnya bersifat agama Islam, serta pendidikan kejawen. Khusus untuk pendidikan kejawen yang di dalamnya berisi tentang ajaran dari kehidupan dan pandangan hidup masyarakat Jawa dijabarkan dalam bentuk kaidah-kaidah yang mengatur tindakan manusia dan berpusat di sekitar istana raja.

Ada alasan lain yang sebenarnya cukup dianggap memiliki korelasi antarprestige sosial dan gaya kehidupan feodal, bahwa keengganan para bangsawan atau *darah dalem* atas pendidikan Eropa itu dikarenakan tertutupnya sifat kehidupan masyarakat Jawa sendiri<sup>16</sup> dalam kaitannya dengan pandangan bahwa hal-hal yang datang dari luar tersebut lebih merupakan cermin dari ketidakmampuan meraih prestige sosial atas gaya kehidupan feodal.

Kebutuhan akan pemenuhan tenaga terdidik dalam kehidupan moderen, ternyata juga ikut mempengaruhi munculnya kehidupan pendidikan moderen pada masa itu. Hal ini mengingat bahwa pendidikan moderen yang dibawa oleh peradaban barat, pertama kali menyentuh atau berkontak dengan lapisan atas

dari masyarakat Jawa. Golongan priyayi ini lebih awal mengenal kebutuhan akan pendidikan moderen tersebut meskipun pada awal proses pengenalan pendidikan barat itu tidak seluruhnya merupakan gambaran atas *darah dalam* mengingat bahwa pendidikan kejawen masih dianggap memiliki nilai tersendiri<sup>17</sup>.

Istilah atas pendidikan moderen ini sebenarnya hanya menunjuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengajaran yang lebih ditekankan dalam suatu ruang tertentu dengan waktu tertentu juga<sup>18</sup>. Menurut sejarahnya, semenjak sistem pendidikan moderen ini diintrodusir ke masyarakat Jawa melalui sekolah-sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di praja kejawwn. sebenarnya lebih merupakan saingan dari sekolah tradisional yang telah ada dan hidup serta dikenal oleh masyarakat. Salah satu bentuk dari kenyataan ini adalah dari gambaran kehidupan sekolah yang ada di Kota Yogyakarta, yang biasa disebut sebagai sekolah *Tamanan*. Pendidikan semacam itu memang mampu memberikan legitimasi buat seorang individu untuk bermasyarakat, karena pendidikan ini memang hanya terbuka untuk golongan tertentu yang pada gilirannya melahirkan ikatan solidaritas juga<sup>19</sup>. Ikatan ini jelas mampu menjalin kerjasama bagi para anggotanya dalam berbagai persoalan kehidupan, hubungan di dalamnya akhirnya menunjuk juga seberapa jauh tingkatan mobilitas sosial yang dicapai oleh para anggotanya saat mereka telah selesai menamatkan pendidikan di sekolah tersebut.

Aspek mana yang paling berperan untuk menjalin hubungan perkerabatan dalam sistem pendidikan semacam di atas apakah aspek kultural atau agama<sup>20</sup> kiranya sulit ditentukan oleh seorang peneliti yang berasal dari luar lingkungan semacam ini. Ada korelasi yang menunjuk bahwa memudarnya kegiatan pendidikan di bawah kesultanan sebenarnya justru mengikat para alumni sekolah tersebut ke dalam suatu *esprit de corps* yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari dari gaya kehidupan pangreh praja, karena itu sekolah sejenis *Tamanan* harus dilihat dalam konteks kebudayaan Jawa dan perkembangan pendidikan

moderen di Kota Yogyakarta. Mengapa sekolah ini mundur dan para murid lebih senang menerima mata pelajaran yang lebih moderen? Kiranya jawaban itu harus dilihat juga dalam situasi pemenuhan ketenagakerjaan yang dilahirkan oleh sistem pemerintahan kolonial atas gagasan golongan liberal juga.

### 3.2 Pendidikan Moderen di Keluarga Pakualaman

Perang Diponegoro telah usai. Secara berangsur-angsur keamanan dan ketertiban dalam masyarakat telah dapat dipulihkan. Pada tahun 1831 diadakan reorganisasi tanah-tanah praja kejawen dan status tanah atas Praja Pakualaman semakin nyata batas-batasnya. Hal ini memungkinkan untuk segera dilakukannya pengaturan pemerintahan. Terbuka formasi jabatan administratif dalam pemerintahan praja bagi keluarga Pakualaman.

Kebutuhan akan tenaga yang terdidik secara moderen untuk mengelola pemerintahan menjadikan Pakualam IV, penguasa waktu itu segera mengirimkan dua orang abadinya untuk dididik secara barat. Mereka dikirimkan ke sekolah yang mempergunakan sistem Eropa dengan harapan kelak setelah kembali akan mampu mengabdikan di lingkungan keluarga Pakualaman. Kedua abdi ini, yang terdiri atas putra dan putri masing-masing dikirim ke Solo dan Batavia. Pendidikan yang mereka tempuh adalah *Kweekschool* di Solo dan sekolah *Broedvrouw* di Batavia<sup>21</sup>.

Hal di atas merupakan langkah awal dari salah seorang penguasa di praja kejawen untuk berkontak langsung dengan budaya barat melalui sistem pendidikannya. Tak banyak hal-hal yang dapat digali dari kegiatan Pakualam IV dalam hubungannya dengan pendidikan. Setelah Pakualam IV meninggal, kedudukan penguasa praja kejawen ini jatuh kepada Kanjeng Pangeran Suryodilogo yang dinobatkan pada 9 Oktober 1878. Beliau adalah putra Pakualam II dari istri yang bernama Bando Raden Ayu Resminingdyah. Sebagai seorang yang selalu berpandangan jauh ke depan, semenjak muda telah melihat

bahwa pendidikan moderen sangat diperlukan untuk memajukan keluarga praja Pakualaman. Beberapa orang putranya diberi pendidikan melalui sekolah Belanda dengan harapan agar kelak dapat memperoleh posisi yang baik dalam masyarakat. Untuk satu nal ini, masalah pendidikan, beliau sangat keras<sup>22</sup>. Juga terhadap saudara-saudaranya, beliau menuntut agar meraih pendidikan pada sekolah Eropa, meski banyak dari para saudara beliau belum menyadari akan pentingnya mengikuti pendidikan moderen itu. Usul dan saran dari Pangeran Suryodilogo atas pendidikan terhadap para saudaranya ini tidak ditanggapi dikarenakan Pemerintah Belanda memberikan persetujuan untuk meningkatkan jumlah anggota Legium Pakualaman. Hal ini berarti memberikan kesempatan kerja bagi keluarga Pakualaman.

Sebagai putra dari Pangeran Suryodilogo Raden Mas Notokusumo dan Raden Mas Hario Notodirojo, awal sekali menerima pendidikan ala barat di *Europesche Lagere Schoolen* (ELS). Salah seorang di antara mereka, Bendoro Raden Mas Notodirojo kemudian melanjutkan pendidikannya ke *Hoogere Burger School* (HBS) di Jakarta, dan kemudian pindah ke Semarang hingga tingkat IV. Setelah kembali ke Praja Pakualaman ia ditempatkan ke dalam Legium Pakualaman<sup>23</sup>.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Pakualam V sadar saat naik tahta bahwa keadaan praja amat buruk kondisinya, kas keuangan kosong, hutang bertumpuk<sup>24</sup>, dan banyak keluarga yang jatuh miskin akibat beberapa kebiasaan yang buruk<sup>25</sup> serta intrik keluarga yang selalu muncul karena kekecewaan atas pergantian tahta sebagai kepala praja yang selalu tidak berjalan baik. Harus dilakukan suatu perubahan yang mendasar dari pola kehidupan yang seperti ini. Jalan pintas diambil oleh beliau melalui pendidikan barat yang dianggap mampu memberikan harga diri bagi setiap individu untuk mengabdikan lebih nyata bagi Praja Pakualaman.

Pangeran Notodirojo sebagai salah seorang putra KGPA. Pakualam V ternyata mempunyai peran yang besar dalam pe-

merintahan ayahnya. Kenaikan pangkatnya dalam Legium Pakualaman begitu cepat. Bermula sebagai *wachtmeester*, lalu *kwartiermeester*, dan pada tahun 1883 menjadi *luitenant kwartiermeester II*. Pada tahun itu juga atas usul residen van Baak mendapat gelar Kanjeng Pangeran Ario dengan tugas baru mengurus bagian keuangan praja Pakualaman. Ayahnya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Suryodilogo mendapat gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam V.

Salah satu program yang merupakan perpaduan antara ayah dan anak untuk mengembalikan kehidupan Praja Pakualaman ini adalah melalui pendidikan. Putra dan putri Pakualaman harus mendapatkan pendidikan dan ini merupakan prioritas yang utama. Pembatasan pembangunan yang menelan biaya banyak di samping melakukan penghematan pengeluaran bagi Praja Pakualaman menimbulkan sikap prokontra dari para pejabat lain atas tindakan Pangeran Notodirojo meski secara nyata hasil yang diperlihatkan cukup mengagumkan hanya dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1889 semua hutang pada pihak swasta dapat dilunasi kecuali kepada Pemerintah Hindia Belanda<sup>26</sup>.

Penertiban di segala bidang dalam pemerintahan praja kejawen Pakualaman, khususnya di bidang keuangan memberikan arti yang positif bagi kelancaran roda pemerintahan, tetapi hal ini tidak berjalan lama, karena pada bulan Agustus 1892 Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membubarkan Legium Pakualaman. Hal ini jelas menjadi beban keuangan Pemerintah Praja Pakualaman, khususnya penyaluran tenaga legium ke berbagai bidang kehidupan pemerintahan Praja Pakualaman.

Ambisi dan cita-cita Pakualam V sebagai penguasa pemerintahan praja atas pendidikan moderen, juga terlihat dari tekanan yang dilakukannya atas penerimaan dan pemberian kedudukan kerabat. Bagi yang tidak mendapatkan pendidikan formal sulit untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan Praja Pakualaman. Hasil nyata dari ambisi Pakualam V atas pendidikan moderen adalah berhasilnya salah seorang kerabat menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1892. Ke-

rabat yang bernama Raden Mas Sukardi tersebut akhirnya berhasil menjadi pegawai Pemerintah Hindia Belanda. Kejadian ini sangat menarik minat kerabat Pakualaman untuk memasukkan putra-putri mereka ke berbagai sekolah-sekolah Belanda.

Penolakan atas kerabat yang tidak memiliki pendidikan formal untuk bekerja di lingkungan Praja Pakualaman menimbulkan perbedaan pandangan. Hal ini tidak ditanggapi lebih lanjut oleh Pakualam V mengingat memang terbatasnya lapangan kerja di lingkungan pemerintahannya. Dianjurkan bagi para kerabat yang mendapatkan pendidikan formal untuk bersedia juga bekerja di luar lingkungan Istana Pakualaman, khususnya di gubernemen. Tindakan dan anjuran ini dilakukan untuk mendorong para kerabat mendapatkan posisi ekonomi yang lebih baik dalam kehidupan atas kerja di luar lingkungan Praja Pakualaman itu.

Tahun 1891 Pakualam V mengirim seorang putranya, Bendoro Raden Mas Kusumoyudo dan seorang cucunya yang bernama Raden Mas Soortiyono ke Negeri Belanda. Beberapa tahun kemudian dikirim kembali putranya yakni Bendoro Raden Mas Suryoputro ke Belanda, bersamaan dengan lima orang cucunya yang menuntut ilmu di berbagai bidang seperti kedokteran, hukum dan pendidikan teknik.

Pada 6 November 1900 Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Pakualam V wafat. Penggantinya, Kanjeng Pangeran Haryo Notokusumo dinobatkan sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Pakualam VI pada 27 Februari 1901. Penggantinya ini ternyata tidak dapat memerintah secara baik karena kesehatannya sering terganggu. Hakekat pemerintahan ternyata berada di tangan adiknya yakni Pangeran Notodirojo yang pada masa Pakualam V sebagai tangan kanan dalam mengendalikan pemerintahan Praja Pakualaman. Kondisi ini menyebabkan Pakualam VI usul kepada Residen Cuperus untuk menyetujui diangkatnya Bendoro Raden Mas Suryaningrat yang sekolah di HBS dan berada di tingkat IV dijadikan pengganti putra mahkota, Bendoro Raden Mas Soortiyono yang meninggal di Negeri Belanda.

Usul ini diterima oleh residen. Surat permohonan ke gubernur jenderal di Batavia dibuat dan saat pengiriman surat itu ke Batavia, pada 8 Juni 1902 Pakualam VI juga meninggal dunia. Di bidang pendidikan belum ada perubahan.

Kekosongan penguasa pemerintahan Praja Pakualaman terjadi, dan untuk hal ini terpaksa diangkat Kanjeng Pangeran Adipati Sosroningrat sebagai pejabat wakil kepala pemerintahan praja kejawen Pakualaman dengan tugas menyelesaikan urusan harian<sup>27</sup>.

Berbagai perubahan di bawah pemerintahan wakil kepala Praja Pakualaman berjalan. Kanjeng Pangeran Adipati Sosroningrat menambah pegawai baru dan berbagai jabatan baru dalam pemerintahannya, tak terkecuali dalam masalah keuangan. Akibatnya, kebijaksanaan dalam bidang keuangan ini tak dapat disetujui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kanjeng Pangeran Adipati Sosroningrat dimintai pertanggungjawaban sebagai wakil kepala pemerintahan Praja Pakualaman.

Pada 20 Agustus 1903 dalam sebuah pertemuan antara residen Pemerintah Hindia Belanda dan para asisten residen dari Mataram diberitahukan bahwa Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Raden Mas Surarjo sebagai pengganti Pakualam VI. Di samping itu dibentuk juga komisi pengawas masalah keuangan Praja Pakualaman yang di dalamnya terdapat nama-nama seperti Kanjeng Pangeran Adipati Sosroningrat, Kanjeng Pangeran Adipati Notodirojo. Kemunculan arti komisi pengawas keuangan ini berakibat baru bagi kehidupan administratif Pemerintah Praja Pakualaman. Anggaran praja yang berisi anggaran pendapatan dan anggaran pengeluaran harus dipisahkan. Hal ini berarti Praja Pakualaman meninggalkan sistem feodal dan mulai memasuki sistem yang baru pada tahun 1904. Pendapatan praja harus dipisahkan dengan pendapatan pribadi. Hal ini disebut sebagai *civile lijst*. Peristiwa ini merupakan yang pertama bagi daerah praja kejawen. Pada 17 Desember 1906 Raden Mas Surarjo dinobatkan sebagai kepala Praja Pakualaman dengan gelar Kanjeng Pangeran Adipati Ario Prabu Suryodilogo VII. Di bi-



dang pendidikan ternyata banyak hal yang dilaksanakan oleh penguasa Praja Pakualaman ini. Ia memberikan bia siswa bagi kerabat yang ingin melanjutkan sekolah dan membuka sekolah bagi penduduk bumiputera di daerah Adikarto. Menurut catatan biaya pengeluaran keuangan rumah tangga istana, pada tahun 1907 ada enam sekolah dasar bagi bumiputera yang dibuka dan tersebar di empat kecamatan.

Organisasi pergerakan yang bertujuan meringankan kehidupan orang Jawa dengan jalan pendidikan yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa STOVIA di Jakarta, sangat didukung oleh Pakualam VII. Kongres terbuka yang diselenggarakan oleh Boedi Utomo di Yogyakarta pada 3 Oktober 1908 yang dipimpin oleh dr. Wahidin Sudirohusodo, dan menghasilkan berbagai keputusan disambut baik oleh penguasa praja kejawen Pakualaman ini<sup>28</sup>.

Keterlibatan keluarga Pakualaman atas gerakan pendidikan melalui organisasi Boedi Oetomo<sup>29</sup> membuat pergerakan nasional semakin menunjukkan arah yang sebenarnya dan hal ini cukup menggelisahkan beberapa pejabat Belanda.

### 3.2.1 Ide-ide Radikal dari Trah Pakualaman yang Menunjang Mobilitas Sosial di Kota Yogyakarta.

Seperti telah dikemukakan di bagian depan bahwa pendidikan moderen yang dikembangkan untuk meningkatkan pengetahuan para kerabat Pakualaman sebenarnya pada gilirannya menunjukkan kesadaran historis atas kehidupan masyarakat sekelilingnya. Sebagai "gusti" yang melihat banyak terjadi kepincangan-kepincangan sosial akibat sistem masyarakat yang dikembangkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang pada prinsipnya untuk menjaga stabilitas kekuasaannya, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk tenaga-tenaga terampil yang terdidik melalui sistem pendidikan yang dikembangkan dalam satu korps yang disebut *Binnenlands Bestuur*, tetapi pembentukan korps tetap dirasakan adanya ketergantungan dari para *Inlandsch Bestuur*, meskipun pendidikan yang mereka peroleh

dianggap telah mampu menembus hirarki *Binnenlands Bestuur* yang merupakan motor utama pemerintah kolonial. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan sekelompok kecil orang-orang yang termasuk korps *Binnenland Bestuur* di antaranya kerabat Pakualaman.

Kecenderungan ketidakpuasan dari para kerabat atas sistem kemasyarakatan yang berlaku sebenarnya merupakan suatu hasil dari pendidikan liberal yang diintrodusir oleh Pemerintah Kolonial Belanda sendiri atas golongan masyarakat yang disebut tradisional<sup>30</sup>.

Hal semacam ini merupakan suatu penunjuk akan adanya perubahan sikap dari golongan masyarakat yang terhormat atas lingkungan dan mereka berusaha membentuk suatu komunitas tersendiri melalui ide-ide mereka dalam bidang pendidikan. Bukan suatu kebetulan jika keduanya dari kerabat Pakualam ini merupakan saudara kandung. Yang jelas keduanya telah menjawab persoalan kemasyarakatan yang ada pada waktu itu dengan mendirikan sekolah Adhi Dharma dan Taman Siswa yang akan diuraikan secara selintas di bawah ini. Ide pendirian sekolah jelas banyak memberikan arti bagi adanya perubahan sosial masyarakat di Yogyakarta yang pada gilirannya juga memberikan arti bagi terhadirnya pengertian mobilitas sosial dalam masyarakat.

### 3.2.1.1 Sekolah Adhi Dharma

Sekolah ini didirikan oleh seorang kerabat Pakualam bernama Raden Mas Iskandar yang kelak lebih terkenal dengan sebutan Suryopranoto. Sebagai seorang yang berpendidikan sekolah pertanian, pada tahun 1908 ia diangkat sebagai kepala Dinas Pertanian Wonosobo hingga tahun 1914. Ia keluar dari pekerjaannya karena protes atas tindakan pemerintahan kolonial Belanda terhadap pegawai pertanian yang dipecat karena beranggotakan Serikat Islam. Ia menceburkan dirinya dalam gerakan nasional dengan ikut menjadi anggota Boedi Oetomo<sup>31</sup>.

Pada 12 Februari 1912 atas prakarsa Dwijosewoyo dalam kongres Perserikatan Guru Hindia Belanda di Magelang, terbentuk *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij*. Suryopra noto terpilih sebagai salah seorang anggota komisaris. *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij* selanjutnya berubah menjadi *Onderlinge Levensverzekering Maatschappij Bumiputera*. Tahun 1915 aktivitas Suryopranoto semakin luas dengan didirikannya *Arbeidslager Adhi Dharma* atau barisan kerja untuk kebaktian yang bertujuan menolong para petani buruh di daerah Yogyakarta, meringankan beban kehidupan mereka akibat meluasnya penanaman modal asing di sektor perkebunan.

Organisasi Adhi Dharma bergerak di bidang ekonomi serta pendidikan dengan usaha-usaha meliputi tabungan, koperasi, pertukangan, kesehatan, bantuan nasihat serta pendidikan. Berazas gotong-royong dan tolong-menolong. Di bidang pendidikan pada tahun 1917 untuk meningkatkan pendidikan anak-anak tani dan buruh didirikan sebuah sekolah HIS Adhi Dharma. Sekolah ini merupakan sekolah swasta yang pertama dan bercorak nasional, di Indonesia. Kelak di kemudian hari dikembangkan sampai tingkatan MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*). Tujuan HIS Adhi Dharma agar rakyat berpengetahuan yang kelak dipakai sebagai alat perjuangan menentang penjajah.

### 3.2.1.2 Raden Mas Suwardi dan Sekolah Taman Siswa

Raden Mas Suwardi adalah putra keempat dari Kanjeng Pangeran Adipati Suryaningrat yang dilahirkan pada 2 Mei 1889. Ia dibesarkan di dalam lingkungan keluarga bangsawan. Ia mendapat pendidikan kesusastraan serta kesenian Jawa dengan napas agama Islam yang kuat. Ia dilahirkan dan tumbuh di masa keluarga Pakualam sedang giat-giatnya mendidik para kerabat ke arah pendidikan Eropa, dan sempat mengecap pendidikan ELS, sebelum melanjutkan ke STOVIA. Sifat-sifat pendidikan yang diterima sejak kecil ini sangat mempengaruhi jiwa Suwardi, demikian pula sifat ksatria yang mengilhami gerak

revolusionernya di dalam membela kepentingan rakyat Indonesia<sup>32</sup>

Pada tahun 1904 ia masuk sekolah STOVIA di Jakarta. Ia hidup dan belajar dengan para pelajar yang datang dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Di Jakarta pengetahuan dan rasa nasionalnya lebih terpupuk, karena di sini tidak dikenal tingkat kedudukan seperti di daerah asalnya di Kota Yogyakarta. Kegiatan kebangsaan yang menentang penjajah mulai dilakukan olehnya semenjak terbentuknya Boedi Oetomo. Ia terlibat di dalamnya dan kesadaran politiknya semakin bertambah. Saat Sarekat Islam berdiri pada tahun 1912, Suwardi masuk ke dalamnya sebagai anggota dan berhasil menjadi ketua Serikat Islam cabang Bandung. Bersamaan waktunya dalam tahun 1912 bersama dengan dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker mendirikan Partai Politik yang pertama di Indonesia yang disebut *Indische Partij*.

Ada beberapa alasan mengapa ia meninggalkan bangku sekolah pada tahun 1909. Alasan pertama, karena ketiadaan biaya sekolah, sedangkan alasan kedua, jiwa "radikal" menuntut kehadiran dirinya dalam kancah yang lebih nyata. Selama satu tahun ia bekerja di Pabrik Gula Bojong di daerah Probolinggo. Setelah itu kembali ke Yogyakarta dan bekerja di Apotik *Ratkamp*, namun akhirnya hal itu tidak lama kembali meninggalkan Yogyakarta menuju Bandung untuk memenuhi permintaan Douwes Dekker sebagai pekerja jurnalistik. Tahun 1913 ia bersama dr. Cipto Mangunkusumo mendirikan Komite Bumi-putera yang selalu melancarkan serangan politik kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Sebuah karangannya yang cukup keras dan menyerang Pemerintah Belanda berjudul *Als ik eens een Nederlander Was* (Jika aku seorang Belanda). Pada tahun itu juga ia ditangkap bersama Cipto Mangunkusumo, kemudian diasingkan ke Negeri Belanda. Pada masa pengasingan ini ia ditemani istrinya Raden Ajeng Sutartinah Sosroningrat putra Kanjeng Pangeran Adipati Sosroningrat. Selama di Negeri Belanda ia ikut aktivitas politik dan mulai mempelajari ilmu pen-

didikan hingga berhasil mendapatkan ijazah. Suwardi mulai mengenal pikiran tokoh-tokoh pendidikan seperti Montesori, Rudolf Steiner, dan Rabindranath Tagore. Ketiganya merupakan tokoh pendidikan yang mempengaruhi jalan pikirannya.

Sementara itu perang dunia pertama mulai berlangsung 1914 -- 1918, penghidupan di Eropa semakin sulit, sampai akhirnya pada 17 Agustus 1817 Pemerintah Belanda mencabut putusan pengasingan Suwardi, tetapi ia belum dapat segera pulang karena hubungan pelayaran ditutup. Baru pada 6 September 1919 ia dan keluarganya pulang ke Indonesia. Ia terjun kembali ke dunia politik sebagai sekretaris dan kemudian sebagai ketua pengurus besar *National Indische Partij*. Suwardi memandang perlu merintis perjuangan kemerdekaan di lapangan lain yakni kebudayaan. Pertama kali ia membantu kakaknya Suryopranoto yang telah lebih dahulu membuka sekolah Adhi Dharma dengan HISnya. Di tempat ini Suwardi kurang cocok, dianggap masih kurang bercorak nasional. Atas bantuan kakaknya juga dan kerabat Pakualaman lainnya yang berpandangan progresif antara lain Raden Mas Sutatmo Suryokusumo putra Kanjeng Pangeran Adipati Suryokusumo cucu Pakualam III dan Bendoro Raden Mas A. Suryoputro, ia mendirikan lembaga pendidikan baru yang lebih bercorak nasional. Ia berhasil mendirikan Perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta dengan wujud modal satu kelas Taman Indria berisi 20 orang anak<sup>33</sup>. Perguruan Taman Siswa ini diasuh oleh Pengurus Perguruan Taman Siswa, dan untuk pertama kalinya Raden Mas Sutatmo Suryokusumo dipilih sebagai ketua, sedangkan wakil ketua ditempati oleh Bendoro Raden Mas A. Suryoputro. Suwardi sendiri duduk sebagai sekretaris. Suwardi segera menentukan cara kerja yang mencerminkan kepribadiannya, bagi "yang setuju dengan usaha kita boleh membantu yang tidak setuju atau memusuhi kita biarkan, tidak usah kita layani"<sup>34</sup>. Banyak ejekan dan cemoohan yang terlontar, tetapi ia tetap bekerja dengan diam.

Setelah delapan tahun sejak didirikannya, Perguruan Taman Siswa yang merupakan embrio sistem pendidikan nasional ini

berkembang amat pesat. Menjelang meletusnya perang dunia kedua. Taman Siswa sudah mempunyai 200 buah cabang yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, antara lain di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Ternate dan Ambon, dengan 20.000 orang murid, dari berbagai tingkatan klas dan jenis sekolah. Karena merasa kurang cocok dengan namanya yang berbau kebangsawanan itu, maka Raden Mas Suwardi Suryaningrat beralih nama menjadi Ki Hajar Dewantara yang lebih bersifat kerakyatan. Hal itu dilakukan pada 23 Februari 1928.

Gubernur van der Plas sangat khawatir melihat perkembangan Taman Siswa yang demikian pesat, sehingga dalam sebuah rapat rahasia yang berlangsung pada tahun 1931, ia berkata. "Jika sistem sekolah negeri tidak diubah, dalam waktu 10 tahun lagi suasana Indonesia akan menjadi suasana Taman Siswa"<sup>35</sup>.

### 3 3 Perkembangan Sekolah di Kota Yogyakarta

Semenjak gagasan kaum liberal menjadi kenyataan dengan mengintroduksi pendidikan bagi masyarakat, hanya dalam waktu yang relatif singkat Kota Yogyakarta diramaikan oleh kehadiran lembaga-lembaga sekolah baik yang diorganisasi oleh agama Katolik Kristen, Taman Siswa, yang pada dasarnya kesemuanya memberikan arti dalam proses perubahan masyarakat kota dan menunjuk pada mobilitas sosial dalam kehidupan golongan-golongan masyarakat selama waktu-waktu tertentu yang dapat ditunjukkan melalui tabel-tabel di bawah ini :

Beberapa Perkembangan Sekolah Modern di Yogyakarta.

#### KATOLIK Schakel School 1924 -- 1930

Yogyakarta	Berdiri tahun						
	1924 guru murid	1925 guru murid	1926 guru murid	1927 guru murid	1928 guru murid	1929 guru murid	1930 guru murid
		2 78	3 106	4 147	4 144	4 153	5 168

**KATOLIK**  
**HOLLANDSCH INLANDSCHE SCHOOL**  
 1917 -- 1930

Sekolahan	Berdiri tahun	1922	1923	1925	1926	1927	1928	1929	1930
		guru murid	guru murid	guru murid	guru murid	guru murid	guru murid	guru murid	guru murid
1. Kemundaman	1917	4 300	5 306	5 250	6 257	7 261	7 279	8 296	9 300
2. Gowongan	1918	2 146	3 184	3 136	5 177	6 193	5 220	6 271	6 297
3. Yogyakarta I	1918	3 267	4 295	4 265	8 281	8 318	8 319	8 340	9 360
4. Yogyakarta II	1918	2 253	3 267	4 272	7 254	7 251	8 261	7 281	7 288
5. Yogya ZZ Fransiscanus	1920	2 120	3 131	4 192	7 191	7 188	7 222	9 256	8 288
6. Mangkukusuman Lor	1922	2 48	2 67	3 138	4 149	5 161	5 193	6 234	6 239
7. Wirobradjan	1922	2 46	2 65	3 118	5 208	4 144	5 158	4 166	5 229
8. Malay Chinesche School, Loji Kecil	1929	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 33	2 37
9. Trijasa	1930	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 39

Sumber : Sint Claverbond 1917 -- 1930

**KATOLIK  
RK MULO YOGYAKARTA**

berdiri tahun	1925 guru murid	1926 guru murid	1927 guru murid	1928 guru murid	1929 guru murid	1930 guru murid
1923	3 62	5 82	5 79	4 93	7 135	8 165

Sumber : Sint Claverbond 1923 -- 1930



**KATOLIK  
PHILOSOPHIE (SCHOOL VOOR WIJSBEGEERTE)**

Yogyakarta	berdiri th	1926		1927		1928		1929		1930	
	1925	murid	guru	murid	guru	murid	guru	murid	guru	murid	guru
	12	3	12	3	12	3	14	3	16	4	18

Sumber : Sint Claverbond 1925 -- 1930

**KLEIN SEMINARIE**

Yogyakarta	berdiri th	1926		1927		1928		1929		1930		
	1925	guru	murid	guru	murid	guru	murid	guru	murid	guru	murid	
	4	13	4	26	6	43	7	61	9	68	11	86

Sumber : Sint Claverbond 1925 -- 1930

## SEKOLAH KRISTEN DI YOGYAKARTA

No.	Nama dan alamat	Jumlah seko- lahan	tahun berdiri	1945		1946	1949 Nama sekolah	Jumlah sekolah
				Nama Sekolah	Jml. murid			
1.	Holandsch Javaansche School Jl. Sultan Agung 2 & 4 Hollandsch Javansche School Jl. Suryodiningratan	2	1919	I. SD Ungaran	300 (laki-laki + perempuan = 3 : 2)	berdiri SGTK	Taman Ka- nak-kanak (TK)	9
				II. SMP Ungaran	60		SR	14
2.	Hollandsch Chineesche School (bhs. pengantar Bhs. Belanda) di Gemblakan Malaische Chineesche School (bhs. pengantar Bhs. Melayu) di Ngupasan.	1	1919	III. SMA Ungaran	75		SMP	12
		1	1919				SKKP	1
3.	KWS di Jl. Simanjuntak (SMP 8)	1	1919				SGB	1
4.	Frobel Scholen di Bintaran Wetan & Kulon.	2	1919				SMEA SMA	1 4
5.	MULO (Neer Uitgebreid leger Onder- wijs) di Jl. Wardhani II Yk.	1	1919					
6.	ELS (Europeesche lagere School) di Gondolayu 24 dan Bintaran Tengah 6 Yk.	2	1919					

Sumber : Arsip SMA BOPKRI III YOGYAKARTA

**JUMLAH MURID-MURID DAN GURU-GURU TAMAN SISWA  
1935 -- 1940**

Nama Sekolah	Tahun berdiri	Banyaknya Murid				Guru			
Taman Siswa Yogyakarta	1922	1935/ 1936	1936/ 1937	1938/ 1939	1939/ 1940	1935/ 1936	1936/ 1937	1938/ 1939	1939/ 1940
		356	--	356	450	21	--	27	--

Sumber : Majelis Luhur Taman Siswa

## CATATAN :

1. I.J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederland sch-Indie* (Batavia: J.B. Wolters Uitgevers Maatschappij, 1938), halaman 97.
2. B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Jilid I (Bandung: Sumur Bandung, 1960), halaman 172.
3. Sartono Kartodirdjo; et al., *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), halaman 15.
4. *Ibid.*, halaman 28.
5. I.J. Brugmans, *op.cit.*, halaman 157.
6. *Ibid.*, halaman 128.
7. *Ibid.*, halaman 129.
8. Wawancara dengan KRT. Puspaningrat. 15 Oktober 1983.
9. Niels Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1977), halaman 14.
10. Ki Hadjar Dewantara, *Booefening van Latteren een Kunst in het Pakoe Alamsche Geslacth* (Djogja: Drukkerij en Uitgevers Firma v.h.H. Buning, 1931), halaman 25.

11. Niels Mulder, *op.cit.*, halaman 14.
12. Sangat banyak karya sastra semacam ini, seperti: Kyai Sujarah Dharmo Sujayeng resmi. Serat Piwulang, Serat Ambya Yusup, Serat Darmawirayat.
13. Hal di atas biasanya dinyatakan dengan bahasa setempat yang berbunyi: kangge ing jaman semanten inggih sampuh anyekapi, sakugi jangkep titikan saha pipilahanipun. inggih punika mantep, temen. utami bebudenipun, saha ageng manahipun.
14. De Jong, *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1976), halaman 37.
15. Clifford Geertz, *Islam Observed* (New Haven and London: Yale University Press, 1968), halaman 11 – 13.
16. *Mengajuh antar dua karang dalam Pendidikan Masyarakat* (Yogyakarta: Penerbit Kentjana, 1951), halaman 17.
17. *Ibid.*, halaman 28 – 34.
18. Bandingkan: Ki Hadjar Dewantara, *Pendidikan*, bagian I (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1977), halaman 20; dengan "Education" dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences* (New York: The Macmillan Company, 1957), halaman 403.
19. Wawancara dengan KRT. Puspaningrat, 15 Oktober 1983, menyatakan bahwa sekolah itu juga merupakan suatu elemen dari persambungan kehidupan kultural.
20. Sjafri Sairin, *Trah dan Masalahnya: Sebuah Studi tentang Organisasi Sosial Orang Jawa*, kertas Kerja untuk seminar HPPIA di ANU Canberra, 1980, halaman 47.
21. *Gedenkschrift Uitgegeven bij Gelegenheid van het 25 Jarig Berstuursjubelieum van Zijne Hoogheid Pangeran Adipati Ario Pakoe Alam VII Hoofd van het Pakoe Alamsche 1906-1913*, halaman 24.
22. *Ibid.*

23. Ki Hajar Dewantara, *Karya K.H. Dewantara, bagian IIA Kebudayaan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1976), halaman 342.
24. *Ibid.*, halaman 347.
25. Gaya kehidupan feodal: Judi, Minuman keras dan Candu lihat dalam *Gedenkschrift . . . . op. cit.*, halaman 22.
26. Ki Hajar Dewantara, *op.cit.*, halaman 349.
27. Tindakan ini diambil oleh pemerintah Hindia Belanda, mengingat bahwa roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan baik. Pengangkatan itu sendiri tertuang dalam surat keputusan Gubernur Hindia Belanda tanggal 29 Agustus 1902. Periksa, *Pustaka Djawi* (Yogyakarta: Java Institut, 1931), halaman 178.
28. S.L. van der Wal, *De Opkomst van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie* (Uitgaven van de Commissie voor Bronnen Publicatie betreffende de geschiedenis van Nederlandsch-Indie, 1967), halaman 42.
29. Pada tahun 1911 KPA. Notodirodjo terpilih sebagai ketua dengan pendukung suara sebanyak 62 dari 66 suara yang ada. KPA. Notodirodjo waktu itu masih sebagai penasihat Pakualam VII; lihat Ki Hajar Dewantara, *op.cit.*, halaman 351.
30. Suatu masyarakat disebut tradisional jika cara bertingkah-laku di dalam masyarakat itu berlaku terus-menerus dari generasi ke generasi dengan sedikit sekali mengalami perubahan-perubahan. Tingkah laku di sini diatur oleh adat, bukan oleh hukum. Struktur sosialnya bersifat hirarkhis, posisi seseorang diperoleh karena hasil kecakapan. Lihat, Everett E Hagen, *On the Theory of Social Change* (Horwood: The Dorsey Press, 1962), halaman 55.
31. Sejak tahun 1908 ia menjadi anggota Boedi Oetomo dan pada masa kepemimpinan Dwidjosewojo ia menjabat sebagai sekretaris Boedi Oetomo.

32. Pranata SSP, *Ki Hadjar Dewantara, Perintis Perjuangan Kemerdekaan Indonesia* (Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1959), halaman 36.
33. *Ibid.*, halaman 53.
34. *Ibid.*,

## BAB IV KESIMPULAN

Masuknya pendidikan moderen di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta memiliki akibat yang positif dan negatif. Akibat positif, masyarakat kecil dapat meraih status pegawai pemerintah kolonial untuk mendapatkan predikat "priyayi". Karena itu semenjak pendidikan moderen merasuk dalam kehidupan masyarakat, arti dari kata "priyayi" menjadi luas tidak hanya "kaum bangsawan", tetapi juga mereka yang bekerja sebagai korps *Binnenlands Bestuur*. Kenyataan ini menunjuk pada gambaran mobilitas vertikal. Akibat negatif, pendidikan kesusastraan dan pendukung kebudayaan Jawa mengalami "kepudaran" saat dari golongan priyayi yang berdasarkan hubungan darah dengan raja mulai meninggalkan orientasi mereka ke keraton, beralih ke pemerintah kolonial akibat pendidikan moderen dengan berbagai alasannya. Perpindahan status pekerjaan atau fungsi mereka dalam masyarakat menunjuk pada gambaran mobilitas horizontal.

Kemerosotan status sosial golongan bangsawan atau priyayi menimbulkan terbentuknya *trah*, khususnya *trah* keturunan bangsawan. Keberhasilan mencapai status sosial tertentu dalam masyarakat dari golongan wong cilik, juga me-



nimbulkan kebanggaan tersendiri dari para keturunannya dan mereka membentuk *trah* yang pada gilirannya mengacu pada tokoh leluhur sebagai orang yang berhasil dalam kehidupannya.

Organisasi trah baik dari wong cilik atau priyayi umumnya berpusat kepada tokoh leluhur. Tokoh ini menjadi begitu penting untuk penentuan nama resmi trah. Trah menjadi satu bentuk kesatuan sosial orang Jawa yang didasarkan pada hubungan darah dan perkawinan. Tujuan dari pembentukan trah untuk memudahkan komunikasi dan berinteraksi sesama mereka. Kiranya kebutuhan akan adanya persatuan dalam keluarga yang menjadikan organisasi trah dapat dianggap menunjuk kepada cikal-bakal keturunan mereka di samping juga dapat memperlihatkan kepada masyarakat tentang mobilitas sosial yang nyata.

Kiranya bukanlah suatu perkembangan jika tanpa proses, pada hal pengertian proses adalah kejadian dari tantangan dan jawaban yang pada akhirnya menjadikan kehidupan ini lebih dinamis atas jalannya sejarah sebuah masyarakat di tempat tertentu serta dalam waktu tertentu, dari gambaran mobilitas sosial di Yogyakarta.

## BIBLIOGRAFI

Aanteekeningen Betreffende Particuliere Suikerfabricatie, dalam *TNI*, Jilid I, 1871.

Abdul Sjukur, *Beberapa Hal Perubahan dan Istilah sampai Nama Tempat di Beberapa Daerah Semasa Djepang*. Jogjakarta: Penerbit Muria, 1951.

Abdurrachman Surjomihardjo, "Golongan Penduduk di Jakarta, sebuah Ikthisar Perkembangan", dalam *Seni Budaya Betawi, Pra Lokakarya Penggalan dan Pengembangannya*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1976.

Allen, F. (ed). *Technology and Change*. New York, 1957.

Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengadjaran Islam jang diselenggarakan oleh Pergerakan Muhammadiyah*. Jogjakarta : Penjelenggaraan Publikasi Pembaharuan Pendidikan Pengadjaran Islam, 1962.

Anderson, B.R.O.G., *Jawa in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca: Cornell University Press. 1972.

Atmakusumah (pnyunting), *Tahta Untuk Rakjat*. Jakarta : P.T. Gramedia, 1982.

Armius, "Heerendiensten en Mesbruiken", dalam *TNI*, XVI, 1854.

*Babad Gijanti, Pratelan Namaning Tijang lan Panggenan*. Batavia, 1939.

*Babad Ngajogjakarta*, vol I-III, Jogjakarta: Museum Sana-budaja, 1876.

Barth, Fedrik (ed). *Ethnic Groups and Baoundaries*. Boston: Little, Brown and Company, 1964.

*Benteng Vredeburg*. Jilid II, Yogyakarta: Lembaga Studi Kawasan dan Pedesaan UGM, 1978.

Berg, L.W.C. van den. *De Inlandsche Rang en Titels op Java en Madoera*. 's-Gravenhage, 1902.

Beitelle, Andre., *Social Inequality*. England: Penguis Books Ltd 1969.

Bintarto, *Geografi Kita*. Jogjakarta: Penerbit Spring. 1969.

*Buku Kenang-Kenangan Peringatan 200 Tahun Kota Jogjakarta*, Jogjakarta 1956.

*Buku Kenang-Kenangan 50 Tahun Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, 1929-1972*. Yogyakarta: Panitia Pesta Emas R.S. Panti Rapih, 1979.

*Buku Pegangan Pamong Pradja Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jogjakarta : Pamong Pradja D.I.J., 1950.

*Buku Peringatan 30 Tahun, 1922-1952*. Jogjakarta Panitia Peringatan Taman Siswa, 1952.

Brugmans, I.J., *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indie*. Batavia: J.B. Wolters 2938.

Burge, D.H., *Soedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jilid I, terj Prajudi. Djakarta: Pradnja Paramita, 1962.

Daldjoeni, *Seluk Beluk Masyarakat Kota: Puspaparagam Sosiologi Kota*. Bandung: Penerbit Alumni, 1978.

Davis, Loan., *Social Mobility and Political Change*. London: Pall Mall Press. Ltd. 1970.

Dawam Rahardja, "Kyai Pesantren dan Desa, Suatu Gambaran Awal" *Prisma*, Nno. 4. 1973.

Drake, Michel, (ed). *Applied Historical Studies: An Introductory Reader*. LONDON. Methuen & Co Ltd. 1973.

Durkheim, Emile, *The Division of Labor*. London: The Free Press 1969.

"Education", dalam *Encyclopaedia or the Social Sciences*. New York: The Macmillan Company. 1957.

Eisenberger, *Indie en de Bedebaart naar Mekka*. Leiden: 1928.

Ekeh, Peter., *Social Exchange Theory*. London : 1974.

Emmerson, Donald K, *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics*. Ithaca Cornell University Press. 1976.

Encyclopaedia van Nederlandsch Indie, jilid IV. Leiden: 's-Gravenhage, 1921.

F.A. Sutjipto, "Beberapa Tjatatn tentang Pasar-Pasar di Djawa Tengah abad 17-18", dalam *Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM*, no 3 1970.

-----"Beberapa *Aspek Kehidupan Priyayi Jawa Masa Dahulu*", Yogyakarta : Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM. 1928.

-----, "Panembahan dalam Sistem Titulatur dalam *Bulletin Fakultras Sastra dan Kebudjaan UGM*, no. 1 tahun 1969.

G. Moedjanto, dan kawan-kawan., *Sejarah Gereja Kotabaru Santo Anotonius dan Kehidupan Ummatnya*, Yogyakarta: Panitia Peringatan 50 tahun Gereja Antonius Kotabaru, 1976.

*Gedenkshifft Uitgegeven bij Gelegenheid van het 25 jarig Bestuurs-Jubelieum can Zijne Hoogheid Pengeran Adipati*

*Ario Pakoe Alam VIII Hoofd van het Pakoe Alamsche 1906—1913.*

Geertz, Clifford., *Islam Observed* New Haven & London: Yale University Press 1968.

*Gegevens over Djojakarta, 1925.*

Groneman, J., *Javaansche Rangen en Pajoengs.* Jogjakarta: 1982.

Haan, F. de., *Priangan* Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1912.

Hadi Ningrat. "de Achteuitgang van her prestige der Inlandsche Hoofden en de Middelen om daarin Verbetering Tebrenge" dala m *TBB*, deel 17. 1899. halaman 377.

Hadisukatno, "Permainan Kanak-Kanak", *Madjalah Budaja 1953.*

Hagen, Everett, E., *On the Theory of Social Change*, Hornwood : The Dorsey Press 1962.

Hamka, *Pengaruh Mohammad Abduh di Indonesia*, Djakarta Tinta Mas, 1961.

*Himpunan Peraturan-Peraturan dan Sedjarah Kota Jogjakarta.* Jogjakarta: Penerbit Kotapradja, 1952.

*Javaansche Meisjesspelen en Kinderliendjes.* Jogja : Java Institut t.t.

Jay, Robert, R., *Javanese Villagers.* Cambridge : The MIT Press. 1969.

Jong, de., *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa* Jogjakarta: Yayasan Kanisius, 1976.

Junus Salam, *K.H.A. Dahlan, Amal dan Perjuangannja*, Jogja: Dokrah P.P. Muhammadiyah, 1968.

*Kenang-Kenangan Pekan Raja Dewi Windu Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1961 di Jogjakarta.* Jogja: 1961.

Ki Hajar Dewantoro, *Beofoening van Letteren een Kunst ini het Pakoe Alamsche Geslacht*. Jogja : Drukkerijen Uitgevers Firma v,h, H. Buning, 1931.

————— *Karya K.H. Dewantoro, bagian II A, Kebudayaan*, Yogyakarta : Majelis Luhur Taman Siswa, 1976.

----- *Pendidikan*, bagian I, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1977.

----- "System Pondok dan Asrama itulah System Nasional". *Waskita*, Jilid I, no. 2 1928.

Ki Soeratman, "Masalah Kelahiran Taman Siswa", *Pusara*, Jilid XXV, Djanuari/Pebruari—Maret/April, 1964.

Kleintjes, Ph. *Het Sraarsrecht can Nederlandsch Indie*, Amsterdam: J.H. de Bussy, 1912.

Koch, D.M.G., *Menudju Kemerdekaan*, terj, Djakarta: Jajasan Pembangunan, 1951.

Koentjaraningrat, "Tjekapar: A. Village ini South Central Java", dalam *Vilage in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1967.

*Kolonial Verslag*. The Hague: Departemen van Kolonien, annual, 1929.

Kota Jogjakarta 200 Tahun.

*Kota Jogjakarta 200 Tahun*, Jogjakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta, 1950.

Kruger, Muller., *Sedjarah Geredja di Indonesia*. Djakarta: Badan Penerbit Kristen, 1959.

Kyai Jasadipura I, *Babad Gijanti*, Betawi Centrum: Bale Pustaka 1937—1939.

*Laporan Tjurah Hudjan di Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jogja: Dinas Pertanian D.K.J., 1965

*Lelampahipun dokter J. Offringa lan Sesambetanipun dening para kawoela alit*. Jogjakarta : 1928.

Lerner, Daniel., *Memudarnya Masyarakat Tradisional. terj. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1983.*

Liem kie Hok. *Adanja Orang-Orang Tionghwa dan Keturunannya di Beberapa Kota Pesisir Djawa. Semarang : Radjawali 1931.*

Louw, P.J.F.. *De Derde Javaansche Successie Oorlog 1796—1755. Batavia : Albrecht & Ruche, 1889.*

----- *de Java Oorlog van 1825 tot 1830. I, Batavia: 1891.*

M.P.M. Muskens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia, jilidIV Ende-Flores : Percetakan Arnlodus. 1973.*

*Makin Lama Makin Tjinta. Djakarta ' Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1963.*

Mandjojokusuma, *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat Yogyakarta: 1977.*

Masri Singarimbun, *The Pupulation of Indonesia 1938—1968: A Bibliografy, London: International Planned Parenthood Federation, 1969.*

Meinsma, J.H., *Babad Tanah Djawi, 's-Gravenhage : 1941;*

*Mengajuh antar Dua Karang dalam Pendidikan Masyarakat. Yogyakarta : Penerbit Kentjana, 1951.*

Meyerhoff, Hans. (ed). *The Philosophy of History in Our Time. New York: Doubleday & Company Ind. 1959.*

Milone. Pauline D. *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts. Berkeley. Institute of International Studies, University of California. 1966.*

*Monografi Kodja Jogjakarta. 1968.*

Mulder. Niels. *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1977.*

Notojudo, *HHak Sri Sultan Atas Tanah di Yogyakarta. Yogyakarta 1975.*

Oemar Sahidu, *Sedjarah Perkembangan Agama Islam, Wudjud dan Tjitra untuk bermasyarakat*. Surabaya : Badan Penerbit Islam, 1963.

Owen, C., *Social Stratification*. London : Rautledge & Kegan Paul, 1968.

Partowidjojo, "Nota. Hal Pengadjaran (Schola) Djawa", dalam *TBB deel 5*. 1891.

Peacock, James L. *Purifying the Faith : The Muhammadiyah Movement in Indonesia Islam*. Filipina: The Benyamin/Cummigs Publishing Company. 1978.

Nagazumi, Akira, *The Dawn of Indonesia Nationalism: The Early Years of the Boedi Oetomo, 1908—1918*. Tokyo: Institute of Development Economic, 1972.

*Pedoman Pendjelasan tentang Kepribadian Muhammadiyah* Jogja : P.P. Muhammadiyah, 1963.

*Penelitian Awal Tata Kota Jogjakarta*. Jilid I, II. Jogjakarta Arsitektur UGM &PUTL. 1971.

*Perekonomian Ra'jat*. Mei 1940.

*Peringatan Tri Pantja Warsa Kotapradja Jogjakarta, 7 Djuni 1947—7 Djuni 1962*.

*Peringatan 40 Tahun Muhammadiyah*, Djakarta : Panitia Peringatan 40 Tahun Muhammadiyah, 1952.

*Pertumbuhan Perkampungan di sekitar dalam Benteng dan Luar Benteng*. Jogjakarta: Seksi Kebudayaan P.P.K., 1953.

*Peta Pendataan Letak Nama-Nama Kampung di Jogjakarta*. Jogjakarta: D.P.U., 1957.

*Pirang Tjatjah Sak Temene ing Njobo Beteng Kuwi?*. NgaJ-Jogjakarta: 1923.

"Proses Identifikasi dan Agama", *Prisma*, no. 6, 1983.

Pranata SSP, *Ki Hadjar Dewantara, Perintis Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Djakarta: Balai Pustaka, 1959.



*Pustaka Djawi*. Jogjakarta: Jawa Institut, 1931.

Raffles, T.S., *The History of Java*. 2 vols. London: Black, Berbury and Allen, 1817.

Republik Indonesia, Daerah Istimewa Jogjakarta. Jogja: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1953.

Ricklefs, M.C., *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi, 1749—1792*. London: Oxford University Press, 1974.

Riwayat Pamong Praja dalam tiga Jaman'' dalam *Panitia Pertemuan Kangen-Kangenan Eks Pamong Praja se DIY*. Yogyakarta: 1979.

Rouffaer, G.P., ''Vorstenlanden'' *Overdruk uit Adatrechtbundels XXXIV*, seri D, no. 81, 1931.

Ryadi Goenawan, ''Jagoan dalam Revolusi'', *Prisma*, Agustus 1981.

*Sarasilah Kadanoeredjan*. Jogjakarta: Museum Sanabudaja, t.t.

Sartono Kartodirdjo, ''Modernisasi dalam Pe spektif Sejarah'', dalam *Bulletin Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM*, 1977.

-----, ''Politik Kolonial Belanda abad 19'', *Lembaran Sedjarah*, no. 1, Jogjakarta: Djurusan Sedjaran Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, 1972.

-----, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V. Jakarta: Balai Pustaka, 1977.

Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies, Part II, Ruler and Realm in Early Java*. Brussel: A Manteau, 1959.

*Sejarah Singkat P.K.U. Muhammadiyah*. Yogyakarta: R.S. P.K.U.

*Sejarah Perkembangan Agama Kristen di Yogyakarta*: Yogyakarta: Sekretariat Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, 1983.

*Sejarah Singkat Perusahaan Besi Purosani*. Yogyakarta: 1981.

*Sejarah Singkat Rumah Sakit Bethesda*. Yogyakarta: R.S. Bethesda, 1980.

Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, terjemahan Kusumanto. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1981.

Sjafri Sairin, *Javanese Trah: A Preliminary Description of a Type of Javanese Social Organization*. Thesis Unpublished ANU, Canberra, 1980.

-----, *Trah dan Masalahnya: Sebuah Studi Tentang Organisasi Sosial Orang Jawa*. Kertas Kerja untuk Seminar HPPIA di ANU Canberra, 1980.

*Sint Claverbond Uitgave de P.P. Jezuiten te bate Hunner Missi* op Java, 1917 – 1940.

Soedjatmoko, et.al., *An Introduction to Indonesian History*, Ithaca: Cornell University Press, 1965.

Soedjito Sosrodihardjo, *Perubahan Struktur Masyarakat di Djawa: Suatu Analisa*, jilid I & II. Jogjakarta: Penerbit Karja, 1968.

Soekanto, *Sekitar Jogjakarta, 1755 – 1825*. Djakarta: Mahabarata, 1952.

Soepran Kastomo, *Dari Oeap Mendjadi Diesel*. Bandung: Pertjetakan doea-doea, 1958.

Soerjobronto, *Tegese Plengkung lan Beteng ing Kraton Soerakarta Hadiningrat lan Kraton Ngajogjakarta Hadiningrat*. Solo: Penerbit Soerjoloka, 1923.

*Staatblad*, no. 13, 1824.

Stoddard, L., *Dunia Baru Islam*, Djakarta: Panitia Penerbit, 1966.

Sudarisman Poerwokusuma, *Peranan Kota Yogyakarta dalam Perjuangan*. Yogyakarta, Pusat Studi Kebudayaan UGM, 1982.

Teko Soemodiwirjo "Kaoem Tengahan Priboemi", dalam *Volksalmanak Djawi*, 1941. Batavia: Balai Poestaka, 1941.

Tjokrosumanto, *Sekitar Sedjarah Perkembangan Djawatan Kereta api*. Djokjakarta: Penerbit Bersaudara, 1951.

*Tri Warsa: DPRD Kotapradja Jogjakarta*. Jogjakarta: 1953.

Tumenggung Ronggo Prariwosetiko, *Babab Kraton Karto-soera sampai dengan Babab Perdjanjian Gijanti*. Jogjakarta: Museum Kraton Jogjakarta, t.t.

Tumin, Melvin M., *Social Stratification: The Forms and Functions of Inequality*, New Delhi: Prentice Hall, 1969. . . .

Verwijk, J.J., "Nota Over de Staatsie en het Gevolg der Inlandsche Ambtenaren in de Gouvernementslanden op Java en Madoera", *TBG*, XVII, 1899.

Vey, Ruth Mc., "Taman Siswa and the Indonesian National Awakening", (Indonesia, IV, 1967.

Vlekke, B.H.M. *Nusantara, A. History of East Indie Archipelago*. Cambridge: Massachusetts, 1945.

*Volkstelling 1930*, 8 vols. Batavia: Departement and Landbouw Nijverhed in Handel, 1933 - 36.

Verdenbregt, "The Hadj, Some of its Features and Functiona in Indonesia", *BKI*, deel 118, 1962.

Wal, S.L. van der., *De Opkomst van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch Indie*. Uitgaven van de Commissie voor Bronnen Oybkuatue betreffebde de gacgsuedebus van Nederlandsch Indie; 1967.

Wertheim W.F., *Indonesian Society Transition*. Bandung Sumur Bandung, 1956.

Winter Sr. C.F., *Kawi Javaanesch Woordenboek Z.P.*, 1928.

Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantresn: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

## DAFTAR WAWANCARA

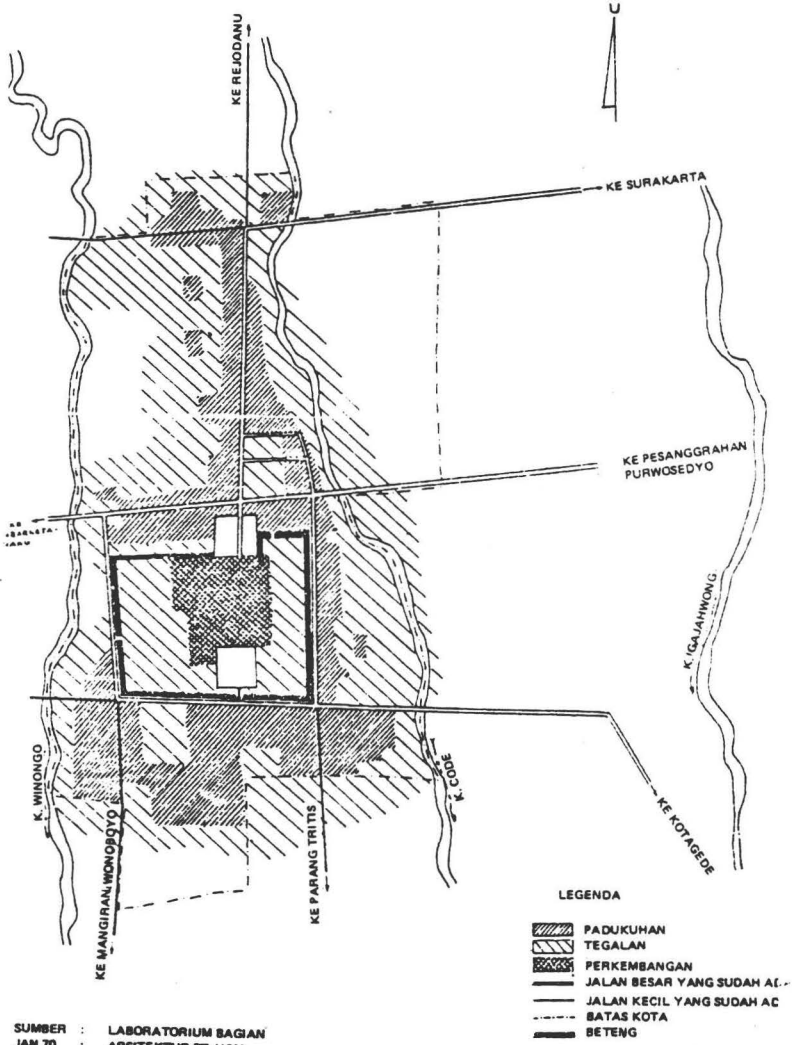
- KRR. Partahadiningrat : Jln. Kadipaten Wetan  
Yogyakarta
- KRT. Puspaningrat : Jln. Siliran Kidul  
Yogyakarta
- KRT. Sumodiningrat : Jln. Kratonan  
Surakarta
- Soeprapto : Perumahan PJKA  
Lempuyangan Wangi  
Yogyakarta
- mBah Slamet : Jln. Sukun  
Yogyakarta
- Achmad A. Darhan : Kauman (belakang Masjid besar)  
Yogyakarta



# Lampiran 2

## PETA PERKEMBANGAN KOTA KOTA YOGYAKARTA

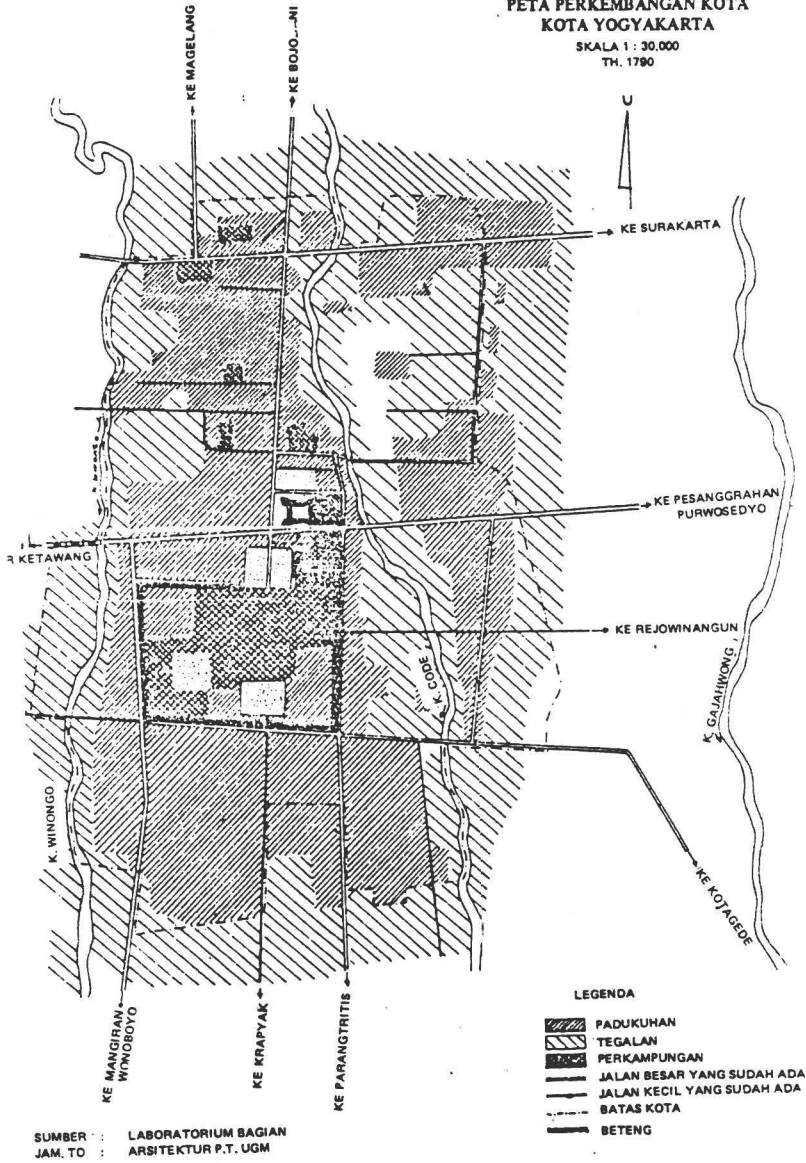
SKALA 1 : 30,000  
TH. 1768



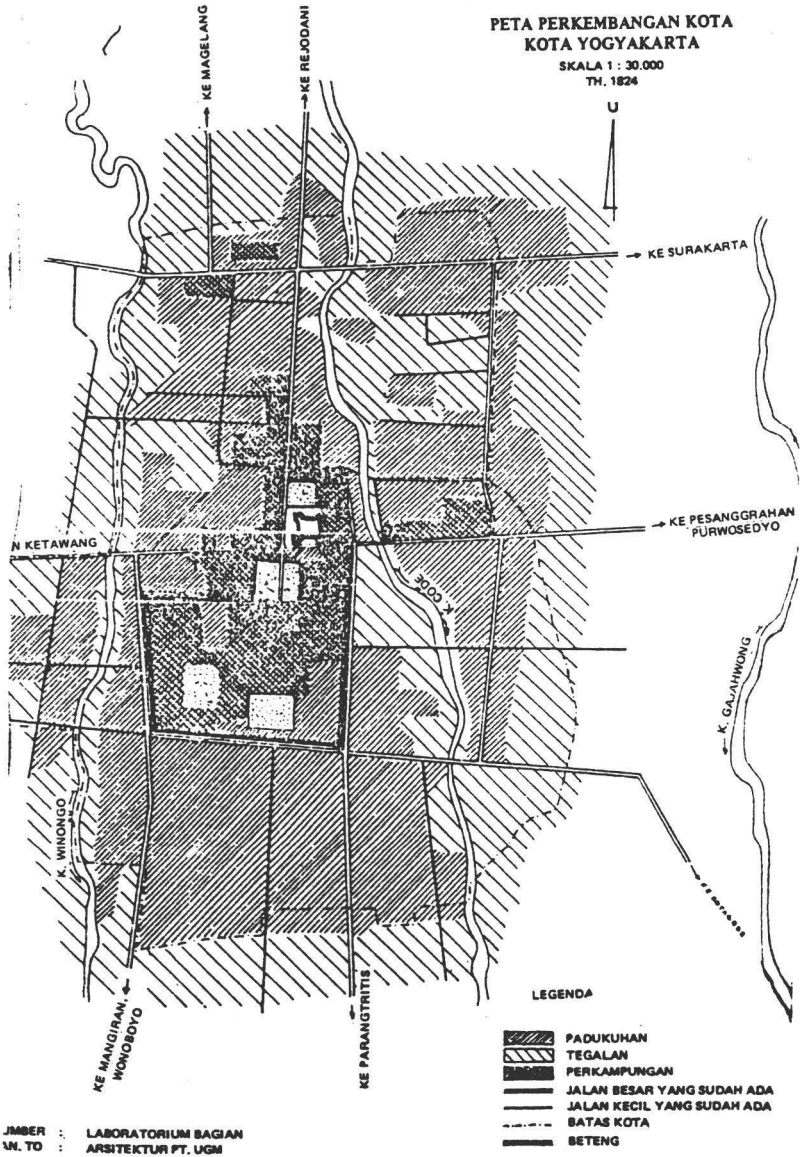
# Lampiran 3

## PETA PERKEMBANGAN KOTA KOTA YOGYAKARTA

SKALA 1 : 30.000  
TH. 1790

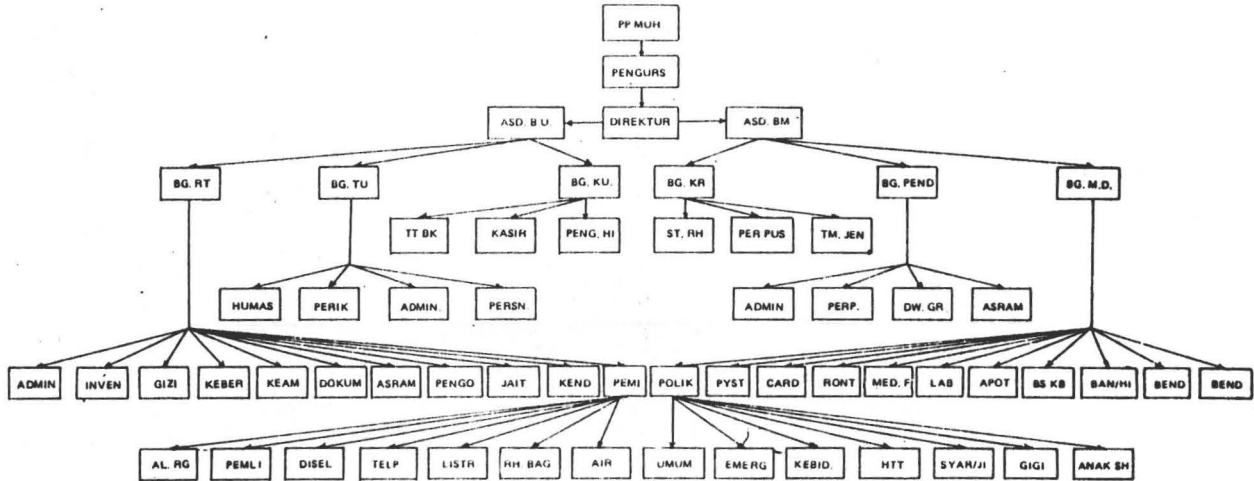


# Lampiran 4





STRUKTUR ORGANISASI  
RS. PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



G32  
002895.1

